

INDONESIA CERDAS DAN KUAT

BERITA INDONESIA[®]

EDISI 77 TAHUN VI ★ JUNI 2010

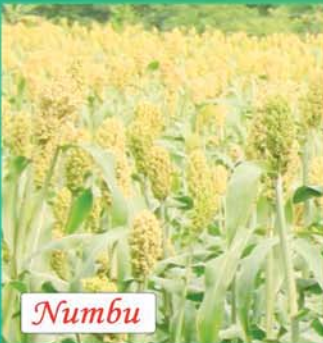
Rp 16.000 (Luar Jabodetabek Rp 17.500)



MENGGUGAT FEODALISME

Tersedia

BIBIT SORGUM VARIETAS NASIONAL DI AL-ZAYTUN



VARIETAS : NUMBU

Umur : 105 - 110 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000

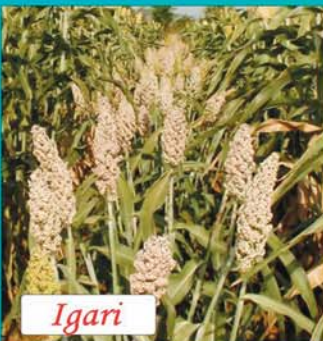


VARIETAS : KAWALI

Umur : 110 Hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



VARIETAS : IGARI

Umur : 75 - 80 hari

Harga :

1. Packing 5 kg : Rp. 100.000
2. Packing 1 kg : Rp. 30.000
3. Packing 250 gr : Rp. 15.000
4. Packing 100 gr : Rp. 10.000



Sampul
desain: esero, sonny p

Edisi No. 77/Th. VII/ Juni 2010

DARI REDAKSI 4
 VISI BERITA 5
 BERITA TERDEPAN 6
 BUNG WARTO 8
 HIGHLIGHT/KARIKATUR BERITA 9

BERITA UTAMA

FEODALISME HAMBAT PEMBERANTASAN KORUPSI | 12

Kultur feodalisme yang masih kuat di Indonesia menghambat upaya pemberantasan korupsi dan demokratisasi serta melemahkan peran lembaga-lembaga independen.



Ironi Lembaga Independen 18
 Korbannya Hak Warga Negara 20
 Temuannya Sekadar Kosmetik 22
 Aman Setelah Tidak Berkuasa 24

BERITA KHAS
 Ketika Guru Ikut Demo 26

BERITA NASIONAL
 Buruknya Birokrasi Kita 28
 Apa yang Salah 29

BERITA POLITIK
 Sebuah Pertanyaan untuk Anas 30
 DPR Minta Duit Lagi 31

BERITA EKONOMI
 Pengutang Terbesar Sepanjang Sejarah 32



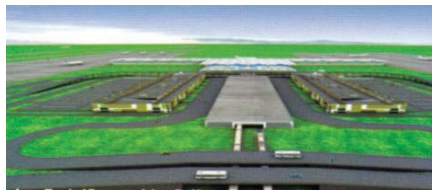
BERITA TOKOH
 Alwi Shihab 33
 Khofifah Indar Parawansa 33
 Christine Hakim 33
 Jero Wacik 33

BERITA OLAAHRAGA
 Al-Zaytun Mengukir Prestasi 43



Merayakan Kemanusiaan 44
 Jabulani Bikin Gemas 44
 Basket Makin Menarik 46

BERITA PUBLIK
 Hikkapi Siap Kembangkan Perkeretaapian 47
 Menuju Bandara Berkelas Dunia 48



BERITA DAERAH
 Percontohan Pengembangan PLP 49
 Menangkap Nelayan Ala Polair 50
 Menggali Potensi SMUN II Dolok Sanggul 51
 Sidoarjo Raih Adipura Ketiga Kalinya 51

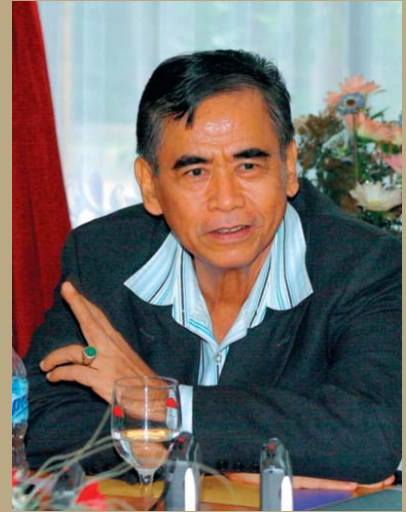
BERITA MANCANEGERA
 Teluk Meksiko Makin Kritis 53



'Penjara' Gaza Mulai Dibuka 54

BERITA HUMANIORA
 Merokok Itu Kampungan 56
 Ayo Kerja Setiap Hari 58
 Terpanggil Menolong Orang Tuna Rungu 58
 "Saya Yakini, Saya Tekuni, Saya Berhasil" 60
 Menjadi Kebanggaan Keluarga 60

LENTERA

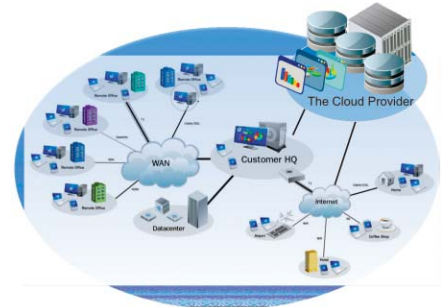


**INDONESIA CERDAS DAN KUAT
 AL-ZAYTUN SUMBER INSPIRASI
 (BAGIAN KETUJUH)**

Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang adalah seorang cendekia (cendekiawan) yang mengabdikan diri dalam jalur pendidikan (pemangku pendidikan). Dia seorang syaykh 1 (guru besar) yang amat gigih mendorong, mewujudkan dan menginspirasi agar bangsa ini lebih cerdas dan arif dengan pengutamaan perbaikan pendidikan, supaya terwujud Indonesia yang cerdas dan kuat.....34

BERITA BUDAYA
 Eksis di Era Globalisasi 61

BERITA IPTEK
 Data di Atas Awan 62



BERITA KESEHATAN
 Tidak Semua Benar 64



Waspadai Sakit Kepala Berkepanjangan 64

BERITA BUKU
 "Bob Marley" Pulang Kandang 66
 Semarak Buku Tentang Piala Dunia 66

► Demokrasi, Toleransi dan Perdamaian

PEMIMPIN UMUM:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

PEMIMPIN REDAKSI:

Ch Robin Simanullang

REDAKTUR SENIOR:

MYR Agung Sidayu
Imam Prawoto
Suryo Pranoto

IN HEADNEWS (LIPUTAN, LITBANG & PUSDAT):

Mangatur Lorieclide Paniroy (Redaktur Eksekutif)

REDAKTUR:

Samsuri, Marjuka Situmorang, Dian Gina Rahayu

SEKRETARIS REDAKSI

Bantu Hotsan

STAF REDAKSI:

Nawawi, Ikhwan Triatmo, Sarjiman,
Doan Adikara Pudan, Budi Rahardjo

WARTAWAN FOTO:

Wilson Edward

KARIKATURIS:

FX. Ichida Sonny P

KONTRIBUTOR:

Syahbuddin Hamzah, Anis Fuadi, Chusnato,
Retno Handayani

DESAIN GRAFIS:

ESERO Design, Arief Maulana

BIRO REDAKSI:

Medan: Bontor Simanullang, Humbahas: Parasian Manalu, Palembang: Sri Windayani, Jawa Barat: Ade Wiharyana (Kepala), Bernard Sihite, Tarakan: Sudirman Leonard Pohan, Amerika Serikat: Mibsam Bahanan (Maryland), Rukyhal Basri (Philadelphia)

PENERBIT:

PT Berita Satria Wiratama

Bekerjasama dengan Yayasan Pesantren Indonesia dan PT. Asasira

KOMISARIS:

Syaykh Dr AS Panji Gumilang

DIREKTUR/PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Ch Robin Simanullang

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN:

Samsuri

IKLAN DAN PROMOSI:

Imam Prawoto, Dian Gina Rahayu, Budi Rahardjo

KEUANGAN DAN UMUM:

Mangatur Lorieclide Paniroy

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI:

Abdul Halim, Marjuka Situmorang, Bantu Hotsan

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan.
Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
Fax. (021) 83787235

E-MAIL:

redaksi@berindo.com - iklan@berindo.com

WEBSITE:

www.beritaindonesia.co.id

ISSN: 1907-977X

MEREK: Ditjen HAKI Sertifikat IDM No. 000.108.028

PERCETAKAN:

PT Gramedia (Isi di luar tanggung jawab percetakan)



SEMANGAT: Gerakan Ayo Kerja Setiap Hari diawali dengan membunyikan jam weker di Lapangan Parkir Timur, Senayan, Jakarta (16/06/2010)

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Salam Sejahtera

Sidang Pembaca,

Kasus video porno artis yang banyak menyita perhatian media dan masyarakat sebulan terakhir ini, tidak menyurutkan niat kami untuk tetap menyoroti soal pemberantasan korupsi yang akhir-akhir ini terasa mandek. Sejumlah pihak menilai, maraknya korupsi di negeri ini karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta belum memadainya gaji yang diterima oleh aparat pemerintah.

Namun, di atas semua itu, ada faktor penyebab terpenting mengapa korupsi masih merajalela di negeri ini yakni kultur feodalisme yang masih kuat di tengah masyarakat kita, khususnya pada penguasa, baik di pusat maupun di daerah.

Jika sifat feodal (feodalistis) dimiliki seorang penguasa, niscaya sang penguasa akan mencari segala cara untuk menutupi aib yang dilakukannya atau orang-orang di lingkarannya. Dalam rangka inilah diyakini, seorang penguasa akan memanfaatkan kedudukannya mendikte bawahannya, bahkan lembaga lain, termasuk lembaga independen agar bertindak sesuai keinginannya. Untuk mengetahui lebih jauh kaitan antara feodalisme dan korupsi, bisa Anda baca di rubrik Berita Utama.

Dalam rubrik Lentera edisi ini kita menyoroti betapa pentingnya pendidikan dalam mewujudkan Indonesia yang cerdas dan kuat. Menurut Syaykh Panji Gumilang, lemahnya pendidikan suatu bangsa akan mengakibatkan kelemahan ekonomi, politik dan persatuan bangsa itu. Kelemahan produktivitas pengetahuan suatu negara (institusi) lebih dari apapun yang lain, merupakan pangkal dari kelambanan, erosi dan krisis yang tak berkesudahan pada sosial ekonomi negara.

Sementara dalam rubrik *Berita Khas* kami menilai, menjalani profesi guru masih menjadi dilema di negeri ini. Di satu sisi guru dituntut lebih profesional, namun di sisi lain guru juga harus memikirkan kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka pun turun ke jalan menyuarakan agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka. Namun, suara-suara itu seolah menguap begitu saja ditelan waktu.

Untuk memenuhi kebutuhan pembaca di luar rubrik-rubrik 'serius' seperti Berita Politik, Anda bisa menengok rubrik Berita Iptek tentang "Data di Atas Awan" yang memungkinkan para pengguna komputer bekerja tanpa harus terikat dengan satu komputer karena semua aplikasi dan data ada di internet; Berita Kesehatan tentang makanan organik; Berita Buku dan sebagainya.

Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca, semoga Anda berkenan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Feodalisme Akar Masalah

Korupsi masih menjadi permasalahan paling mendasar di Indonesia sekarang ini. Berbagai pendapat tentang akar dan solusi masalah ini sudah banyak disampaikan para pakar, politisi, maupun pejabat negara. Beberapa pengamat berpendapat, maraknya korupsi di negeri ini karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Ada juga yang berpendapat, bahwa sifat serakah memang sudah melekat pada diri pejabat. Sementara pemerintah berpendapat, korupsi terjadi karena masih minimnya upah para pegawai negara. Sesuai dengan akar masalah tersebut, berbagai solusi pun ditawarkan, seperti menegatkan pengawasan, menegakkan hukum, dan menaikkan pendapatan pegawai.

Untuk pengawasan, sejak zaman Orde Baru sebenarnya di setiap departemen sudah dibentuk sebuah lembaga pengawasan yang dikenal dengan Inspektorat Jenderal (Irjen). Namun sejauh ini, fungsi irjen ternyata mandul. Buktinya, korupsi terus merajalela hampir di semua institusi. Besar dugaan, para pegawai Irjen ini justru ikut berkubang lumpur korupsi. Di samping itu, ada juga beberapa lagi instansi yang pada dasarnya berfungsi sebagai pengawas, seperti BPK dan BPKP. Namun, lembaga-lembaga itu pun kurang punya kekuatan untuk menghentikan korupsi.

Di bidang penindakan atau penegakan hukum, sama seperti negara lain, Indonesia juga memiliki lembaga peradilan. Tiga pilar pembentuk peradilan, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim juga dimiliki negara kita. Namun, bukannya memberantas korupsi, penegak hukum ini malah menjadi pelaku korupsi, sebagaimana laporan lembaga survei internasional beberapa waktu lalu.

Akibat kemandulan penegak hukum tersebut, lahirlah ide untuk membentuk sebuah lembaga ad hoc yang independen untuk memberantas korupsi. Tahun 2003, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun didirikan dengan segala sarana pendukungnya. Walaupun terkesan terbang pilih, pada periode pertama tugasnya, KPK berhasil memecahkan beberapa kasus korupsi. Namun pada periode kepemimpinan kedua, setelah sempat membuat gebrakan sporadis dengan menangkap beberapa pelaku korupsi kelas kakap, komisi ini tiba-tiba mendapat terjalangan badai.

Sibuk diombang-ambing terjalangan angin yang entah dari mana, KPK pun belakangan ini tampak mandul. Koran-koran pun sedikit surut dari berita korupsi. Tapi kita yakin bukan tindak korupsinya yang sudah berhenti, namun pengungkapannya yang stagnan.

Bicara soal pemerintah yang menyebut terjadinya korupsi akibat dari masih minimnya pendapatan pegawai, pemerintah juga (paling tidak untuk beberapa instansi, seperti di

kementerian keuangan) telah menaikkan pendapatan pegawai melalui beberapa cara, seperti menaikkan gaji pokok, memberikan atau menaikkan tunjangan. Namun, program yang disebut dengan program renumerasi itu pun tampaknya tidak bermanfaat. Buktinya, baru-baru ini, seorang pegawai biasa Ditjen Pajak Gayus Tambunan saja masih tetap melakukan tindak korupsi yang merugikan negara hingga ratusan milyar rupiah.

Melihat kusutnya permasalahan korupsi di Indonesia seperti sekarang ini, ada satu akar masalah yang mungkin menjadi penyebab sulitnya pemberantasan korupsi dilakukan selama ini, yakni kultur feodalisme yang masih kuat di tengah masyarakat kita, khususnya pada penguasa, baik di pusat maupun di daerah.

Jika sifat feodal (feodalistis) dimiliki seorang penguasa, sifat itu diyakini akan menggerakkan pikirannya untuk terus mencari cara bagaimana mempertahankan kehormatan dari kekuasaan yang dipegangnya. Sesuatu yang membuat citra sang penguasa buruk jelas akan mengganggu kehormatan dan kekuasaannya. Karena itu, sang penguasa yang dipengaruhi sifat feodalis diyakini akan menutupinya mati-matian.

Menyadari pecegahan lebih baik dari pengobatan, penguasa feodalistis pun diyakini menyadari bahwa langkah yang paling efektif untuk menjaga kehormatan sekaligus kekuasaan adalah mencegah adanya pihak yang hendak membongkar aib yang dilakukannya atau orang-orang di lingkarannya. Dalam rangka inilah diyakini, seorang penguasa akan memanfaatkan kedudukannya mendikte bawahannya, bahkan lembaga lain, termasuk lembaga independen agar bertindak sesuai keinginannya.

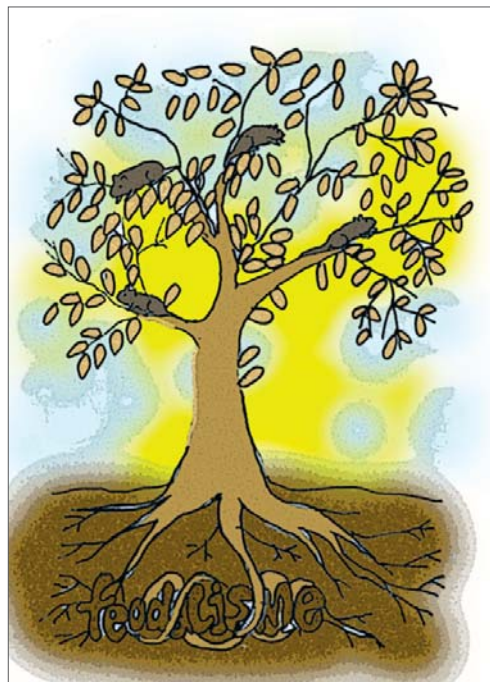
Jika ada pihak yang dianggap tidak bersedia menuruti keinginan-

nya, seorang yang terpengaruh feodalistis juga diperkirakan mampu melakukan rekayasa pembunuhan karakter bahkan nyawa lawannya. Dari dasar pemikiran itulah maka apa yang dialami KPK – berbagai upaya pelemahan - misalnya, diduga karena pekerjaan mereka yang gigih memberantas korupsi.

Walau susah dibuktikan, namun dampak dari kultur feodalisme ini cukup membahayakan. Jika seorang penguasa menggunakan feodalisme dalam gaya pemerintahannya niscaya jalannya pemerintahan akan mengalami kelumpuhan. Dengan demikian, pemberantasan korupsi pun pasti tidak akan jalan. Sebaliknya, bahkan akan bertambah subur.

Menyadari akar korupsi demikian, maka langkah yang diperlukan untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia pertama sekali adalah mengembalikan independensi KPK. Kedua, meningkatkan profesionalisme penegak hukum. Dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan pengawasan masyarakat, khususnya lembaga swadaya masyarakat.

Redaksi





Surat atau komentar tentang apa saja baik berkenaan dengan isi majalah Berita Indonesia maupun ide/gagasan/pandangan tentang isu-isu aktual dapat dikirimkan ke Redaksi Berita Indonesia, dengan alamat sebagai berikut:

• email : redaksi@berindo.com
 • surat : Jl. Bukit Duri Tanjakan IX No. 8A Jakarta Selatan 12840
 Telp. (021) 8292735, 8293113, 70930474
 Fax. (021) 83787235

Semua Orang Terseret

Efek sosial video porno selebritis papan atas sungguh dahsyat. Video panas tak bermoral tersebut telah menyedot perhatian masyarakat mulai dari kaum gedongan sampai pinggiran kali, dari perumahan mewah sampai kawasan kumuh, dari media cetak sampai elektronik, dari kalangan remaja sampai ibu-ibu pejabat dan elite nasional. Hujatan demi hujatan bercampur kaget atas perilaku seks para artis muda itu seolah membuat semua orang terseret di dalamnya, seperti baris lagu Ebiyet G Ade 'ini dosa siapa, salah siapa'. Peredaran video porno selebritis papan atas ini me-

nyebabkan demoralisasi dan membahayakan generasi muda, khususnya anak-anak. Polisi harus segera mengambil langkah hukum, tangkap dulu pelaku, temukan penyebabnya dan hukum seberat-beratnya karena tindakan perselingkuhan dan perzinahan adalah pidana. Masyarakat juga harus mendukung polisi untuk menuntaskan masalah ini melalui hukuman moral dan sosial terhadap pelaku dan pengedar.

Hj. Siti Umiyati
modus_bogor@plasa.com

Akal-akalan DPR

Masyarakat belakangan ini sedang menyoroti usulan DPR soal dana aspirasi yang dinilai tidak tepat. Dana aspirasi untuk tiap anggota DPR seharusnya tidak perlu diwacanakan karena hal itu merupakan akal-akalan dari para anggota dewan yang telah merasakan empuknya kursi di Senayan. Argumen untuk dana aspirasi itu seolah-olah bentuk aspirasi dari daerah rasanya kurang kuat, namun lebih pada upaya untuk mendapatkan modal politik supaya pada periode berikutnya sudah cukup modal. Usulan ini tidak bisa disahkan karena saya yakin masih banyak anggota DPR yang me-

miliki hati nurani daripada mengusulkan anggaran yang menguntungkan dirinya sendiri. Masyarakat harus menolak usulan tersebut, kemudian pemerintah harus konsisten menolak usulan tersebut karena bertentangan dengan konstitusi dan bisa mengakibatkan sulit dan tidak tertatanya anggaran negara.

Ronald Surbakti
acay_bogor@plasa.com

Diskriminasi Sekolah Berlabel RSBI

Usaha segelintir oknum membuat sendiri sekolah dengan label Rintisan Sekolah Berstandar Internasional dinilai tidak masuk akal karena memupus amanat pendidikan untuk membebaskan manusia dari ketidaktoleranan, kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Pemberian label kepada sekolah-sekolah bukan pada perhatian akan mutunya, tapi lebih mengarah kepada UUD, ujung-ujungnya duit dan kredit poin bagi oknum kepala sekolah. Pemakaian label internasional oleh sekolah lebih kepada meningkatkan bargaining position sekolah untuk menarik siswa dari kalangan berduit, dan menyingkirkan calon siswa dari kalangan tidak berpunya. Caranya, pendaftaran siswa baru sekolah RSBI lebih awal dibanding sekolah lain. Sebagai contoh, ada sebuah SMK Negeri RSBI di kawasan Jakarta Selatan yang sudah membuka pendaftaran untuk kelas RSBI dengan uang pangkal Rp 8 juta dan SPP Rp 400 ribu yang diinformasikan secara lisan kepada calon. Dengan begitu siswa dari kalangan miskin dari awal sudah tersingkir. Namun yang berkantong tebal dan tergiur label internasional melenggang tanpa rintangan.

Lalu dimana peranan komite sekolah dalam menentukan biaya? Walaupun ada rapat komite, menentukan biaya itu hanya untuk ketuk palu. Karena biaya dapat ditentukan di depan secara bisik-bisik. Sebab yang masuk RSBI dari kalangan berpunya. Walaupun ada yang protes, wali murid yang lain cs-nya kepala sekolah langsung dipatahkan dengan dalih sekolah bermutu memang mahal. Begitulah kejadian sebenarnya. Pola tersebut sebenarnya hampir di semua SMU Negeri Jakarta, bukan hanya di RSBI. Sekolah serta aparatnya di atasnya seharusnya malu. Tidak fair kalau hanya menimpakan kesalahan kepada kepala sekolah. Pihak yang berwenang di atas kepala sekolah juga harus bertanggungjawab. Ternyata APBN sebesar 20 persen atau Rp 209 triliun untuk pendidikan belum mampu meng-

PASTIKAN TARIF IKLAN **BERITAINDONESIA**

Halaman	Ukuran	Harga
Jacket Cover	204 x 268 mm	Rp. 40.000.000
Cover 2	204 x 268 mm	Rp. 20.000.000
Cover 2 Plus	408 x 268 mm	Rp. 35.000.000
Cover 3	204 x 268 mm	Rp. 17.000.000
Cover 3 Plus	408 x 268 mm	Rp. 30.000.000
Cover 4 (Kulit Belakang Luar)	204 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam (Full Page)	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
1 Him Dalam Berhadapan (Facial Page)	408 x 268 mm	Rp. 25.000.000
1 Him Dalam Tengah (Center Page)	408 x 268 mm	Rp. 32.000.000
Advertorial / Pariwara	204 x 268 mm	Rp. 12.000.000
2/3 Him Vertical Trimed	204 x 213 mm	Rp. 9.000.000
2/3 Him Horizontal Trimed	153 x 268 mm	Rp. 8.000.000
1/2 Him Horizontal Trimed	102 x 268 mm	Rp. 7.000.000
1/2 Him Vertical Trimed	204 x 134 mm	Rp. 6.000.000
1/3 Him Vertical Trimed	204 x 67 mm	Rp. 4.000.000
1/3 Him Horizontal Trimed	51 x 268 mm	Rp. 3.000.000

Iklan kupung (kanan & kiri) minimal lima kali pemuatan © Rp. 5.000.000

PEMASANGAN IKLAN:
Telp. (021) 83701736, 8292735, 70930474
Fax. (021) 83787235

hilangkan diskriminasi dalam dunia pendidikan Indonesia.

M Fuad Usman
*Jl. Raya Lt Agung, Gg Langgar
Kebagusan, Jaksel 12520*

Waspada Provokasi dalam Pilkada

Kerusuhan penyelenggaraan Pilkada belakangan ini terjadi di sejumlah daerah, seperti di Kota Sibolga, Sumatera Utara; Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur; dan terakhir di Kabupaten Humbanghasundutan, Sumatera Utara (24/5/2010). Kerusuhan Pilkada di Humbanghasundutan dipicu keputusan KPU Daerah (KPU D) setempat yang tidak meloloskan salah satu pasangan bakal calon yang mengakibatkan mengemukakan massa dengan merusak sejumlah kantor dinas pemerintah kabupaten antara lain: Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Peternakan, dan Kantor Dinas Pendidikan.

Sedangkan di Mojokerto, pada awalnya tidak ada prediksi bakal rusuh karena dalam proses-proses sebelumnya tidak

ada indikasi ke arah situ, tapi ternyata kerusuhan justru besar. Menyikapi hal di atas sebagai warga negara yang cinta damai, seluruh komponen masyarakat khususnya para elite politik, perlu meningkatkan kewaspadaan ini guna meminimalisasi potensi aksi kerusuhan selama penyelenggaraan Pemilu. Apalagi kesempatan ini bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga untuk memprovokasi dan memecah belah bangsa agar lebih mudah menanamkan ideologinya membangun negara di luar ideologi Pancasila.

Masyarakat harus bersatu padu menjaga dan membela NKRI agar tetap kokoh dan kuat. Hal tersebut bukan hanya tugas aparat keamanan (TNI/Polri) saja, tetapi merupakan tugas dan kewajiban seluruh lapisan masyarakat negara ini.

Ari Sulistyowati, S.Sos
arisulis@yahoo.com

Terorisme Harus Ditumpas Habis

Sepanjang paham radikalisme masih tumbuh subur dengan bebas di negeri ini, terorisme masih sulit ditumpas habis.

Karena tindakan brutal teroris cenderung diilhami oleh pemahaman radikalisme. Tidak sepele dan sejalan dengan ideologinya dianggap musuh dan dianggap pantas untuk dibunuh. Cara pandang paham radikalisme seperti ini jelas sangat mengusik hak dasar dan ancaman bagi negara kita. Dalam hal ini negara memiliki tanggung jawab dan kewenangan penuh untuk memberantas terorisme dengan pelaksana tunggal aparat keamanan, dalam hal ini, Polri, TNI dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Melihat perubahan pola teknik serangan teroris saat ini, Polri tak akan mampu bekerja sendiri sehingga diperlukan kerja sama dengan semua pihak termasuk lintas departemen dan kementerian lain. Namun harus dibarengi dengan payung hukum, mensinergikan semua kekuatan intelijen di tiap-tiap instansi. Polri, BIN, dan TNI harus tetap satu garis dalam memberantas teroris. Sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh warga.

John Sutar
john_sutar@yahoo.com

Tempat Anda untuk Berlangganan Majalah BERITAINDONESIA

Anda yang berada di luar Pulau Jawa dapat menghubungi alamat di bawah ini :

BANDA ACEH : BTN Ajuen, Lr Melati No. 118 Kec. Peukan Bada, Banda Aceh 23351. Tlp (0651)41093, **MEDAN** : Komplek Vila Palm Kencana Blok R No. 10 KM 12, Medan-Binjai 20351. Tlp (061)8460646, **SIANTAR** : Jl. Ramping No. 18, Pematang Siantar, **LABUHAN BATU** : Jl. Padang Bulan No. 28, Rantau Prapat. **KARO** : Jl. Sangab Enlau No. 51 Kaler Jahe. **RIAU** : Jl. Ababil No. 15B Rt 07 Rw. 07, Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi Pekanbaru 28124, Riau. Telp (02761) 26578, **RIAU UTARA** : Perum Beringin Patra Gg. Poros No. 3 Rt 02/09, Bukit Datuk, Dumai 28825. Telp (0765)36219. **RIAU SELATAN** : Jl. Pattimura No. 28C Rt. 06/02, Kel. Skip Hilir, Rengat Timur, INHU, Riau. Telp (0769)21932, **RIAU KEPULAUAN** : Jl. Sri Pulau Gg. Kayu Manis No. 129W Rt. 03/02, Kel. Bengkalis Riau. Telp (0766)22924, **PADANG** : Jl. Pamancangan I No. 1Rt. 006/02 Kel. Pasar Gadang, Padang Selatan, Sum-Bar 25210. Telp (0751)27289, **JAMBI** : Jl. Depati Purbo, Komplek Karya Telawai Permai II No. 06 B, Kel. Pematang Sulur RT 16, Kec. Telanaipura, Kota Jambi. Telp 081366106709, **BENGKULU** : Jl. Kemang Manis No. 8 Rt. 08/Rw. 2, Kel. Sawah Lebar, Kec. Gading Cempaka, Kodya Bengkulu 38228. Telp (0736)20663, **PALEMBANG** : Perum Mas Karebet Blok A1 No. 15 Palembang 30154. Telp (0711)416545, **MUARA ENIM** : Perum Gunung Ibul Blok C2 No. 8 Kab. Prabumulih Sumatera Selatan Telp (0713)322420, **PANGKAL PINANG** : Achmad Effendi, Jl. Sriwijaya RT.001/001, Gedung Nasional, Taman Sari. **LAMPUNG** : Jl. Wiraswasta No. 23 Rt. 02 Lk. I Kel. Gedong Meneng, Kec. Kedaton, Bandar Lampung 35145. Telp (0721)701281, **KOTABUMI** : Jl. Jend. Sudirman No. 49 Kota Gapura Kotabumi Lampung Utara. Telp (0724)328369, **PONTIANAK** : Jl. Karimata No. 19, Kelurahan Sui Bangkong Pontianak 78116, **SINGKAWANG** : Jl. Pembangunan Gg. Sukaramah No. 27A Singkawang Kal-Bar, **SINTANG** : Jl. Imam Bonjol No. 54 Sintang 78611. Telp (0562)21544, **KETAPANG** : Jl. Kol. Sugiono No. 48 Ketapang, **BALIKPAPAN** : Jl. Sepinggan XI, Rt 33 No. 6, Kel. Sepinggan, Kec. Balikpapan Selatan, Kodya Balikpapan 76115. Telp (0542) 764365, **PASIR** : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 12 Rt. 05 Rw. 02 Tanah Grobot Kab. Pasir, Kal-Tim. Telp (0543)22335, **SAMARINDA** : Jl. Latsitarada III, Perum Bukit Indah Blok B No. 6, Kel. Sel Kunjang Samarinda. Telp (0541)273035, **BERAU** : Jl. SM Aminuddin No. 749 Tanjungredep Kab. Berau Kal-Tim. Tlp (0554)23130, **BANJARMASIN** : Komplek Kayu Tangi I No. 28 Rt. 45, Kec. Banjar Utara Banjarmasin 70123. Telp (0511)304396, **PALANGKARAYA** : Jl. Karanggan No. 1 Kelurahan Tanjung Pinang, Kec. Pahandut, Kodya Palangkaraya 73113, Kalimantan Tengah. Telp (0536)38958, **PANGKALAN BUN** : Jl. Perwira No. 1 Rt/Rw 05, Kel. Mendawai, Kec. Arsel, Pangkalan Bun Kal-Teng. Telp (0532)24452, **KAPUAS** : Jl. Seroja No. 2 Selat Dalam, Kuala Kapuas, Kal-Teng. Telp (0513)24082, **BUNTOK** : Jl. Ampah Buntok, No. 24 Rt. 40. Ampah, Barito Selatan, Kal-Teng. Telp (0622)31334, **MANADO** : BTN Nusantara Permai Blok C No. 11 Mapangget Barat, Manado 9524, **MAKASSAR** : Komplek Mangasa Permai Jl. Tallasalapang II Blok J1 No. 12, Makassar, Sul-Sel. Telp (0411)863655, **PAREPARE** : Jl. Wakke'e No. 5 Parepare Sul-Sel. Telp (0421)22785, **GOWA** : Jl. Syekh Yusuf VII Gowa. Telp (0411)861661, **BONE** : Jl. Hussain Jeddawi Baru No. 9A, Bone, Sul-Sel. Telp (0481)2000041, **PALOLO** : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palopo. Telp (0471)24310, **PALU** : Jl. Tulip II No. 1, Perumnas Balaroa, Palu, Sul-Teng. Telp (0451)460717, Fax. (0451)460717, E-mail: ypi_calebaswustho@yahoo.com. **KENDARI** : Jl. A. Yani 204 Kendari, Telp (0401) 390913, HP. 081320696320 a/n. S. Edi Nurrahman. **BUTON** : Jl. MH. Thamrin No. 32A, **AMBON** : BTN Kanawa Indah Blok C-3 No. 12 Air Kuning, Ds. Batumerah Kodya Ambon, Maluku 97128. Telp (0911)310427, **TIMIKA** : Jl. Pendidikan No. 10, Desa Kopa Kopa, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika/Timika, Irian Jaya, **KUPANG** : Jl. Trikora No. 16 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Air Mata, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang NTT 85000, **BELU** : Perum Ray Belu Permai A/9, Belu. Telp (0389)22408, **MATARAM** : Jl. R. Suprpto No. 37 Ampenan, Kodya Mataram 83000. Telp (0370)632331, **LOMBOK** : Jl. Pejanggih No. 66 Pancor. Lombok. Telp (0376)21718, **SUMBAWA** : Jl. Hasanuddin Gg. Teratai, Sumbawa. Telp (0371)21070, **BALI** : Jl. Buana Raya Gg. Buana Kerti No. 3 Pd.Sambian Denpasar Barat 80117. Telp (0361)485890, **MALAYSIA** : 32 Jalan Tengku Ampuan Zabedah 9/A, 40100 Shah Alam, Selangor. Telp (03)55137009, **NEW ZEALAND** : Ikhwan Triatmo. **JAWA BARAT** : Ade Wiharyana, Jl. Purnawarman No.5, Bandung - **TARAKAN** : S.L. Pohan, Jl. Gerecht Rt.17 No.59, Markoni, Tarakan - Kaltim 771211 - **PURWAKARTA** : Bernard Sihite, Kantor Perwakilan PWI, Jl. KK Singawinata No.23, Purwakarta, Tlp. (0264) 205081

Banyak yang Tidak Bermutu

Meski hampir 300 orang mendaftar sebagai calon ketua KPK, namun cuma sedikit nama yang kredibilitasnya bisa diperhitungkan.

Sejak dibentuk tahun 2003, KPK telah melewati dua periode masa kepemimpinan, pertama KPK di bawah Taufiequrachman Ruki sebagai Ketua KPK yang dilantik 16 Desember 2003, kemudian KPK di bawah kepemimpinan Antasari Azhar yang seharusnya menjabat untuk periode 2007-2011.

Sebagai lembaga yang baru muncul, KPK di bawah kepemimpinan Taufiequrachman Ruki mendapat respon positif dari seluruh lapisan masyarakat. Ketika itu KPK berhasil menghukum beberapa pejabat yang terbukti korupsi, seperti Gubernur Provinsi Aceh Abdullah Puteh, Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, dan mantan Kapolri Rusdihardjo. Walau KPK di bawah pimpinan Taufiequrachman Ruki yang cukup akrab dengan Presiden SBY ini dianggap masih tebang pilih, namun pada prinsipnya belum ada pihak yang berani melawan KPK secara berhadapan-hadapan.

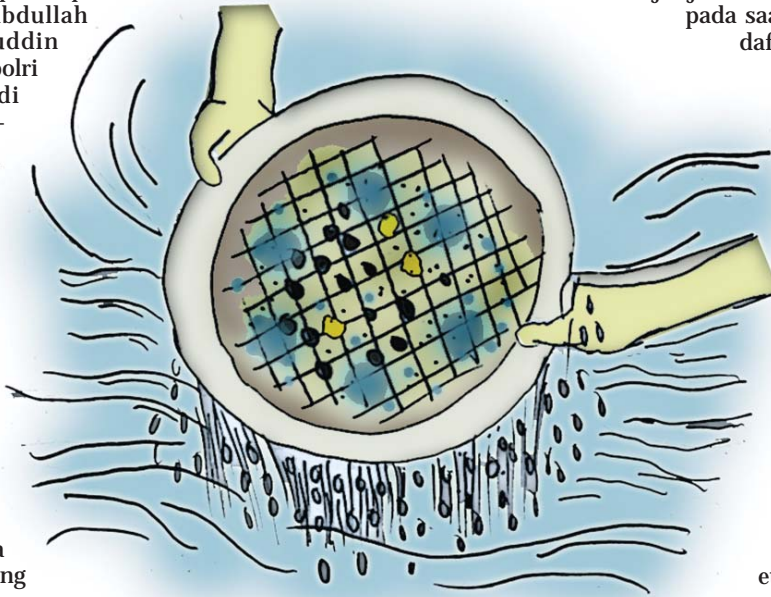
Ketika Antasari Azhar menjabat Ketua KPK, ia sempat mencuri perhatian publik setelah menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani, Al Amin Nur Nasution anggota DPR RI, dan mantan deputi senior Bank Indonesia yang juga besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Aulia Pohan.

Namun, entah karena gebrakannya itu, ketika masih separuh perjalanan memimpin KPK, Antasari tersandung dengan kasus pembunuhan. Ia diduga menjadi aktor intelektual di balik pembunuhan berencana Direktur PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen, 14 Maret 2009 di Modernland, Tangerang. Sejak saat itu, intensitas pelaksanaan tugas KPK pun semakin tidak optimal. Apalagi setelah Antasari ditetapkan sebagai tersangka 4 Mei 2009 lalu divonis hukuman penjara selama 18 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (11 Feb 2010), posisi KPK mulai goyah.

Di tengah kasus yang menimpa Antasari, dua pimpinan KPK lainnya, Bibit-Chandra juga menghadapi kasus hukum, yakni tuduhan terima suap dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini membuat

pimpinan KPK yang tadinya tinggal empat orang semakin kedodoran. Untuk melengkapi kekosongan pimpinan KPK tersebut, Presiden pun sempat mengisinya dengan memasukkan tiga orang yang diantaranya adalah mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007, Tumpak Hatorangan Panggabean yang kemudian menjadi pelaksana tugas Ketua KPK.

Namun karena Perpu pengangkatan Tumpak Hatorangan ditolak DPR, Tumpak pun kemudian ditarik keluar dari KPK. Dengan demikian, KPK kembali



hanya dihuni oleh empat pimpinan. Kinerja komisi ini pun terlihat semakin hari semakin menurun.

Untuk melengkapi kembali kepemimpinan KPK ini, pemerintah kemudian sejak 25 Mei hingga 14 Juni membuka seleksi pendaftaran pimpinan KPK yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Hingga akhir Juni 2010, proses pendaftaran ketua KPK masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Selain soal pendaftarannya yang lebih dari 286 orang - dibandingkan dengan jumlah pendaftar calon ketua Komisi Yudisial yang cuma 60-an orang - jejak rekam para pendaftar paling mendapat sorotan.

Pasalnya, banyak pendaftar dari kalangan pengacara yang pernah menjadi pem-

bela koruptor. Banyak kalangan kemudian berkhayal sambil mengelus dada, apa jadinya masa depan KPK kalau pemimpinnya adalah pengacara pembela koruptor.

Sorotan kemudian berpindah ketika Jimly Asshiddiqie dan Busyro Muqoddas menyatakan diri mendaftar sebagai ketua KPK. Publik dan panitia seleksi seperti mendapat angin segar karena mendapati ada calon yang kredibilitasnya bisa diperhitungkan.

Namun belakangan, masuknya Jimly Asshiddiqie dan Busyro Muqoddas itu menimbulkan kekecewaan karena mereka tidak sepenuhnya keluar dari jabatan lamanya. Jimly Asshiddiqie cuma mundur sementara dari Dewan Pertimbangan Presiden (21/6) dan Busyro Muqoddas berjanji mundur dari Komisi Yudisial pada saat yang tepat. "Saya mendaftar seleksi Komisi Pembre-

rantasan Korupsi semata-mata karena amanat sejumlah kalangan," kilahnya.

Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin di Jakarta berpendapat seharusnya mereka mundur dari jabatan lama pada saat mendaftarkan diri pada jabatan baru. Pakar politik Kacung Marijan bahkan berpendapat lebih keras, "Pencalonan mereka tanpa meninggalkan jabatannya saat ini menunjukkan mereka haus kekuasaan. Secara etika, seharusnya keduanya mundur."

Ia menilai, sikap Jimly dan Busyro seperti hukum ekonomi yang menimbang untung dan rugi. Sikap itu, kata dia, kurang mendidik masyarakat. "Orang menganggap mereka pragmatis, mau mendapatkan semuanya. Kalau tidak dapat ya masih pegang jabatan, kalau dapat ya jabatan lama ditinggalkan. Kalau mau serius memperbaiki KPK, harusnya sekalian saja mundur," tandas Kacung.

Keengganan dua tokoh tersebut melepaskan jabatan lamanya membuat publik curiga. Jimly dalam kapasitasnya sebagai anggota Wantimpres diduga merupakan titipan Presiden. Kecurigaan semacam itu wajar karena banyak kepentingan dalam proses pemilihan ketua KPK. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan para koruptor sekalipun punya kepentingan untuk bisa mengendalikan KPK. ■ BI

Panitia Seleksi Calon Ketua KPK

08/05 - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2010 tentang Panitia Seleksi (Pansel) Ketua KPK. Ketua Pansel dijabat oleh Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Pendaftaran secara resmi dibuka pada 25 Mei 2010. Dijelaskan Patrialis, panitia seleksi akan mencari dua calon pimpinan KPK yang nantinya akan dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diteruskan ke DPR, untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Patrialis optimis, panitia seleksi akan mampu menjaring pendaftar untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK. Selain memasang pengumuman terbuka di media massa, menurut Patrialis, panitia seleksi juga berwenang aktif mencari tokoh antikorupsi yang dianggap mampu untuk mendaftar dan mengikuti seleksi menjadi pimpinan KPK.

Presiden SBY Diminta Lakukan Tindakan Nyata

18/05 - Adnan Buyung Nasution saat menerima Petisi 50 Award di Jakarta mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus segera membuat tindakan nyata. Dalam setahun masa pemerintahannya, bangsa Indonesia hanya berputar-putar dari isu ke isu



02/06 - Puteri Indonesia 2010, Syifa Syafiningdyah Putrimbami Latif, melambaikan tangannya setelah ia berhasil dimahkotai. Sebanyak 33 provinsi turut ambil bagian dalam kontes ini.

tanpa ada kemajuan yang berarti. Seperti korupsi dan penindasan, belum bisa dituntaskan. Dalam setahun ter-

akhir ini, masalah hanya berputar pada kasus seperti kontroversi Susno Doadji, masalah cicak versus buaya, kasus Bank Century, kasus perpajakan terkait Gayus HP Tambunan, lalu kembali ke kasus Susno lagi.

Anggito Abimanyu Mundur Dari Kemenkeu

20/05 - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Anggito Abimanyu memutuskan mundur dari jabatannya. Anggito sebelumnya pernah digadang-gadang Presiden SBY menjadi wakil menteri (wamen) sejak enam bulan lalu, tapi gagal dilantik karena alasan administrasi. "Jadi begitu ada wamen yang definitif (Anny Ratnawati) ya sudah, saya punya pilihan sekarang. Pilihan saya adalah kembali ke UGM yang sebetulnya sudah merupakan keinginan sejak awal," tutur Anggito, usai serah terima Jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan Kamis (20/5). Di luar hal itu, Anggito sempat mengutarakan kekecewaannya atas isu yang mengaitkannya dengan partai tertentu. "Yang tidak senangnya adalah saya dikait-kaitkan dengan parpol. Itu sama sekali tidak benar, apakah itu dengan Golkar, apakah dengan PAN, itu sama sekali tidak ada. Itu yang membuat saya sedih. Itu fitnah," ujarnya.

Karikatur Berita



Susno Jadi Tersangka

25/05 - Mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus Pilkada Jabar. Kejagung pun telah memegang Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Polri. Susno diduga melakukan penyelewengan dana anggaran pengamanan pilkada Jabar sebesar 50% dari total anggaran Rp27 miliar digunakan untuk membeli mobil dinas serta keperluan lain. Tim pengacara Susno Duadji menyatakan, munculnya kasus korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat yang ditujukan kepada kliennya itu mengada-ada. Sebelumnya, jenderal bintang tiga itu telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PT Salmah Arowana Lestari di Riau. Susno yang kini mendekam di tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok dituduh telah menerima suap sebesar Rp500 juta berdasarkan keterangan dari Haposan Hutagalung selaku pengacara investor PT SAL dan Sjahril Djohan.

Rencana Membatasi BBM Diprotes

31/05 - Guna menekan beban subsidi BBM, pemerintah berencana membatasi pemakaian bahan bakar. Kebijakan tersebut rencananya akan diberlakukan bagi kendaraan roda dua. Hal tersebut terungkap dalam pembahasan pembatasan pemakaian BBM subsidi di KemenESDM. Dalam pembahasan itu, muncul sejumlah opsi termasuk membatasi pemakaian premium sepeda mo-

tor, melarang kendaraan yang diproduksi pada tahun-tahun tertentu dan semua kendaraan sedan untuk memakai BBM bersubsidi, serta opsi hanya kendaraan berpelat kuning saja yang diperbolehkan membeli BBM bersubsidi. Menanggapi rencana tersebut, berbagai penolakan langsung mengalir dari berbagai pihak, termasuk dari anggota dewan. Pendapat umumnya mengatakan bahwa pemerintah harus memikirkan dampak dari rencana tersebut karena menurut mereka, pengguna sepeda motor seharusnya justru mendapatkan subsidi dari pemerintah guna menjaga pertumbuhan ekonomi. Sementara Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, wacana pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu belum dapat diputuskan karena masih dalam kajian.

SBY-Mega Berjabat Tangan

01/06 - Kehadiran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Kompleks Parlemen, yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disambut baik oleh sejumlah kalangan. Mantan ketua DPR, Akbar Tandjung, mengaku senang melihat kehadiran Megawati dan jabat tangan antara SBY dan Megawati. Termasuk ada pernyataan salam hormat untuk Megawati dalam pidato SBY. Hal ini penting untuk pembelajaran politik untuk rakyat. Megawati sendiri mengatakan, kedatangannya ke MPR punya



10/06 - Buku berjudul 'Obama dari Asisi' yang ditulis oleh Damien Dematra diluncurkan. Penulis mengatakan, ia terinspirasi untuk menulis buku itu setelah membaca berbagai cerita yang diambil dari para guru, teman dan tetangga Obama saat Obama tinggal di Indonesia antara 1967-1970. Asisi adalah sekolah Katolik di Jakarta tempat Obama menimba ilmu (1968-1970)

alasan kuat. Dikatakan Mega, Kongres PDIP ketiga menegaskan Pancasila 1 Juni sebagai landasan ideologi PDIP.

Karikatur Berita



Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengatakan, kehadiran Megawati bukan bagian rekonsiliasi antara Megawati dan SBY. "Kami tidak mengatakan ini sebagai rekonsiliasi, tapi demi kebaikan negara, tentu saja Ibu Mega mendukung," kata putri Megawati tersebut.

Relawan Gaza Tiba di Tanah Air

07/06 - Lima relawan Komite Indonesia Solidaritas untuk Palestina, juga termasuk di antaranya seorang jurnalis TV One, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Mereka adalah Ferry Nur, Muhendri Muchtar, Hardjito Warno, Okvianto Baharudin, dan jurnalis Muhammad Yasin. Mereka disambut Dirjen Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teguh Wardoyo, mantan Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Ketua Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR sekaligus Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen Sidarto Danusubroto. Mereka adalah korban insiden berdarah penyerangan kapal Mavi Marmara oleh pasukan Israel di laut Mediterania yang sedang membawa bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza.

Penerima Adipura Meningkat 11 Persen

08/06 - Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan

penghargaan Kalpataru kepada 12 orang. Selain Kalpataru, juga diberikan penghargaan Adipura untuk kota dengan predikat terbersih. Tahun ini, penerima Adipura meningkat 11 persen. Pada tahun 2009, penerima Adipura adalah 126 kota, sedangkan pada 2010 menjadi 140 kota. Beberapa kota yang menerima Adipura untuk kategori kota metropolitan adalah Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Surabaya, Tangerang, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Bekasi. Sementara untuk kota besar yakni Malang, Pekanbaru, Yogyakarta, dan Balikpapan.

Biaya Politik Makin Mahal

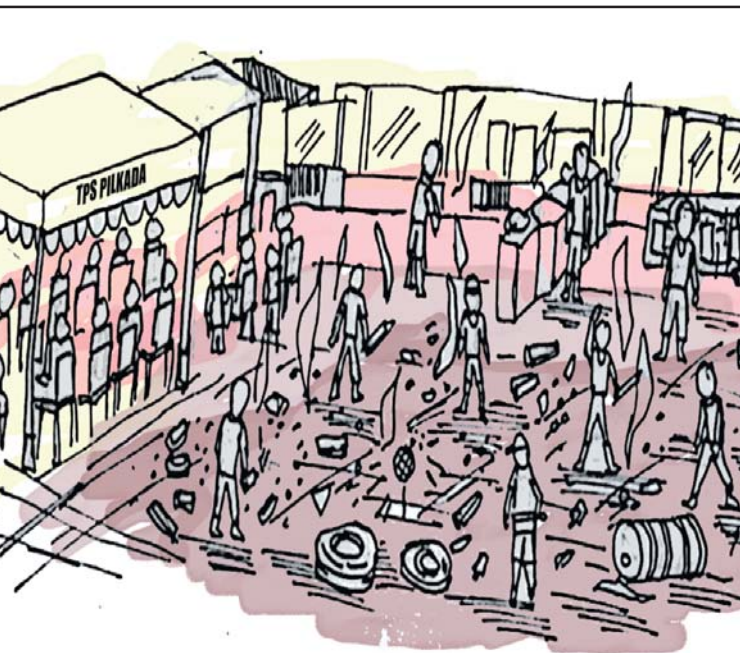
14/06 - Politik pencitraan lewat jasa konsultasi politik seolah menjadi kebutuhan jika ingin memenangkan sebuah pemilu atau pemilihan ketua partai. Sehingga biaya politik yang dikeluarkan juga semakin tinggi karena harus membayar jasa lembaga survei dan konsultan politik. Ongkos untuk memakai jasa konsultan bervariasi. Untuk identifikasi awal tingkat keterampilan dan keterpilihan saja, seorang kandidat untuk pemilu kepala daerah kabupaten/kota di Jawa, biayanya bisa berkisar Rp 100 juta-Rp 150 juta. Nilai ini bisa naik tergantung pada jumlah responden yang ingin diambil, besaran ambang batas kesalahannya (margin error), tergantung luas dan kondisi geografisnya. Untuk kabupaten/kota di luar Jawa, biaya itu bisa membengkak hingga dua sampai tiga kali lipat karena terbatasnya akses

transportasi. Harga itu akan lebih mahal lagi untuk seorang kandidat peserta pemilu gubernur bisa hingga Rp 40 miliar.

DPR Setujui TDL Naik

15/06 - Rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM Darwin Saleh akhirnya menyetujui usulan pemerintah melaksanakan distribusi subsidi listrik Rp 55,1 triliun dengan kondisi pelanggan 450-900 VA tidak mengalami kenaikan. Dengan opsi tersebut, pelanggan selain 450-900 VA akan mengalami kenaikan antara 6 dan 20 persen. Ketua Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan, pertimbangan DPR adalah pelanggan 450-900 VA, baik golongan rumah tangga, bisnis, sosial, industri, maupun pemerintah merupakan pelanggan kecil yang berdaya beli rendah sehingga perlu dilindungi.

Pada raker tersebut, DPR menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan TDL bagi pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300-5.500 VA sebesar 18 persen, pelanggan sosial 1.300 sampai di atas 200.000 VA sebesar 10 persen, pelanggan bisnis 1.300-5.500 VA sebesar 16 persen, dan bisnis di atas 200 kVA 12 persen. Adapun pelanggan industri dengan daya 1.300-2.200 VA disetujui naik enam persen, industri antara 2.200-200.000 VA sembilan persen, industri di atas 200.000 VA 15 persen, pelanggan pemerintah antara 1.300 dan 5.500 VA 15 persen, dan pemerintah di atas 200.000 VA 18 persen.



Feodalisme Hambat Pembe

Kultur feodalisme yang masih kuat menghambat upaya pemberantasan korupsi dan demokratisasi serta melemahkan peran lembaga-lembaga independen.

Penegakan hukum dan demokrasi merupakan pilar pemberantasan korupsi dalam satu negara. Tanpa dua pilar itu, niscaya pemberantasan korupsi sulit dilakukan. Kelemahan dua pilar tersebut dipantikan akan menghambat upaya pemberantasan korupsi, bahkan menyuburkan tindakan korupsi. Hal tersebut nyata sekali di Indonesia yang menyandang predikat sebagai salah satu negara terkorup di Asia bahkan di dunia.

Sejauh ini, penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari memuaskan bahkan terkesan sudah *hopeless*. Indikasinya, pengadilan yang independen belum tegak di negara yang secara formal disebut negara hukum ini. Kekuasaan kehakiman belum benar-benar terbebas dari pengaruh luar. Apalagi, dua unsur penegak hukum lainnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan berada dalam struktur pemerintahan di bawah kekuasaan Presiden, sehingga sangat rentan tunduk pada kepentingan politik praktis penguasa.

Sementara dalam hal demokrasi, Indonesia memang disebut-sebut sebagai negara besar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Namun, dalam pelaksanaan pemilu predikat itu masih semu, maupun dalam kehidupan sehari-hari, penjiwaan demokrasi masih dalam proses elementri.

Kelemahan itu terjadi karena masih melekatnya kultur feodalisme di tengah kehidupan masyarakat bangsa ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD juga tidak menafikan adanya kendala pemberantasan korupsi karena sistem feodalisme. Menurutnya, feodalisme yang merupakan warisan telah menghambat pemberantasan korupsi, terutama birokrasi di Indonesia. Selain itu, dia menyebutkan, ketika melakukan reformasi, tidak melakukan perubahan dengan tatanan birokrasi. "Sehingga saat ini ada upaya kalau ingin membersihkan korupsi selalu diblokade oleh birokrasi itu sendiri," ujarnya kepada pers beberapa waktu lalu.

Tanda-tanda masih melekatnya kultur feodalisme itu masih mewarnai jalannya pemerintahan mulai dari jajaran pejabat kecil sampai ke jenjang lebih tinggi. Bahkan kultur feodalisme itu telah pula merasuk dalam kehidupan keseharian

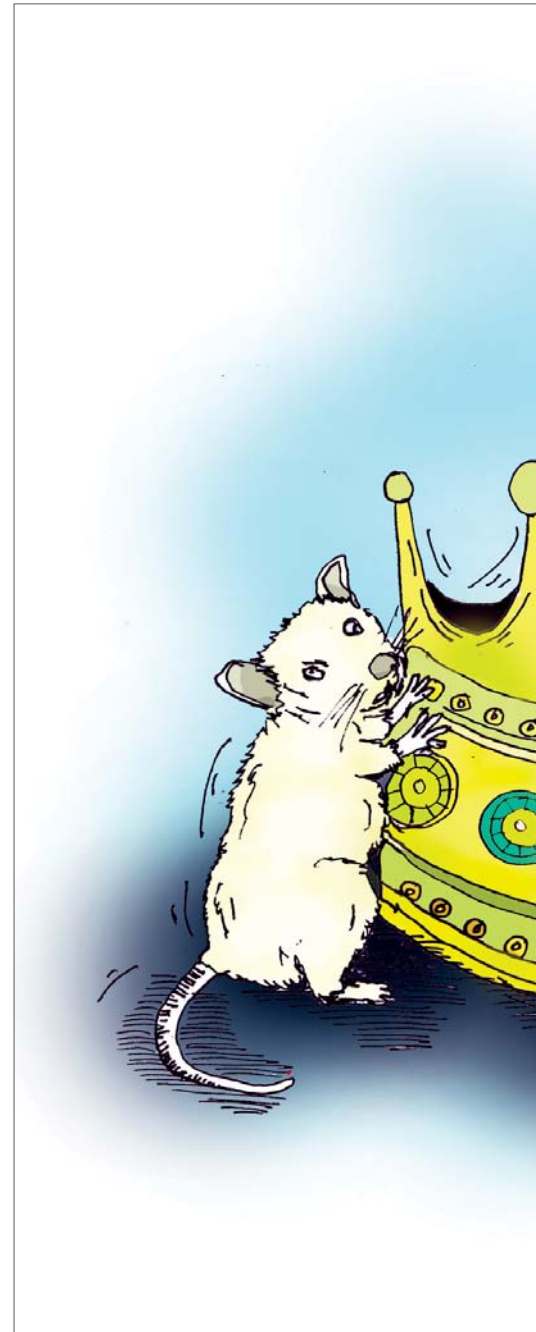
masyarakat. Tidak terbatas lagi hanya pada kaum bangsawan atau penguasa. Sebagian warga masyarakat pun sudah merasa harus lebih diagungkan atau diistimewakan dari warga yang lain, bahkan bila perlu main hakim sendiri untuk melampiaskan hasratnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Depdiknas (2008), feodalisme berarti 1) sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan; atau 2) sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat, bukan prestasi kerja.

Dalam konteks feodalisme menghambat pemberantasan korupsi, sangat terasa di Indonesia. Tabiat sebagian pejabat masih melekat merasa berhak untuk dihormati tinggi-tinggi dan diagung-agungkan, serta ucapannya harus didengar dan keinginannya harus dituruti. Mereka kurang menonjolkan fungsinya sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Juga sering kali tidak terlihat sungkan membuat kebijakan berkedok kepentingan umum, tapi sesungguhnya sarat dengan kepentingan penguasa atau sekelompok orang saja.

Diakui atau tidak, di jajaran birokrasi kultur feodal itu masih amat terasa. Dalam sistem birokrasi, prestasi kerja sering kali tidak menjadi alat ukur bagi seseorang apakah layak memegang jabatan tertentu atau tidak. Bahkan anehnya, di kalangan bawahan sendiri pun ada satu kebiasaan yang merasa berkewajiban untuk menuruti semua keinginan penguasa atau atasannya dengan sepatuh-patuhnya, walaupun hal itu tidak sesuai dengan aturan dan hati nuraninya. Bahkan pemberian 'upeti' dari bawahan kepada atasan masih juga melekat. Begitu pula kebiasaan di tengah masyarakat yang merasa berkewajiban memberikan 'upeti' atas pelayanan pejabat birokrasi, walaupun pelayanan itu sesungguhnya adalah haknya.

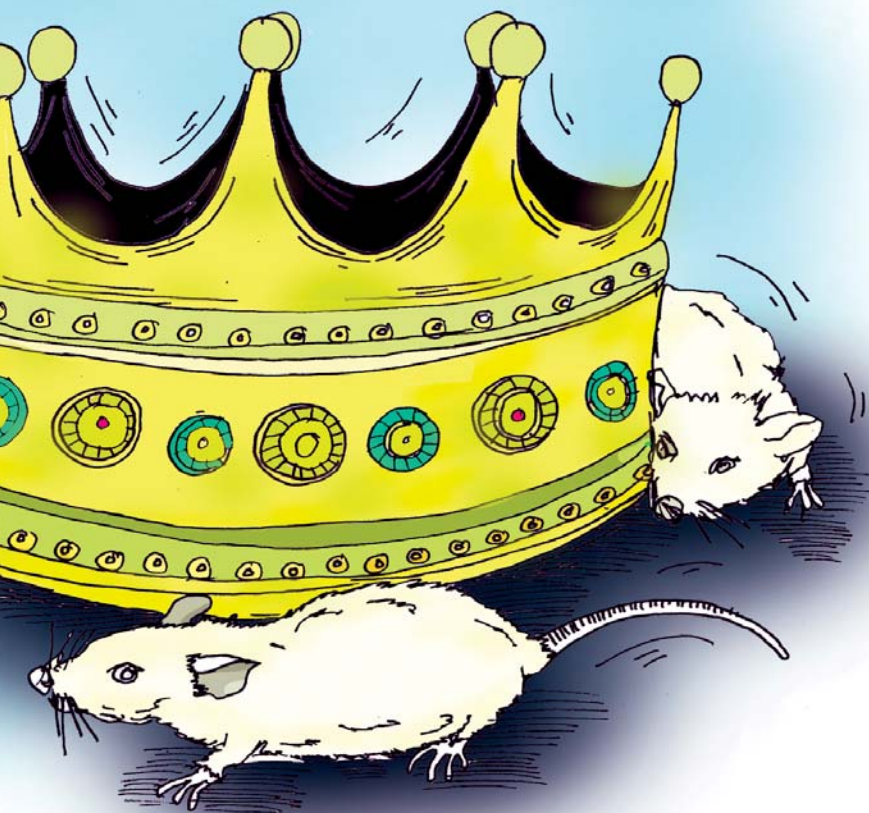
Dalam kebiasaan feodal pemberian upeti ini pulalah kemudian diyakini praktik korupsi tumbuh subur di kalangan pejabat negara. Tidak heran jika semua pejabat, mulai dari pejabat tinggi sampai yang terendah merasa berhak menerima imbalan atas apa yang telah atau hendak diperbuatnya, walaupun itu sesungguhnya merupakan tugas kewajibannya



sebagai abdi masyarakat. Diakui atau tidak, hal ini menunjukkan budaya feodalisme masih melekat dalam hubungan atasan dan bawahan serta hubungan penguasa dengan masyarakat.

Sikap feodalisme itu telah menjadi bagian dari suatu sistem. Dalam sistem ini pula makelar kasus dapat leluasa bergerak. Dalam proses peradilan, misalnya, sudah menjadi rahasia umum, pena-

rantasan Korupsi



nganan suatu perkara mulai dari proses awal hingga ke pengadilan, makelar telah menyatu dalam sistem. Diyakini, kasus pegawai pajak Gayus Tambunan, terkuak hanyalah karena apes, akibat Susno merasa dijalmi. Kasus serupa, bahkan lebih besar, mungkin masih banyak. Seperti diakui Gayus sendiri, bahwa dia hanyalah kelas teri.

Selain untuk memperkaya diri atau

kelompoknya (korupsi), gaya feodalisme juga berpotensi dipraktikkan penguasa untuk mempertahankan kekuasaan, bahkan untuk mempertahankan kehormatan setelah tidak berkuasa lagi nantinya. Bukankah telah menjadi kekuatiran publik, bahwa untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, adanya pihak-pihak memanfaatkan kekuasaan atau pengaruhnya mengatur lembaga in-

dependen penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini tidak hanya terjadi pada Pemilu di era Orde Baru. Indikasi itu banyak juga dicurigai terjadi ketika ditemukan kesemrautan daftar pemilih tetap pada penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu, misalnya. Kesemrautan itu dicurigai akibat adanya upaya rekayasa untuk memenangkan pemilu sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan. Memang, secara juridis formal, hasil Pemilu telah 'disahkan' oleh Mahkamah Konstitusi, walaupun sekaligus MK menegaskan bahwa penyelenggara Pemilu kurang profesional. Belakangan, kecurigaan atas kurang independennya KPU makin mencuat dengan masuknya anggota KPU Andi Nurpati dalam jajaran pengurus Partai Demokrat (2010-2015), yang diduga sebagai balas jasa. Sama halnya, se usai Pemilu 2004, dengan masuknya Anas Urbaningrum ke Partai Demokrat dan diangkatnya Hamid Awaluddin jadi Menteri Hukum dan HAM (keduanya mantan Anggota KPU Pemilu 2004).

Di samping faktor masih kentalnya tabiat feodal, paling menyedihkan lagi, jika dalam penegakan hukum, politik telah menjadi panglima. Banyak sekali indikasi yang mengarah pada hal ini.

Semakin menyedihkan lagi, jika dalam penegakan hukum, tabiat feodal dan politik telah merusak independensi seorang hakim. Apalagi dalam kondisi ini, tanpa diminta pun, seorang hakim bisa mungkin tidak akan berani memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan penguasa. Selain karena tabiat feodal itu juga telah merasuki hati sang hakim, mereka juga telah takut sebelumnya sehingga tanpa ada perintah mereka telah menyesuaikan diri dengan hasrat penguasa atau kelompok elit. Sudah duluan takut posisi atau jabatannya dicopot.

Sumber *Berita Indonesia*, seorang guru besar hukum pidana yang tanpa disadarinya juga 'ketakutan' sehingga merasa tidak perlu namanya disebut, mengatakan di tengah arus reformasi dan 'demokratisasi' yang kini bergulir, sangat menyedihkan jika seorang pejabat tinggi di lembaga peradilan harus menuruti keinginan eksekutif tentang penegakan hukum. Sang Profesor mengaku mendapat informasi terpercaya bagaimana pihak eksekutif berperan dalam kasus yang menimpa pimpinan KPK, Antasari serta Bibit dan Chandra. Disebut pihak kejaksanaan harus menuruti 'tarian' eksekutif. Walaupun hal ini secara formal berulang kali dibantah pihak eksekutif, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurut Sang Profesor, semua itu berpangkal pada masih kentalnya tabiat atau pengaruh feodal dalam bingkai demokrasi.



Presiden SBY menerima Kapolri Bambang Hendarso Danuri di ruang kerjanya.

Mengenai feodalisme ini, para pengamat juga banyak yang mengakui bahwa kultur itu memang masih kuat di Indonesia. Di tengah modernisasi yang terjadi di Indonesia, pola pikir sebagian bangsa ini disebut belum mengglobal. Penyelenggara negara atau presiden pun masih seperti raja dan menteri-menteri sebagai patihnya. Bahkan gubernur, bupati dan walikota, camat dan lurah, masih banyak berlagak raja-raja kecil.

Begitu merasuknya pengaruh kultur feodalisme, yang kelahirannya di Indonesia bersumber dari sistem kerajaan dahulu dan semakin terpatri oleh pengaruh kolonialisme yang ratusan tahun berkuasa di negeri ini. Pengaruh feodalisme dan kolonialisme itu lebih terasa di Jawa, yang lebih 350 tahun terjajah.

Pengaruhnya masih melekat, sehingga tidak heran bila beberapa lembaga yang sengaja dibentuk bersifat independen seperti KPK, KPU, PPATK dan Bank Indonesia, bahkan MA dan lain-lain, terasa tidak berdaya untuk mempertahankan independensinya.

Kentalnya kultur feodal ini juga dapat dilihat dari bebalnya sebagian aparaturnegara dalam hal perilaku koruptif yang

justru dirasakan makin canggih sekarang ini. Walau sudah ada koleganya yang telah dipidana karena korupsi, tapi ternyata tidak membuat pejabat lainnya takut melakukan korupsi. Sebab, yang tertangkap itu dianggap apes saja. Mereka tahu, tindak korupsi masih terus merajalela hingga saat ini, mulai dari lembaga pemerintahan tertinggi hingga terendah. Belum ada pintu lembaga pemerintah yang terbebas dari bau busuk korupsi, walaupun pidato antikorupsi terus dipidatokan melalui layar televisi dengan mimik dan bahasa yang meyakinkan.

Mari Belajar ke Negeri China

Melihat persolan demikian, kiranya kata bijak yang berbunyi "Tuntutlah ilmu sampai ke negeri China" mungkin berlaku juga dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Artinya, pembelajaran dalam hal pemberantasan korupsi yang pernah dilakukan di China perlu dicontoh oleh bangsa ini. Sebab di negeri China, dalam sejarahnya, Perdana Menteri Zhu Rongji pernah menyiapkan 100 peti mati untuk pelaku korupsi, yang salah satunya adalah untuk dirinya sendiri jika terbukti melakukan korupsi. Sisanya, 99 peti mati

lagi disiapkan untuk para koruptor di negeri berpenduduk terbesar di dunia itu. Pernyataan yang sangat menggegerkan ini disampaikan Rongji sewaktu mengucap-kan sumpah jabatan, Maret 1998.

Kebijakan Presiden China saat itu, Jiang Zemin, bahkan jauh lebih menggegerkan lagi. Ketika itu, dihukum mati semua pelaku tindak pidana korupsi di negeri tirai bambu itu. Salah satu, hukuman mati dikenakan pada mantan Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Changqing pada Maret 2000 karena menerima suap sebesar US \$ 660.000 atau sekitar Rp.6 milyar. Kemudian, Deputy Walikota Leshan, Li Yushu juga dijatuhi hukuman yang sama 16 Januari 2002 karena terbukti menerima suap US \$ 1 juta, dua mobil mewah, dan sebuah jam tangan Rolex.

Membandingkan dengan Indonesia, dalam pengamatan *Berita Indonesia*, komitmen perang melawan korupsi tampaknya justru masih sebatas pemanis bibir saja, seolah-olah. Satu-dua memang ditangkap, untuk menunjukkan pemberantasan korupsi telah dilakukan. Tapi yang lainnya masih leluasa. Maka di kalangan pejabat, yang tertangkap itu



PENGHORMATAN: Sopan santun berlebihan bisa disalahartikan sebagai bibit feodalisme.

dianggap apes saja atau karena dia tidak satu aliran atau 'geng' yang berbeda kepentingan (terutama politik).

Dalam pidato resmi dan berbagai kesempatan lainnya, penguasa dan para aparat penegak hukum memang sangat rajin mengatakan mendukung upaya pemberantasan korupsi, namun hal itu belum berlaku untuk diri sendiri dan kelompok atau anak buahnya. Dugaan yang telah menjadi rahasia umum ini semakin mencuat tatkala Wakil Presiden Boediono (saat menjabat Gubernur BI) dan mantan Menteri Keuangan Sri Muliyani diduga melakukan tindakan korupsi dalam kasus *bailout* Bank Century. Ketika dugaan itu mulai berhembus dari KPK, digulirkan ke BPK dan 'dpanuskan' di DPR dengan kesimpulan akhir adanya indikasi kuat terjadinya korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya mati-matian membela kedua anak buahnya itu dengan mengatakan bahwa kebijakan mereka itu sudah benar. Bahkan belakangan, KPK sendiri telah mengikuti jejak Presiden dalam hal *bailout* Bank Century, belum menemukan bukti korupsi. Padahal, KPK-lah yang pertama kali menyebut adanya indikasi korupsi dalam *bailout* Bank Century tersebut dan meminta BPK untuk mengaudit.

Dalam hal komitmen pemerintah untuk pemberantasan korupsi, sumber *Berita Indonesia* seorang guru besar hukum pidana juga menilai, Pemerintah Indonesia belum sepenuhnya mendorong pemberantasan korupsi. Menurutnya, kelihatannya yang penting bagi pemerintah hanya agar dunia internasional melihat Indonesia sebagai negara yang antikorupsi dan punya integritas. Tapi di dalam negeri sendiri, ruang gerak penegak

hukum, termasuk Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu diusahakan dibatasi. Terutama jika penyelenggara negara yang sedang berkuasa sendiri yang tersangkut.

"Dilihat dari sisi intelektualitas, ada pengaruh feodalisme yang belum lepas di dalam kerangka sistem politik kita," kata Sang Profesor yang juga pernah menjadi aktivis anti korupsi yang meminta namanya tidak disebut itu. "Mana boleh kaum feodal diganggu gugat. Feodalisme kita masih kuat. Memang Indonesia sudah modern, tapi pola pikirnya (*mindset*) masih lokal, tidak internasional. Penyelenggara negara atau presiden masih seperti raja dan menteri-menteri patihnya. Zaman dulu, mana ada keluarga raja ditahan. Anak haram saja harus diakui. Kultur itulah yang menghambat KPK tidak bisa lebih agresif," kata Sang Profesor.

Secara khusus menyoroti KPK, dia mengatakan secara internal KPK di bawah kepemimpinan Antasari Azhar sebenarnya sudah bagus. Tetapi pemerintah sendiri tampaknya berusaha (setidaknya membiarkan) melemahkannya dengan menciptakan stigma "kriminalisasi" pada para pimpinan KPK. Walaupun belum ada bukti formal keterlibatan otoritas pemerintah dalam kasus pelemahan KPK ini. Namun, publik telah mulai merasakan.

Jika diamati lebih cermat, KPK juga coba dilemahkan dengan membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) Tipikor dan RUU Pengadilan Tipikor, membuat orang makin curiga. Dan yang paling nyata adalah upaya membatasi wewenang KPK melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyadapan. Di situ semula direncanakan, bahwa untuk melakukan penyadapan, KPK harus lebih

dulu meminta izin dari pengadilan.

Sumber *Berita Indonesia* menilai, para anggota DPR dan pimpinan partai politik juga sama. Mereka membuat undang-undangnya, tetapi begitu diberlakukan, mereka yang ternyata berbuat salah tidak mau dijerat oleh UU yang mereka buat sendiri. Mereka menuntut keistimewaan. Dengan demikian, KPK tidak hanya mendapat tekanan dari penguasa, tetapi juga dari para politisi bahkan pengusaha dan makelar kasus yang dekat dengan penguasa. Bayangkan, kata Sang Profesor, pernah suatu ketika seorang pengusaha yang sedang buron karena kasus korupsi, mengadakan hajatan di Singapura, justru dihadiri banyak pejabat negara dari Indonesia.

Dikatakannya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebenarnya pada awalnya sudah meragukan komitmen Indonesia memberantas korupsi. "Omong kosong pemberantasan korupsi bisa jalan jika tidak ada komitmen politik dari pemerintah," katanya mengutip pernyataan seorang pejabat PBB beberapa waktu lalu. Pernyataan itu belakangan memang terbukti. Begitu komitmen politik pemerintah lemah seperti sekarang, KPK-pun goyah. Jadi, menurutnya, bahkan pemerintah secara langsung atau tidak langsung punya andil dalam upaya pemandulan KPK sekaligus melemahkan pemberantasan korupsi.

Ironisnya, sebagian anggota DPR juga mendukung pemerintah yang merasa keberatan dengan cara KPK menangani kasus. Menurut guru besar itu, target mereka diduga adalah melemahkan bahkan membubarkan KPK. Tetapi niat itu diduga belum mereka realisasikan lebih jauh karena masih memperhitungkan

reaksi masyarakat.

Selain itu, sumber *Berita Indonesia* tersebut dan beberapa pemerhati hukum lainnya juga menduga pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum adalah untuk 'mengimbangi' gerakan KPK. "Denny Indrayana, PhD dari Satgas Mafia Hukum misalnya, sepertinya merasa lebih *powerful* ketimbang Kapolri dan Jaksa Agung. Ini jelas aneh dan anomali hukum," demikian misalnya kata Nehemia Lawalata, Rabu (21/4/10) sebagaimana dikutip *inilah.com*. Sumber *Berita Indonesia* menimpali, bahkan Denny Indrayana bisa memimpin rapat pemberantasan korupsi yang dihadiri Kapolri dan Jaksa Agung. Aneh!

Satgas juga diduga dibentuk untuk mengalihkan perhatian masyarakat agar tidak lagi mempercayai KPK. Dasar disebut demikian, laporan masyarakat tentang berbagai dugaan kasus korupsi banyak masuk ke Satgas. Alhasil, pekerjaan KPK pun banyak bergeser ke Satgas.

Melihat kejanggalan ini, sumber *Berita Indonesia* tersebut menduga, langkah itu sebagai sebuah antisipasi pemerintah jika suatu waktu KPK dibubarkan. Artinya, anggota Satgas yang notabene orang-orangnya presiden kemungkinan akan masuk jadi anggota KPK yang baru jika KPK sekarang sudah bubar. Jadi, anggota Satgas hanya ganti baju jadi KPK.

Perubahan sikap Presiden SBY sendiri terhadap KPK diduga terjadi sejak besannya (Aulia Pohan) dijerat KPK. Padahal, baik mantan Presiden Megawati maupun Presiden SBY mengamini bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari Istana.

Sedangkan khusus kepada mantan Ketua KPK Antasari Azhar, sikap antipati pemerintah menurut sang profesor, diduga karena Antasari tidak mau tunduk kepada keinginan pemerintah. Indikasinya, Antasari disebut-sebut pernah berkali-kali 'dipanggil' ke Istana Presiden tetapi Antasari tidak bersedia. Dan lebih khusus lagi, Antasari juga disebut-sebut berniat menyelidiki kasus dugaan korupsi di KPU terkait teknologi informasi pada Pemilu 2009 lalu.

Di sinilah tampak perilaku feodal yang masih bercokol, sejak zaman feodal, Orde Baru hingga era reformasi saat ini. Sejak reformasi bergulir, mereka bolehkan KPK punya wewenang independen, tetapi jangan dipraktekkan pada pihaknya.

Saat ini, seleksi calon Ketua KPK pengganti Antasari dilakukan. Ketua panitia sendiri dipimpin oleh Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar. Dalam hal ini, banyak juga yang mengkhawatirkan pengaruh tabiat feodal akan dipakai sehingga arah KPK makin kurang jelas ke depan. Namun kekuatiran ini, memang, bisa berlebihan bila memperhatikan pi-

dato-pidato Presiden SBY tentang demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Namun, bila memerhatikan persoalan penegakan hukum dan demokrasi, kiranya yang diperlukan sekarang ini adalah kontrol dari masyarakat. Dalam penegakan hukum, kontrol masyarakat dibutuhkan sejak tindakan hukum pertama. Peradilan pun harus dikontrol agar betul-betul bersih dari pengaruh luar. Artinya, peradilan yang menjadi benteng penegakan hukum harus dikontrol masyarakat sejak penyelidikan kepolisian sampai ke Mahkamah Agung, termasuk penentuan personalianya.

Mengingat lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dirasakan paling riskan dipengaruhi kultur feodalisme karena langsung di bawah kendali presiden, maka pengawasan masyarakat dan LSM harus ekstra ketat terhadap dua lembaga tersebut. Memang ada juga kekhawatiran bahwa sebagian LSM juga bisa dibayar, yang mau bergerak jika dibayar, dan tidak mau bergerak kalau penguasa bilang tidak boleh. Namun LSM demikian hanyalah sebagian kecil. Seperti menurut dugaan sumber *Berita Indonesia* di atas misalnya, ada sebuah LSM anti korupsi yang terkemuka yang tidak pernah mau ribut jika menyangkut sektor Migas dan Bank Century. Hal tersebut dicurigai karena LSM tersebut punya hubungan baik dengan penguasa di bidang Migas sejak zaman Pak Harto serta dengan kekuatan di balik pengambilan kebijakan *bailout* Bank Century.

Bahkan dengan masuknya nama Tondung Mulya Lubis dalam struktur pengurus Partai Demokrat, telah mengundang kecurigaan dan menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap Transparency International Indonesia (TII). Seperti halnya dengan Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dimana Presiden SBY, Sri Mulyani, Boediono, dan Kuntoro Mangkusubroto sebagai Dewan Pendiri dan Dewan Penyantun. Bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkadang sudah amat diplomatis terhadap kasus tertentu.

Perkuat Pengadilan

Maka salah satu solusi untuk penegakan hukum, pengadilan harus diperkuat. Sebagai negara hukum, maka yang menentukan penegakan hukum adalah hakim di dalam pengadilan, bukan yang lain. Andaikan polisi, jaksa, pengacara dan LSM Antikorupsi berkolusi pun, kalau hakimnya teguh, maka keadilan masih bisa tegak.

Mengenai peran peradilan ini, Gubernur Lemhanas Prof. Dr. Muladi, SH kepada *Berita Indonesia*, Selasa 23 Maret 2010 lalu, mengatakan bahwa independensi peradilan itu adalah aturan



internasional. Kekuasaan kehakiman yang merdeka itu standar internasional yang ditentukan PBB. Dan independensi hakim itu adalah salah satu indikator apakah suatu negara itu demokratis atau tidak. Kemudian diperluas, bukan hanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi independensi sistem peradilan pidana. Termasuk polisi, jaksa dan sebagainya.

Selain itu, menurut Profesor Dr. Romli Atmasasmita, SH, LLM, Mahkamah Agung sampai jajaran terbawah juga harus dijaga. Sarana, gaji dan fasilitas peradilan harus ditingkatkan. Dalam sistem peradilan, hadiah dan hukuman (*reward and punishment*) harus jelas. Hadiah seharusnya lebih besar dari hukuman. Disebutkan, barangkali tidak rugi menggaji Ketua MA Rp 100 juta sebulan, Hakim Agung Rp 75 sebulan, Ketua Pengadilan Tinggi Rp 50 juta sebulan, Ketua Pengadilan Negeri Rp 40 juta sebulan dan hakim Rp 25 juta sebulan.



Presiden SBY menerima Jaksa Agung Hendarman Supandji di istana presiden.

Langkah ini menurutnya seharusnya diambil jika menginginkan peradilan tetap independen. Jika dikabulkan memang menimbulkan kontradiksi. Tetapi kalau tidak dikabulkan, sulit diharapkan hakim bisa independen, yang memberi keadilan untuk semua orang tanpa pilih kasih dan tidak cacat hukum.

Salah satu hal yang penting lainnya adalah Komisi Yudisial (KY). Komisi ini juga harus diperkuat. KY sendiri pun diharapkan jangan hanya menunggu laporan baru mau bergerak. Tapi hendaknya aktif memantau jalannya peradilan, jempot bola.

Sementara itu, tentang kepedulian pemerintah terhadap pembangunan hukum, pemimpin Indonesia selama ini tampaknya belum menunjukkan kepedulian terhadap pembangunan hukum ini. Sejak Orde Baru sampai sekarang, anggaran hukum dan perundang-undangan sangat kecil jika dibandingkan dengan anggaran

pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung. Kalau mau konsisten, anggaran untuk bidang hukum seharusnya lebih besar setengahnya dari yang sekarang. Sekarang, jaksa dan polisi sulit untuk bisa lurus karena anggaran satu perkara hanya Rp 2,5 juta. Maka tidak mengherankan jika ada polisi atau jaksa meminta pengacara untuk membayar makan siang, biaya ketik, hingga minta dibelikan *laptop* (komputer jinjing).

Itulah berbagai kelemahan penegakan hukum dan demokrasi yang masih terjadi di Indonesia sekarang ini yang keseluruhannya tidak lepas dari pengaruh kultur feodalisme seperti disebut di atas.

Optimisme ke Depan

Namun demikian, optimisme tetap ada ke depan. Seperti dikatakan Prof. Dr. Muladi, SH, supremasi hukum Indonesia memang sejauh ini masih belum memuaskan, tapi sudah berada dalam jalur yang

benar. Pengadilan yang harus bebas dari pengaruh apa pun juga sedang berproses ke arah yang lebih baik.

Di bidang demokrasi, sekarang juga menurutnya sedang dikembangkan demokrasi konsensus, yakni demokrasi yang universal tetapi didukung oleh budaya bangsa. Demokrasi konsensus ini, menurutnya, dalam tahap konsolidasi. Yakni, diperbaiki sambil berjalan. Menurutnya, struktur demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah bagus. Substansi undang-undangnya juga sudah bagus. Tapi, kulturnya yang perlu ditingkatkan. Dan itu juga sedang dalam proses.

Kembali mengenai penegakan hukum secara independen yang tidak di bawah kooptasi politik dan kekuasaan, Dr. Muladi menjelaskan, penegakan supremasi hukum itu intinya ada empat yakni: Pertama, aparat negara harus tunduk pada hukum yang berlaku untuk memberi contoh; Kedua, keberadaan suatu sistem peradilan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka dan profesional. Tidak boleh didikte oleh siapa pun juga, atau tidak ada politisasi; Ketiga, jalan masuk untuk memperoleh keadilan harus terbuka luas bagi rakyat yang menjadi korban atau tersangka, atau yang bermasalah. Dia tidak boleh dihambat dan selalu didampingi pengacara untuk mencari keadilan yang benar; Keempat, hukum itu harus ditegakkan secara adil, ekual, sama rata dan pasti. Menurut Muladi hal itu juga sedang dalam proses di Indonesia. Khusus dalam pemberantasan korupsi, Muladi memberi saran agar antar Kepolisian, Kejaksaan dan KPK harus ada keterpaduan. Mereka harus saling mengisi bukan bersaing.

Saran Muladi tersebut memang sangat menarik. Namun, mengingat Kejaksaan dan Kepolisian berada di bawah kuasa presiden, maka menuntut kedua institusi itu untuk independen, yang terbebas dari pengaruh feodalisme, mungkin cukup sulit. Tapi, mereka paling tidak mestinya bersikap profesional.

Menyadari hal tersebut, pengawasan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengawal para penegak hukum tersebut, termasuk KPK. Tak lupa, penguasa juga perlu terus mendapat kontrol dari masyarakat manakala kultur feodalisme masih dipakai untuk menjalankan pemerintahan.

Saran untuk pejabat yang masih memelihara kultur feodalisme ini, seyogianya segeralah sadar dan merasa malu memelihara sifat itu. Sebab, dalam perkembangan demokrasi dan penegakan hukum kelak, sama dengan sejarah hitam suatu pemerintahan yang otoriter, sejarah juga kelak pasti akan mencatat suatu pemerintahan yang amat kuat dipengaruhi kultur feodal.

■ TIM BI



Presiden Yudhoyono dan Tumpak Hatorangan yang sempat 'dittip' lagi di KPK.

Ironi Lembaga Independen

Sulit dipercaya bahwa kini berbagai cara feodalistik masih dilakukan untuk menghambat bahkan memperlemah lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata feodal berkaitan dengan susunan masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan, atau mengenai sikap atau cara hidup kaum bangsawan. Feodalistis berarti bersifat feodal. Sementara feodalisme berarti sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan, atau sistem sosial yang mengagung-agungkan jabatan atau pangkat, bukan prestasi kerja. Selalu bertahan pada nilai-nilai lama yang sudah banyak ditinggalkan, ngotot membenarkan diri untuk memper-

tahankan kekuasaan, tidak sudi dikoreksi, dan selalu ingin dihormati, adalah sebagian dari sifat bawaan dari feodalis.

Beberapa budayawan dan sejarawan, seperti Anhar Gonggong menyebut bahwa permasalahan yang dihadapi Indonesia sejak kemerdekaan adalah masih kuatnya dua sistem nilai yang merupakan warisan masa lampau, yakni nilai-nilai yang berasal dari masa feodalisme, terutama feodalisme Jawa, dan nilai-nilai yang terbentuk pada masa kolonialisme di Indonesia yang selain menciptakan nilai-nilainya sendiri, dalam banyak hal juga 'memelihara' dan mengukuhkan nilai-

nilai feodalisme.

Nilai-nilai yang ditumbuhkan pada masa kolonial di Nusantara, disebutkan, sarat dengan tata cara dan tujuan untuk mempertahankan hegemoni Barat, baik dalam politik, ekonomi maupun secara kultural. Kolonialisme mengajarkan bahwa kekuasaan adalah di atas segalanya.

Nilai-nilai feodalisme Indonesia, menurut Anhar, sarat dengan tata cara dan tujuan mempertahankan kedudukan kaum penguasa, dan sebaliknya menempatkan rakyat dalam posisi yang lemah.

Menurutnya, suasana pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan perilaku dalam pemilihan umum presiden-wakil presiden pun masih kuat diwarnai perilaku yang dipengaruhi nilai-nilai itu. Tersirat dan tersurat, orientasi pada kekuasaan menjadi yang utama. Demi tujuan kekuasaan, bahkan segala cara, mulai dari kata-kata sampai kepada perbuatan buruk di belakang layar pun dihalalkan.

Ditambahkan, proses pembaharuan dan pencerahan Indonesia menurut pengalaman, senantiasa mengalami kegagalan untuk mencapai tujuannya secara tuntas karena kuatnya tarikan sistem nilai warisan nilai dari masa lampau tersebut.

Salah satu aspek dari sistem nilai lama, khususnya feodalisme, adalah penempatan hegemoni kekuasaan pada kedudukan teratas. Kekuasaan dalam sistem feodal menempatkan para penguasa dalam segala keistimewaan dan limpahan kenikmatan dengan aspek pertanggungjawaban kepada rakyat yang nyaris tidak dipedulikan.

Fakta yang ada menunjukkan, bahwa hingga menjelang 65 tahun Indonesia setelah proklamasi, pemerintahan pun sudah beberapa kali berganti dari satu rezim ke rezim lainnya, namun bangsa ini tidak mampu mewujudkan cita-cita bangsa untuk menciptakan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melindungi segenap tanah air Indonesia. Hal itu diperkirakan merupakan salah satu akibat dari kultur feodalisme selama ini.

Di era demokrasi sekarang, praktik feodalistis memang tidak nyata zaman kerajaan dulu. Feodalisme kini dipraktekan dengan cara halus atau tersembunyi. Prakteknya bahkan terkadang terbungkus dalam bahasa-bahasa yang halus dan santun serta seolah-olah demokratis. Namun tujuannya tetap sama, untuk memuluskan kehendaknya semata. Dampaknya pun tidak jauh berbeda dengan dampak perilaku penguasa lalim zaman dulu.

Kuatnya pengaruh feodalistis itu juga terasa pada instansi atau lembaga independen, seperti Bank Indonesia (BI), Ko-



Dua Pimpinan KPK Bibit Samad dan Chandra Hamzah menjadi korban pelemahan KPK.

misi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kinerja lembaga-lembaga tersebut kenyataannya dirasakan tidak seindependen sebagaimana yang dikehendaki ketika mendirikannya.

Khusus dalam kaitannya dengan korupsi, struktur dan paham masyarakat yang feodalistik itu bahkan diyakini merupakan salah satu sumber berkembangnya sikap dan perilaku koruptif di Indonesia sekarang ini. Karena, dalam masyarakat yang masih menerapkan feodalisme, warga yang termasuk dalam kelompok itu memiliki keistimewaan. Keistimewaan itu biasanya terekspresi melalui penyalahgunaan wewenang yang salah satunya adalah memanfaatkan kedudukan atau jabatannya untuk mengambil uang negara untuk dirinya sendiri atau kelompoknya, dengan cara melanggar aturan yang lazim disebut dengan tindak korupsi.

Mengutip sejarawan Sartono Kartodirdjo mengenai mengapa korupsi bisa menguat di negeri ini, Pemimpin Umum *Harian Kompas* Jakob Oetama dalam dialog publik bertema "Transisi Menuju Demokrasi dan Peran Pendidikan Kewargaan" di Kolose Kanisius, Jakarta, Minggu

(9/5/2010), misalnya mengatakan, bahwa sumbernya adalah struktur dan paham masyarakat Indonesia yang feodalistik.

Dia mengakui, bangsa Indonesia memang kini dalam proses transformasi dari otokrasi ke demokrasi. Secara formal, juga berdasarkan perundang-undangan, demokratisasi memang terjadi di negeri ini bahkan sampai ke daerah. Namun, demokratisasi yang terwujud dalam pemilu kepala daerah secara langsung ternyata belum bisa menghasilkan pemimpin seperti yang diharapkan rakyat.

Begitu parahnya perilaku koruptif di negeri ini, sehingga perilaku buruk ini sempat dianggap sebagian orang sudah menjadi tradisi yang mengakar dalam budaya masyarakat. Artinya, korupsi telah menjadi sistem yang mau tidak mau harus diterima masyarakat.

Thamrin Amal Tomagola, Sosiolog Universitas Indonesia misalnya, menyebutkan, budaya sisa zaman kerajaan yang tidak memisahkan antara kepemilikan pribadi dan milik negara masih merasuk dalam budaya masyarakat sekarang. "Para pejabat merasa aset negara adalah milik pribadi, dan masyarakat memaklumi itu semua. Ditambah lagi dengan budaya memberikan upeti untuk mendapatkan posisi tertentu yang subur

dilakukan pada zaman penjajahan Belanda. Ini masih merasuk dalam sistem budaya masyarakat," ujarnya, 10 April 2010.

Dalam bahasa yang berbeda, Mochtar Lubis dalam buku "Manusia Indonesia Kini ala Mochtar Lubis" yang ditulis oleh Amarilldo, sebuah buku yang diangkat dari ceramah Mochtar Lubis di Institut Kesenian Jakarta (IKJ) pada tanggal 6 April 1977, juga menyebutkan, salah satu ciri manusia Indonesia adalah munafik atau hipokritis. Dalam ciri ini dijelaskan, bahwa kemunafikan merupakan sifat manusia Indonesia. Sebagai contoh, pidato-pidato tentang kebajikan dan kebijaksanaan ada di mana-mana, diucapkan dan didengarkan, namun korupsi masih saja merajalela.

Dari berbagai pendapat itu, ditarik kesimpulan, bahwa korupsi yang mengakar dalam budaya masyarakat diperkirakan tidak lepas dari konsep feodalisme yang sudah tertanam di kehidupan masyarakat Nusantara jauh sebelumnya. Dimana, seorang penguasa harus dapat melindungi kehidupan rakyatnya, dan sebagai balasannya, rakyat harus memberikan upeti kepada penguasa atas jasa perlindungannya.

Seperti dikemukakan para sejarawan,

dulu sudah menjadi kebiasaan, seorang lurah yang merupakan penguasa lokal berkewajiban mengumpulkan upeti berupa hasil bumi suatu desa kepada pejabat di atasnya. Demikian selanjutnya, pejabat menengah mengumpulkan upeti dari beberapa desa untuk kemudian diserahkan kepada pejabat yang lebih tinggi lagi.

Dalam hal-hal inilah cikal-bakal mulai terjadinya praktek korupsi, dimana para pejabat itu mulai tergiur akan potensi keuntungan yang lebih besar. Untuk memperoleh itu, tidak mungkin dilakukan dengan cara memotong hasil upeti yang hendak diserahkan kepada penguasa pusat. Akhirnya, mereka pun mengeksploitasi petani untuk menyerahkan upeti yang lebih banyak. Praktek itu terus berlangsung pada masa kolonisasi Belanda bahkan hingga masa kemerdekaan.

Pada masa Orde Baru, praktek korupsi mencapai puncaknya. Ketika itu, tindak korupsi seakan bukan lagi hal yang ditakutkan. Bahkan, pejabat yang tidak tahu mengumpulkan uang dari negara maupun rakyat dianggap pejabat yang bodoh. Sementara itu, rakyat hanya dapat melihat tanpa bisa berbuat apa-apa.

Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Mahfud MD, dalam menanggapi banyaknya kasus korupsi di daerah bahkan mengatakan bahwa korupsi di Indonesia justru timbul sesaat setelah Orde Baru. Namun, berbeda dengan pendapat yang lain, dia menyebut bahwa banyaknya kasus korupsi itu bukan indikator bahwa korupsi telah membudaya di Indonesia. "Jika korupsi budaya, berarti sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihapus," katanya waktu itu. Jadi menurutnya, korupsi mulai merambah di Indonesia sejak 1974 di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. Sebelum Indonesia merdeka, praktik korupsi menurutnya cenderung tidak ada.

Praktek korupsi terus berlanjut pada masa reformasi. Sebagai salah satu agenda dari reformasi, pemerintah memang tampaknya berupaya memberantas praktik korupsi. Namun, akibat masih melekatnya kultur feodalisme, upaya selama ini dirasa belum maksimal. Bahkan pada era reformasi ini, korupsi cenderung semakin canggih.

Salah satu yang mendukung pendapat ini, datang dari Denny Indrayana PhD. Pakar tata negara dari UGM yang kini



Jakob Oetama

berada di belakang pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, tahun 2007 lalu ketika masih menjadi Direktur Pusat Studi Antikorupsi UGM dalam wawancaranya dengan *Jawa Pos* menyebutkan, agenda pemberantasan korupsi berada dalam tahap paling kritis. Tahap seperti itu katanya sudah berkali-kali dilewati, tapi selalu saja gagal, terpuruk, dan kembali ke awal lagi.

Lebih lanjut ketika itu dia mengatakan, kita dihadapkan pada keniscayaan tugas

Korbankan Hak Warga Negara

Salah satu tonggak demokrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum. Namun, indikasi tercemarnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh kultur feodalisme, membuat banyak hak dasar warga negara rusak.

Pemilihan umum (Pemilu) dalam masyarakat demokratis seperti Indonesia dimaksudkan sebagai langkah atau cara untuk memilih pemimpin eksekutif dan anggota legislatif, dua lembaga yang sangat menentukan maju mudurnya langkah kehidupan bangsa. Untuk memperoleh hasil yang benar-benar demokratis, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana pemilu harus independen, yang tentu juga harus dimulai dari penyaringan anggotanya yang independen. Yakni, orang yang terbebas dari kepentingan satu kelompok politik tertentu, juga terbebas dari sikap *ewuh pakewuh* pada penguasa, sikap yang selama ini sering dianggap sebagai dampak kultur feodal.

Anggota KPU juga seharusnya orang yang tegas dan berani menolak godaan pihak tertentu untuk melakukan penyelewengan data, teknis, maupun hasil pemilu, yang bertujuan untuk menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Yang tak kalah penting lagi

adalah, anggota KPU tersebut bukan tipe orang yang suka "menjilat" penguasa.

Demokrasi harus ditempatkan di atas asumsi bahwa warga negara setara di hadapan hukum. Dengan cara itu, segala bentuk feodalisme diharapkan bisa dimusnahkan. Karena jika masyarakat masih hidup dalam alam feodalisme, demokrasi tidak akan pernah terbentuk. Praktek diskriminasi, intoleransi, penindasan, korupsi, dan pemusnahan kelompok minoritas akan tumbuh subur.

Melihat pengalaman beberapa waktu lalu, kultur feodalisme sampai sekarang ini masih melekat dalam jiwa orang Indonesia, sekaligus menjadi salah satu penyebab bangsa ini tidak bisa melakukan pemilu secara efektif dan efisien.

Slogan kesetaraan di hadapan hukum yang sering diutarakan selama ini dirasakan masih sekadar slogan belaka. Faktanya, banyak orang berpikir feodal dengan menempatkan diri atau orang lain pada status lebih tinggi daripada status orang pada umumnya. Sebaliknya, ada juga orang, bahkan pemegang jabatan lembaga independen justru menempatkan dirinya di bawah kekuasaan penguasa.

Melihat semrautnya daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2009 lalu misalnya, sulit diterima logika jika

kesemrautan itu tidak ada kaitan dengan pengaruh kultur feodalisme. Banyak yang menduga, kalau bukan pihak pemerintah berkuasa saat itu yang memerintahkan, mungkin KPU yang waktu itu diketuai Abdul Hafiz Anshary sendiri yang berusaha mengabdikan diri kepada pemerintah, yakni diam-diam membiarkan DPT ambarudul untuk mendukung pemerintah yang sedang berkuasa. Walau susah membuktikan, namun indikasinya sangat terasa.

Wajar jika banyak orang menduga demikian. Sebab, daftar pemilih sementara (DPS) diperoleh KPU dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, untuk kemudian diperbaiki. Namun dalam beberapa kali perbaikan, tetap saja ada kekeliruan daftar pemilih. Anehnya, dalam beberapa kali kekeliruan tersebut, tampaknya partai politik yang merupakan partai pendukung pemerintah tidak pernah mengalami kerugian signifikan. Mereka pun terkesan melindungi KPU dengan berbagai cara. Di sinilah masyarakat menduga-duga, "apakah mungkin ada persekongkolan di antara keduanya?"

Baru-baru ini, wacana tentang KPU kembali hangat dibicarakan publik. Sebelumnya, beberapa politisi partai politik (parpol) mengatakan niat mengikuti seleksi anggota KPU. Menanggapi



Busyro Muqodas

berupa operasi besar untuk mengampunisasi kanker korupsi di level elite. Jika gagal lagi, kita akan terseok-seok lagi dan mulai dari bawah. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), UU Tindak Pidana Korupsi yang telah diamandemen berkali-kali, serta PPAK seharusnya bisa dioptimalkan sebagai penguatan bidang regulasi dan *institutional building* untuk melawan korupsi.

Indikasi kritis yang dia maksud adalah kasus korupsi sudah menyentuh level

kekuasaan tertinggi seperti calon presiden maupun presiden terpilih. Menghadapi itu, Denny Indrayana ketika itu mempertanyakan apakah bisa diyakini bahwa pisau bedah operasi hukum cukup tajam untuk mengampunisasi korupsi elite?

Menanggapi kegesitan KPK dalam melangkah, Denny ketika itu mengatakan, dirinya masih menaruh harapan kepada KPK dengan catatan yakni, penegak hukum yang lain secara independen ikut mengambil langkah proaktif. Sinergis itu menurutnya penting karena karakter penegakan hukum Indonesia masih feodal. Hukum kita tidak bisa menyentuh para elit karena adanya budaya *ewuh pakewuh* hingga menimbulkan praktik tebang pilih. Misalnya, kejaksaan dan kepolisian yang secara struktur berada di bawah koordinasi presiden, akan sulit melakukan pemeriksaan secara independen, objektif, dan imparial kepada presiden dan orang di sekelilingnya.

Pendapat yang lebih keras dari beberapa pihak lainnya bahkan menduga, pemerintah tampaknya hanya getol mendorong pembongkaran korupsi yang dilakukan oleh pihak di luar lingkungannya. Sebaliknya, demi mempertahankan ke-

kuasaan, pemerintah, baik pusat maupun daerah tampaknya terus berusaha keras menghambat upaya pemberantasan korupsi yang menyangkut kelompoknya.

Indikasinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga independen yang sengaja dibentuk untuk memberantas korupsi sering terasa tidak lagi bisa independen dalam menjalankan tugasnya. Mereka sering lamban bertindak dalam kasus tertentu yang terkait dengan kelompok penguasa. Sebaliknya, tampak agresif jika menyangkut tersangka di luar kelompok pemerintah yang sedang berkuasa. Hal tersebut diduga karena beberapa oknum pejabat KPK itu juga telah terjatuh dalam "rangkulan" ketat kultur feodal dimaksud. Sehingga, secara kelembagaan, KPK pun susah bergerak melepaskan diri.

Ketua Komisi Yudisial, Busro Muqodas secara tidak langsung mendukung pendapat tersebut di atas. Dalam makalahnya yang disampaikan dalam Lokakarya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Yudisial pada 5 Maret 2009 menyebutkan, budaya feodalisme dalam jajaran struktur politik dan birokrasi modern masih menjadi faktor penyubur korupsi. Mentalitas kepatuhan 'klien

hal tersebut sebanyak 25 lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil dalam pernyataan persnya 24 Mei 2010 menolak masuknya parpol ke dalam penyelenggara pemilu, seperti tertuang dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam draf tersebut disebutkan, syarat calon anggota KPU dan Badan Pengawas Pemilu tidak boleh berasal dari partai politik.

Terkait kultur feodalisme sebagaimana diuraikan di atas, jika kader partai politik benar-benar bisa masuk ke KPU, maka akan lengkaplah sudah kebobrokan pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Sebab, kultur feodalisme yang diyakini masih sangat melekat dalam watak masyarakat Indonesia pun seakan makin disahkan dengan diizinkan politisi parpol masuk ke KPU.

Menyadari bahaya laten dari kultur feodalisme ini, maka langkah yang harus diupayakan sebenarnya adalah bagaimana menyingkirkan feodalisme dari kultur Indonesia. Caranya barangkali dengan mempersempit ruang gerak pelaku feodalisme serta memberikan pendidikan antifeodalisme. Contohnya adalah seperti diperjuangkan oleh LSM di atas, yakni melarang partai politik



Ketua KPU Abdul Hafidz Azhary menyerahkan SK-KPU tentang penetapan hasil penghitungan suara pilpres 2009 kepada pasangan SBY-Boediono (25/7/2009).

memasuki lembaga independen. Sementara langkah melalui pendidikan anti-feodalisme, seharusnya dilakukan tidak

hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat dan keluarga.

■ TIM BI

terhadap patron' telah bermetamorfosa pada ketertundukan pejabat publik terhadap kepentingan sponsor yang telah berjasa menempatkan mereka dalam posisinya.

Lebih lanjut dia menyebutkan, apakah itu patron partai politik, cukong/konglomerat dan lainnya, dalam praktek telah menjadi faktor kendala mental. Stigma tebang pilih dalam praktek pemberantasan korupsi kian mengalami pembenaran psikologis. Utang budi politik dan finansial dalam praktek telah menjerat penegak hukum untuk menutup kasus-kasus korupsi dalam lingkaran patronase. Dengan demikian, budaya dan perilaku elit politik/birokrasi serta kepentingan patron telah menjadi faktor dominan yang semakin merusak mentalitas penegak hukum. Menurutnya, integritas dan independensi penegak hukum sekarang terjerat oleh faktor ini.

Melihat beberapa indikasi pada waktu lalu, beberapa pihak bahkan menduga bahwa penguasa dengan kekuatan modal dan kekuasaan yang dimilikinya telah mendesain sebuah konspirasi untuk mendiskreditkan KPK karena pada pe-

riode tertentu pemimpin lembaga KPK tidak bisa "diatur" sesuai keinginan penguasa. Strategi yang digunakan tampaknya dengan merusak terlebih dahulu citra KPK, kemudian mempreteli hak-hak eksklusifnya secara gradual.

Dugaan itu disebutkan terasa ketika Antasari Azhar memimpin KPK. Antasari Azhar ketika itu memang diakui merupakan simbol gerakan anti-korupsi yang tidak mau "tunduk" pada penguasa. Apalagi ketika itu, Ketua KPK yang dikabarkan tidak sudi "membungkuk" di depan Presiden itu sedang berniat menyelidiki indikasi korupsi di KPU terkait teknologi informasi pada pemilu 2009. Maka diduga, dengan menyerang Antasari, pencitraan masyarakat akan KPK diharapkan menjadi negatif dan kinerja KPK secara kelembagaan akan berkurang.

Untuk mencapai target 'pembunuhan karakter' itu, langkah yang dipilih pun diduga dengan melakukan jebakan yang terkesan sensasional dan menyangkut masalah personal, bukan kelembagaan. Seperti diketahui, Antasari Azhar pun dituduh terlibat pembunuhan berencana atas Nazaruddin Sjamssudin. Antasari



Thamrin Amal Tomagola

sendiri jadi tersangka utama sebagai aktor intelektual di belakang pembunuhan yang berlatar motif asrama itu. Masih menurut dugaan, motif itu dipilih untuk merusak citra Antasari sebagai bukan pejabat yang bersih melainkan laki-laki berhidung belang.

Jika dugaan itu benar, konspirasi itu terbukti berhasil. Seperti diketahui, untuk

Temuannya Sekadar Kosmetik

Penegak hukum yang lebih sering tidak menindaklanjuti temuan PPATK diduga karena dampak kultur feodalisme yang sudah merasuki aparat.

Mencuatnya kasus korupsi pegawai Ditjen Pajak Departemen Keuangan Gayus H Tambunan beberapa waktu lalu membuat mata publik semakin tercelik melihat beberapa hal yang selama ini kelihatan abu-abu. Dalam hal ini, termasuk fungsi dan kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang sebelumnya tidak banyak diketahui masyarakat.

Dari laporan temuan PPATK belum lama ini, kita semakin menyadari bahwa memang sudah ada yang salah dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Disebut demikian karena, di satu sisi lembaga-lembaga pendukung pemberantasan korupsi seperti PPATK didirikan sedemikian rupa. Namun di sisi lain, temuannya tidak maksimal dimanfaatkan. Semua pejabat publik bagaikan koor, satu suara menyatakan dirinya seorang pahlawan pemberantasan korupsi. Namun realitasnya, bagaikan koor juga, temuan lembaga berwenang seperti PPATK cuma sedikit yang ditindaklanjuti. Gejala ini diduga tidak lepas dari pengaruh kultur feodalisme di dalam lingkaran aparat sendiri.

Seperti diberitakan beberapa waktu yang lalu, ketika menyelidiki aliran dana terkait dugaan korupsi Gayus Tambunan, PPATK melaporkan, bahwa selain rekening Gayus dan Bahasyim Assifie, ditemukan juga sejumlah rekening mencurigakan milik menteri, anggota DPR, dan pejabat pemerintah setingkat dirjen. Bahkan menurut PPATK, mulai tahun 2005 juga telah dilaporkan sebanyak 1.050 laporan "transaksi mencurigakan" kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Namun, dari laporan yang cukup banyak itu, hanya sedikit yang ditindaklanjuti hingga ke pengadilan. Contoh yang paling dekat adalah dugaan korupsi dalam pengucuran dana talangan pada Bank Century. Dalam kasus itu, BPK telah menyebut adanya dugaan korupsi di dalam prosesnya. Selanjutnya, PPATK juga telah melaporkan rekam jejak transaksi mencurigakan. Namun apa hasil penyelidikan penegak hukum hingga saat ini belum diketahui masyarakat.

Sementara kasus Gayus kemudian terus diselidiki diduga hanya karena telah dibuka oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji dan diikuti terus menerus oleh publik, khususnya media massa.

Memang bukan tidak mungkin bahwa

prestasi aparat penegak hukum selama ini adalah karena ada *back up* data dari PPATK. Namun melihat minimnya tindak lanjut hasil temuan PPATK itu, kita merasa prihatin dengan posisi lembaga ini. Karena, di satu sisi mereka dituntut bekerja cepat dan terbuka, namun di sisi lain keberadaannya seakan dianggap tidak berguna. Buktinya, hasil temuan mereka tidak ditindaklanjuti secara serius.

Walau tidak secara eksplisit menyatakan kecewa atas minimnya tindak lanjut temuan lembaganya, Ketua PPATK Yunus Husein menilai penegakan hukum di Indonesia memang masih lemah. Untuk itu, penegakan hukum, utamanya pemberantasan korupsi menurutnya perlu ketegasan lembaga penegak hukum dan dukungan politik.

"Di China, di samping hukuman berat, komite disiplin partai juga tegas memberi hukuman. Kita harus belajar dari sini, dalam pemberantasan korupsi harus ada dukungan legislasi dan politik," kata Yunus usai rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2010).

Yang menjadi ganjalan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, menurut Yunus, adalah banyaknya kekuatan yang mencoba menghalangi kerja KPK. "Karena korupsi itu kan banyak. Tau sendiri

sangkaan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman penjara pada Antasari dan Antasari sendiri masih naik banding.

Setelah Antasari dibereskan, dugaan konspirasi selanjutnya mengincar pejabat-pejabat teras KPK lainnya. Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah pun dituduh terima suap dan penyalahgunaan wewenang. Namun berkat dukungan publik, kedua pimpinan KPK itu tidak mudah dijebloskan ke bui.

Selain berusaha menjerat pimpinan KPK yang terkenal vokal dalam kasus pidana, dugaan konspirasi usaha pengadilan KPK juga sempat dilakukan dengan usaha menghembuskan berbagai wacana. Disebutkan, wewenang KPK sudah terlalu luas dan digambarkan sebagai lembaga yang mempunyai wewenang tak terbatas yang rentan akan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam rangka pembatasan hak itu, hak-hak eksklusif KPK pun sempat dicoba dipreteli. Misalnya, hak KPK melakukan penyadapan hendak dibatasi dengan membuat syarat harus mendapat izin dari pengadilan lebih dulu.

Bersihkan Kultur Feodal

Melihat dampak korupsi yang begitu merusak kehidupan bangsa, maka di samping penegakan kembali independensi KPK dan menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi, kiranya perlu dibersihkan kultur feodalisme yang merupakan pemicu tidak pidana ini. Bahkan mungkin perlu didahulukan.

Terkait dengan saran tersebut, Ketua Komisi Yudisial Busro Muqoddas berpendapat, jika kendala dan hambatan pemberantasan korupsi dan reformasi peradilan selama ini terletak pada faktor patron klien dengan segala implikasinya, maka ke depan diperlukan langkah konstitusional untuk memosisikan lembaga penegak hukum sepenuhnya bersifat independen dan terlepas dari wewenang presiden.

Sedangkan Thamrin Amal Tomagola menyarankan, agar pelaku korupsi dihukum berat untuk memberikan efek jera. "Pelaku korupsi 'dihukum mati', tapi bukan secara fisik namun secara sosial, budaya, dan ekonomi. Pelaku korupsi diberikan penjara khusus, pakaian khusus, dan disuruh kerja bakti untuk mem-

bersihkan WC umum di tengah keramaian kota," ujarnya. Namun, dia mengaku tidak setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati yang sebenarnya. Karena menurutnya, hukuman itu akan menimbulkan dendam dan justru memicu tumbuhnya watak korupsi secara turun temurun.

Sementara itu, Jacob Utama menyarankan agar pemerintah jeli dengan menyadari kalau korupsi bukan sekadar usaha memperkaya diri dengan uang negara, tetapi korupsi harus dilihat sebagai praktik budaya yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Menurutnya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pendekatan yang harus dilakukan jangan hanya dari segi hukum.

Karena, kalau hanya jalan itu yang ditempuh, maka sebanyak apapun pelaku korupsi yang dipenjarakan, tentu akan muncul pelaku korupsi baru. Jadi untuk mengatasi itu, harus dilakukan pendekatan budaya untuk mencabut tradisi budaya korupsi dari akar budaya bangsa. Menurutnya, langkah tersebut memang tidak mudah dan harus dilakukan secara bertahap. Tetapi bukan suatu yang mustahil untuk dilakukan. ■ TIM BI



Presiden SBY bersalaman dengan Kepala PPATK Yunus Husein pada peresmian gedung PPATK di Jakarta (27/11/2009).

banyak pejabat (terlibat). Banyak pejabat yang punya power dan segala macam," keluh Yunus.

Apa yang dikeluhkan Yunus itu sama-

kin menguatkan dugaan bahwa kultur feodalisme yang masih tertanam di masyarakat Indonesia telah melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia,

bahkan boleh dikatakan telah menyalahkan kinerja PPATK selama ini.

Diduga, temuan PPATK selama ini tidak ditindaklanjuti aparat penegak hukum karena tersangka atau kelompoknya memiliki kekuatan besar sehingga bisa "memerintahkan" PPATK tidak membuka dan/atau aparat hukum untuk tidak memulai atau melanjutkan penyelidikan. Atau sebaliknya, penegak hukum sendiri tidak mau atau tidak berani menindaklanjuti karena ada rasa *ewuh pakewuh* yang berlebihan di dalam dirinya terhadap tersangka.

Belajar dari masalah ini, maka ke depan, mengingat koordinasi pengungkapan korupsi telah ada kesepakatan antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan PPATK, maka KPK dan penegak hukum lainnya harus terus diawasi serta diberi dorongan untuk melawan kultur feodalisme, sehingga mereka tidak merasa takut atau enggan untuk menindaklanjuti temuan PPATK. Dengan demikian, kesan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi bisa dihindari.

Untuk memaksimalkan fungsi PPATK, sekaligus dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan korupsi, hasil analisis PPATK yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan itu, hendaknya dijadikan *entry point* dan ditindaklanjuti untuk membidik koruptor. Sebab jika laporan yang sedemikian banyak hanya didiamkan dan tidak ditindaklanjuti, kehadiran PPATK akan percuma. ■ TIM BI



Aman Setelah Tidak Berkuasa

Sesuai dengan sifatnya yang selalu ingin dihormati, pemerintahan yang masih dipengaruhi kultur feodal akan menempuh berbagai cara termasuk memanipulasi hukum untuk mempertahankan kekuasaannya.

Jika dahulu cara-cara yang ditempuh sering dibarengi dengan kekerasan, maka pemerintahan tersebut disebut pemerintahan yang diktator. Dari sifatnya, sebenarnya pemerintahan yang feodal otoriter dan diktator, sama saja yakni sama-sama memaksakan kehendaknya untuk mempertahankan kekuasaan. Bedanya, hanya dari kualitas caranya.

Kini di era demokrasi ini, pemerintahan feodal yang otoriter dan diktator atau bertangan besi sudah semakin sedikit

jumlahnya. Namun, pemerintahan yang dipengaruhi kultur feodal diyakini masih langgeng. Gaya pemerintahan tersebut masih eksis tapi sering menyaru seperti seorang yang demokratis. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan sering tidak kasat mata, seperti lewat jaringan intelijen, bahkan sering bertameng kepentingan rakyat seperti memberi bantuan dan sebagainya.

Merujuk pada cara-cara seperti disebutkan di atas, maka tidak terlalu salah jika beberapa pengamat menganggap peme-

rintahan Republik Indonesia, mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekarang ini sebagai pemerintahan yang masih akrab dengan pengaruh feodalisme. Anggapan bahwa pengaruh feodalisme masih melekat hingga era pemerintahan SBY tersebut dikemukakan karena menurut mereka, pemerintah juga sering memakai jaringan intel untuk mempertahankan kekuasaannya. Di samping itu, beberapa kebijakan pemerintahan sekarang yang seolah-olah hendak membantu rakyat, tapi menurut para pengamat dianggap hanya untuk pencitraan diri penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaan.

Adanya upaya membatasi kebebasan media massa juga merupakan indikasi masih kuatnya pengaruh feodalisme. Dugaan ini mencuat, antara lain, setelah sempat muncul draft Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Konten Multimedia melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang notabene bisa berdampak pembatasan kebebasan media massa. Berdasarkan pasal 23 RPM Konten Multimedia itu disebutkan, bahwa Tim Konten Multimedia akan melaksanakan pemeriksaan terhadap satu atau serangkaian konten yang berdasarkan Laporan dan/atau Pengaduan dari masyarakat, penegak hukum, dan/atau Penyelenggara diduga merupakan Konten yang dilarang. Setelah mendapat protes dan kritikan keras dari berbagai pihak, pembahasan RPM Konten Multimedia ini sejenak macet. Namun usulan itu dianggap sudah cukup menjelaskan bahwa pemerintah punya niatan untuk mengontrol informasi publik.

Setelah itu, sempat pula muncul Rancangan Undang Undang (RUU) Intelijen Negara yang cenderung akan memanfaatkan fungsi intel untuk kepentingan kekuasaan. Draft RUU Intelijen Negara misalnya, memasukkan kewenangan intelijen untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap siapa pun yang dicurigai. Tujuan yang tersirat dari RUU ini cukup jelas yakni agar tidak ada pihak yang bisa mengutak-atik kekuasaan penguasa. Jika RUU ini tadinya lolos, itu berarti rezim penguasa sekarang bakal lebih otoriter dari pemerintahan Orde Baru.

Bukti yang paling nyata adalah berita tentang dibekuknya seorang anggota intelijen dari TNI AD saat mengikuti rapat Gerakan Indonesia Bersih (GIB). Intel tersebut dikatakan sempat mengaku aktivis saat diinterogasi. Kedok sang intel terbongkar ketika rapat di markas GIB, Sabtu (27/2). Menurut aktivis GIB Lalu Hilman, peserta rapat yang berasal dari berbagai gerakan, sebelumnya curiga

dengan gerak-gerik intel tersebut. Beberapa orang kemudian menangkap dan menginterogasi intel yang membawa surat tugas monitoring dari Kostrad itu. Hilman menyesalkan langkah rezim penguasa sekarang yang menurutnya menggunakan cara-cara Orde Baru dengan memanfaatkan intel dari TNI. "GIB ini menggelar acara terbuka dan untuk kebaikan, kenapa disusupkan intel tentara dan pakai cara-cara yang seperti Orde Baru," katanya.

Jika benar demikian, barangkali perlu dipertanyakan apa peran badan intelijen. Pasalnya, badan intelijen merupakan salah satu alat negara, bukan alat pemerintah atau alat dari rezim tertentu yang sedang berkuasa. Namun dalam kenyataannya, badan intelijen lebih terkesan sebagai alat penguasa.

Selain memanfaatkan jasa badan intelijen, pemerintahan juga tampaknya memakai kebijakan seperti pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk menaikkan citranya, yang tujuan akhirnya juga untuk mempertahankan kekuasaan. Apalagi sumber dana BLT itu ternyata dari pinjaman asing dan Surat Utang Negara (SUN).

Beberapa Indikasi

Melihat berbagai pengalaman dari beberapa penguasa sebelumnya yang kesalahannya terbongkar setelah tidak berkuasa, sejumlah pengamat menilai, pemerintahan sedang berusaha dengan beberapa cara agar tidak tersangkut kasus hukum selepas berkuasa.

Agar tidak seperti mantan Presiden Soeharto yang hanya membuat undang-undang untuk melanggengkan kekuasaannya, tidak mempersiapkan keamanannya pasca-berkuasa, sehingga begitu tidak berkuasa langsung diperiksa oleh jaksa penuntut umum yang jengangnya ibarat bumi dan langit karena dituduh melakukan KKN. Sedangkan pemerintahan sekarang disebutkan akan berusaha mempersiapkan undang-undang supaya tetap aman pasca-berkuasa.

Indikasi usaha tersebut menurut beberapa pengamat, terlihat dari sempat munculnya rancangan undang-undang (RUU) Teknologi Informasi yang mengatur bahwa informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara berada di tangan presiden. Di samping itu, juga membuat undang-undang yang intinya menyatakan bahwa suatu kebijakan tidak bisa dipidana.

Dalam RUU Teknologi Informasi itu disebut, demi alasan penegakan hukum, kekayaan seorang penyelenggara negara yang menjadi tersangka tidak boleh diungkap, kecuali seizin presiden. Padahal selama ini KPK boleh mengungkapnya tanpa izin presiden. Sebaliknya, jaksa dan polisi hanya bisa melacak harta kekayaan penyelenggara negara seizin Bank Indo-



Satgas Pemberantasan Mafia Hukum belakangan ini terlihat "sibuk" memberantas praktik mafia hukum.

nesia.

Seperti diketahui, sebelumnya hanya pemeriksaan pejabat negaralah yang harus mendapat izin presiden. Tetapi sekarang, pengungkapan harta kekayaannya pun jika jadi terdakwa, harus seizin presiden. Artinya, presiden tetap menguasai semua sumber informasi. Pimpinan KPK, Jaksa Agung dan Kapolri wajib minta izin presiden. Mengingat KPK adalah lembaga independen, sebenarnya izin presiden bertentangan dengan Undang-Undang KPK.

Pemerintah membuat undang-undang yang diduga sengaja tumpang-tindih, sehingga pelaksanaan penegakan hukum menimbulkan konflik. Akibatnya tidak ada kepastian hukum, sesuatu yang mungkin memang ingin dicapai.

Caranya juga cukup rapi, dipecah dalam Undang-Undang Rahasia Negara dan Undang-Undang Teknologi Informasi (TI). Intinya memperlemah Undang-Undang Anti Korupsi. Bahkan ada konsep yang muncul, harta koruptor boleh dirampas untuk Negara, tetapi orangnya tidak dihukum. Konsep ini memang berasal dari Barat. Di Indonesia sendiri hal ini pernah diterapkan untuk para kreditor pengemplang BLBI yang dikenal dengan kebijakan *release and discharge*—ambil uangnya tapi hapus perkaranya.

Idenya, nantinya KPK tidak boleh menghukum, tidak ada pengadilan Tipikor. KPK cukup mencegah saja. Jadi hanya menjalankan fungsi Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara

(KPKPN). Sedangkan penindakan dilakukan oleh kejaksaan. Pola ini seperti diterapkan oleh Korea Selatan, yang di depan tetap kejaksaan. Semua menyangkut masalah teknis dilakukan oleh kejaksaan.

Hal inilah yang cukup dikhawatirkan sebab kalau sudah sampai di tangan kejaksaan, sesuai pengalaman selama ini, semuanya bisa diatur. Dengan demikian, nanti kalau seorang presiden tidak berkuasa, tidak bernasib seperti Pak Harto atau Bung Karno.

Lantas bagaimana caranya? Buat undang-undang yang menyatakan, sewaktu berkuasa, presiden mengeluarkan kebijakan penyelamatan. Suatu kebijakan tidak bisa dipidana. Dibuat seperti itu, supaya didukung oleh semua orang.

Itu pun masih ditambah dengan wewenang, presiden memegang informasi harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi hanya dia yang boleh menguasai informasi tersebut. KPK tidak lagi punya wewenang memberikan informasi tentang kekayaan pejabat atau penyelenggara negara.

Konseptor RUU tersebut tentu orang-orang yang sangat cerdas. Sumber *Berindo* menengarainya para konsultan asing yang harus mengamankan sejumlah aset dan kepentingannya di sini - seperti investasi dalam pertambangan Migas, emas dan batubara. Mereka tidak peduli berapa uang yang harus dibelanjakan untuk pembuatan legislasi itu, asalkan aset dan kepentingannya tetap aman. ■ TIM BI

Ketika Guru Ikut Demo

Menjalani profesi guru di negeri ini masih menjadi dilema. Di satu sisi dituntut lebih profesional, tapi di sisi lain, kejelasan status dan kesejahteraannya kurang diperhatikan. Guru pun terpaksa turun ke jalan meminta perhatian pemerintah.

Guru sebagai warga masyarakat yang diangkat secara khusus dalam tugas mendidik dan mengajar, memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga nilai-nilai dan norma-norma. Sosok seorang guru yang demikian bisa kita temukan dalam buah karya Umar Kayam yang berjudul "Para Priyayi (Sebuah Novel)".

Dalam novel itu kita dapat melihat gambaran kehidupan seorang guru pada zaman pendudukan Belanda maupun Jepang yang berada pada posisi terhormat. Mereka disegani oleh masyarakat dan menjadi tumpuan ekonomi sanak saudaranya. Sosok Sastrodarsono sebagai guru dalam novel itu patut diteladani. Ia bertanggung jawab dan sungguh-sungguh mengabdikan sebagai guru yang mendidik dan mengajar.

Namun jika kita melihat sosok guru pada novel tersebut dan sosok guru yang ada pada saat ini, sangat jauh berbeda. Keluarga guru, pada waktu itu dianggap sebagai keluarga priyayi dan memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat. Lain halnya dengan sekarang, kepriyayaan seorang guru sedikit demi sedikit memudar.

Penghargaan masyarakat terhadap guru makin berkurang dan pemerintah yang diharapkan memberikan perhatian belum sepuas hati bergerak. Profesi guru yang begitu mulia itu belum diimbangi dengan kesejahteraan mereka. Bahkan kepastian status sebagian guru masih banyak yang tidak jelas.

Masih banyak guru, baik yang sudah pegawai negeri sipil (PNS) maupun yang masih honor/guru bantu dan guru sekolah swasta, di kota maupun di desa yang belum bisa mengandalkan gajinya untuk menghidupi keluarganya. Contohnya, Sianipar, guru PNS di salah satu Sekolah Dasar (SD) negeri di Bekasi Utara Kotamadya Bekasi, Jawa Barat, harus dibantu istrinya dengan berjualan sayur setiap pagi di pasar tradisional dekat rumahnya untuk menutupi kebutuhan keluarganya.

Sedangkan Shoddiq Nurjainuri yang

menjadi guru bantu di SD Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Desa Singkuang, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, harus menopang ekonomi keluarganya dengan bercocok tanam karena honorinya hanya Rp710.000 per bulan. Honor itu pun harus diambil ke Kecamatan Natal yang menghabiskan ongkos sekitar Rp200.000 sekali pergi.

Kecilnya honorarium bahkan sangat dirasakan oleh Drs Imam Maznan Ali, guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Azzahidin yang beralamat di Jalan Hang Tuah Ujung, Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Seperti yang dilaporkan Antara 11 Mei 2010, Maznan hanya digaji Rp72 ribu per bulan. Gaji itu pun tidak selalu dibayarkan setiap bulan tapi biasanya dirapel hingga dua bulan. Karena gajinya sangat kecil, Maznan terpaksa harus nombok berbagai biaya termasuk biaya transportasi. Ia memilih bertahan menjadi guru hanya karena sudah menjadi cita-citanya sejak kecil. Baginya, menghasilkan murid yang akan menjadi orang berhasil di kemudian hari adalah kebahagiaan.

Masih banyak guru yang bernasib sama dengan Sianipar, Shoddiq, dan Imam Maznan. Dibandingkan di luar negeri, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, secara umum kesejahteraan guru di Tanah Air jauh lebih rendah. Di dua negara jiran itu, keberadaan guru cukup dihargai negaranya. Ada saja penghargaan dan penghormatan khusus yang diberikan kepada guru selaku abdi negara. Sedangkan di Indonesia, ketidakseimbangan antara penghargaan dan pengabdian menempatkan guru harus bersusah payah hidup dalam serba keterbatasan. Rendahnya gaji yang diterima diperparah lagi oleh biaya hidup yang sangat tinggi. Di sisi lain, di tengah pengeluaran guru meningkatkan taraf hidupnya agar tidak sampai diolok-olok murid karena kemiskinannya, mereka juga dituntut untuk terus meningkatkan profesionalitas seperti penguasaan teknologi informasi dan lain sebagainya.



Para guru bantu atau honorer di Jakarta beberapa waktu lalu.

Di samping permasalahan seputar kesejahteraan, persoalan nasib para guru honorer yang masih terkatung-katung dan status guru sekolah swasta juga menambah persoalan guru di negeri ini. Berbagai persoalan itu membuat pahlawan tanpa tanda jasa ini terkadang tidak kuat lagi berdiam rasa. Mereka pun akhirnya merasa perlu turun ke jalan, berdemo meminta perhatian pemerintah.

Aksi demo para guru di berbagai kota/provinsi belakangan ini semakin sering terjadi. Sebagai contoh, pada 12 Mei 2010, ribuan guru yang tergabung dalam Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB-PGRI) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Pendidikan Nasional, Gedung MPR/DPR, dan Kantor Kementerian Agama. Para guru yang datang dari berbagai kota di Tanah Air itu menuntut pembatalan rencana pemerintah meniadakan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK).

Menurut Ketua PB-PGRI, Sulistiyo, rencana pemerintah itu cenderung kembali ke pola lama di zaman Orde Baru. Rencana itu akan semakin memperpanjang jalur birokrasi dan kembali ke sistem kastanisasi yang semakin memperlihatkan fungsi dan manajemen yang berbeda antara guru SD dan SMP. Guru dan tenaga kependidikan juga akan kembali terkotak-kotak. Jika PMPTK diadakan, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan dari



...ktu lalu melakukan aksi demo menuntut perhatian pemerintah soal status mereka

satu atap akan dialihkan ke tiga atap yaitu: Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Non-formal dan Informal; Ditjen Pendidikan Dasar; dan Ditjen Pendidikan Menengah.

Kemudian ada lagi aksi demo sekitar 300 guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Seluruh Indonesia dan Federasi Guru Independent Kota Bandung, serta guru honor berunjuk rasa di Balai Kota Bandung, 19 Mei 2010. Mereka menuntut pengangkatan guru honor menjadi PNS, dan guru swasta diupah sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara juga tak luput dari aksi demo para guru. Puluhan guru sekolah yang tergabung dalam Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) menggelar aksi unjuk rasa (21/06) di depan Gedung DPRD DKI menuntut Pemprov DKI agar tidak berlaku diskriminasi terhadap pemberian tunjangan kinerja daerah (TKD) pada para guru di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No.215/2009 tanggal 30 Desember 2009, Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) diberikan berdasarkan jabatan. Untuk jabatan fungsional guru, TKD yang diberikan yakni sebesar Rp2,9 juta per bulan. Pemberian TKD diserahkan setiap tanggal 15 setiap bulannya sesuai dari hasil evaluasi kinerja pegawai bersangkutan. Dalam aksinya, mereka juga menuntut agar tunjangan sertifikasi guru yang belum cair sejak Januari hingga Juni 2010

segera dibayarkan.

Melihat maraknya aksi demo para guru ini belakangan ini, di satu sisi, cukup disayangkan sejumlah pihak. Sebagian masyarakat menganggap guru tidak pantas melakukan demo sebab jika guru turun ke jalan, siapa yang akan memberikan pelajaran kepada anak didik. Lebih dari itu, aksi itu juga dianggap akan menjadi contoh yang kurang baik kepada pelajar. Namun, di sisi lain, aksi demo itu bisa dipahami. Para guru merasa perlu melakukan demo demi anak-anak mereka yang juga berhak mendapat masa depan yang layak.

Menanggapi berbagai aksi demo guru tersebut, pemerintah sudah menjawab dengan beberapa langkah program. Dalam hal peningkatan kesejahteraan misalnya, pemerintah telah menaikkan gaji. Seperti pernah diungkapkan mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, gaji guru dan dosen sudah dinaikkan hingga 50 persen lebih pada 2010. Sebelumnya, juga telah dialokasikan anggaran khusus untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Tidak hanya kepada PNS, pemerintah juga memberikan tunjangan profesi kepada guru dan dosen swasta yang telah disertifikasi yang merujuk pada ketentuan UU tentang pendidikan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 52 Tahun 2009 tentang penambahan penghasilan bagi

guru PNS, yakni tunjangan profesi sebesar Rp 250 ribu per bulan, terhitung mulai Januari 2010. Serta memberikan beasiswa untuk meningkatkan kualifikasi para guru setara S1 dan D4.

Pemerintah juga berkomitmen menuntaskan sertifikasi pendidik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan seluruh tenaga pendidik harus bersertifikat demi menjamin kualitas pendidikan sebagai bagian dari standarisasi untuk meningkatkan kompetensi guru. Terkait hal ini, proses sertifikasi untuk 2,4 juta orang guru se-Indonesia diperkirakan dapat selesai hingga 2015.

Demikian halnya kepada guru yang masih honorer dan guru bantu, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer di sekolah negeri menjadi PNS. Namun realisasi dari PP No.48 inilah yang dinilai para guru honorer sangat lambat sehingga pemerintah didesak untuk menyelesaikan proses pengangkatan para pegawai baik yang lolos verifikasi maupun yang masih tercecer. Menurut data Badan Kepegawaian Negara (BKN) per 14 April 2010, dari 197.690 tenaga honorer yang belum diangkat pada pengangkatan 2005-2009, sekitar 103.869 orang di antaranya adalah guru.

Di sisi lain, pasca dikeluarkannya PP No. 48 tahun 2005, peraturan ini malah melahirkan kecemburuan pada guru swasta. Para guru swasta menganggap keputusan tersebut sebagai tindakan diskriminatif. Mereka berharap, pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk menjamin keberadaan mereka. Mulai dari penetapan upah minimum yang layak maupun tunjangan.

Menanggapi tuntutan itu, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fadli Jalal mengaku bahwa Kemendiknas sedang memperjuangkan agar para guru-guru swasta dapat menerima jaminan kesehatan dan hari tua berupa asuransi yang diberikan kepada guru swasta yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan UU Guru dan Dosen.

Berbagai upaya pemerintah yang disebutkan ini nampaknya belum direalisasikan sempurna. Sebab, aksi demo para guru yang makin marak belakangan ini adalah buah dari janji pemerintah yang tak kunjung ditepati. Mengingat vitalnya fungsi guru dalam mencerdaskan bangsa, sepantasnyalah kesejahteraan guru termasuk guru honorer dan guru sekolah swasta mendapat prioritas perhatian dari pemerintah. Kita juga berharap agar para guru tidak sampai mengabaikan pembelajaran siswanya jika menyuarakan haknya.

■ BI

Buruknya Birokrasi Kita

Kerja yang lamban, kaku, tertutup, dan koruptif masih melingkupi birokrasi di Indonesia.

Persoalan birokrasi di Indonesia sekarang ini ibarat gajah di pelupuk mata yang tidak kelihatan. Karena saking kusutnya, bangsa ini sendiri tidak bisa lagi mengenal, sebelum orang lain mengingatkannya. Hasil survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) baru-baru ini yang menyebut kinerja birokrasi Indonesia merupakan yang terburuk kedua di Asia setelah India, adalah salah satu contohnya.

Buruknya pelayanan birokrasi ini sesungguhnya sudah merupakan penyakit menahun di Indonesia. Sejak zaman Orde Baru hingga Reformasi, berulang kali pemantau internasional menobatkan negeri ini dengan prestasi buruk, namun kinerja aparat penyelenggara negara itu bergeming sedikit pun. Tidak hanya uang negara yang habis untuk membayar upah para pegawai negara itu, harga diri Indonesia juga tercoreng di mata dunia karena ulah para birokrat yang tak becus itu.

Permasalahan birokrasi Indonesia saat ini tidak lepas dari rendahnya kualitas SDM aparat birokrasi; semangat kerja dan kesadaran atas tugas dan tanggung jawab yang rendah; kurangnya pemahaman atas fokus tujuan dari tugasnya; lemahnya fungsi koordinasi; organisasi birokrasi yang sangat gemuk; masih tingginya budaya korupsi; dan pemahaman yang rendah atas tugasnya sebagai pelayan publik.

Sedikit kilas balik birokrasi Indonesia. Pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit misalnya, sudah dikenal konsep birokrasi serta pembagian tugas. Namun demikian, raja masih dianggap yang paling berkuasa dan menentukan.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, seseorang dapat menduduki jabatan pegawai pemerintahan Hindia Belanda harus menjalani magang (pengabdian yang belum digaji) kepada seorang priyayi atasan/pejabat. Dari magang tersebut terjadi hubungan patron-klien, di mana para pemegang akan sabar menunggu sampai diangkat sebagai pegawai, bila perlu mereka akan menjilat, cari muka, dan sebagainya.

Dalam masyarakat yang modern, yakni Indonesia pasca proklamasi, birokrasi menjadi suatu organisasi atau institusi yang penting. Penting karena secara

umum dipahami bahwa salah satu institusi atau lembaga yang paling penting untuk membentuk negara adalah pemerintah, sedangkan personifikasi pemerintah itu sendiri adalah perangkat birokrasinya (birokrat).

Selanjutnya era Orde Baru, birokrasi memainkan peranan yang sangat sentral. Karena dominannya peran birokrasi, maka partisipasi masyarakat terasa kurang berakar atau menjadi "pelengkap" saja. Akibatnya, segala sesuatu saat itu terkesan lamban, kaku, dan tertutup.

Di era reformasi, demokrasi yang merupakan bentuk pemerintahan

birokrasi yang paling efisien di Asia. Kemudian berturut-turut di bawahnya, Thailand, Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Malaysia, China, Vietnam, Filipina, Indonesia, dan India (9,41).

Kegagalan tersebut menurut PERC, selain Indonesia belum bisa meningkatkan efisiensi birokrasi, juga kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menggulirkan reformasi birokrasi yang harus dibayar mahal dengan pengunduran diri Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

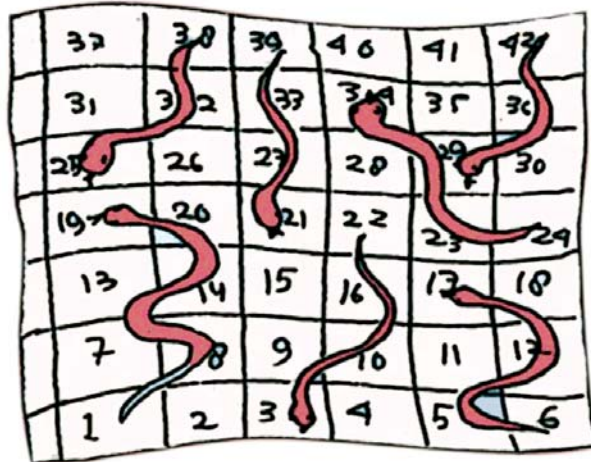
Menanggapi predikat tersebut pemerintah sendiri mengakui telah gagal mereformasi birokrasi. Bahkan, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengusulkan pemangkasan birokrasi dan revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari segi ekonomi, pengamat ilmu administrasi negara yang juga guru besar FISIP UI Eko Prasodjo seperti dilaporkan harian *Media Indonesia* (10/6/2010) memperkirakan, Indonesia mengalami kerugian sekitar 30% dari APBN dan APBD setiap tahun akibat buruknya manajemen birokrasi. Dia mengaku tidak heran pada hasil survei PERC tersebut.

Pendapat lebih tegas disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Menurutnya, semua presiden Indonesia gagal mereformasi birokrasi. "Semua presiden gagal menepati janjinya dalam memperbaiki birokrasi," ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Uji Sahih Buku Ajar Hukum Acara di Jakarta (10/6/2010). Kegagalan tersebut menurutnya, karena instansi-instansi yang ada masih terbelenggu masa lalu.

Melihat persoalan birokrasi sekarang ini, maka jika birokrasi sebagai "alat pemerintah" yang bekerja untuk kepentingan rakyat berfungsi baik, birokrasi seharusnya berada dalam posisi netral. Kalaupun posisi itu tidak dapat sepenuhnya dicapai, paling tidak birokrasi semestinya mempunyai kemandirian sebagai lembaga yang tetap tegak membela kepentingan umum yang lebih meningkatkan diri sebagai "abdi masyarakat".

Sejalan dengan itu, Indonesia harus membangun birokrasinya terlebih dahulu sebelum pembangunan ekonomi dan politik, karena birokrasi merupakan kekuatan utama untuk melaksanakan pembangunan lainnya. Dengan hasil survei PERC baru-baru ini, bangsa ini pun diharapkan bisa tersadarkan bahwa penyakit menahun itu masih ada di hadapan dan perlu pengobatan. ■ HT,JK-BI



yang dicita-citakan di seluruh dunia mulai tumbuh di Indonesia. Seiring dengan itu, birokrasi yang memiliki berbagai macam dasar moral di dalamnya, seperti keyakinan akan nilai dan martabat manusia, kebebasan manusia, adanya aturan hukum yang pasti, asas musyawarah, dan prinsip perbaikan juga mulai tumbuh.

Namun, sifat-sifat dan pemahaman negatif di zaman sebelumnya, seperti lamban, kaku, tertutup, dan koruptif masih tetap tertinggal. Buktinya, seperti disebutkan di atas, birokrasi Indonesia ditempatkan oleh survei PERC sebagai yang terburuk kedua di Asia. Indikasi buruknya birokrasi di Indonesia ini juga ditunjukkan IFC (International Finance Corporation), terutama dalam kemudahan berusaha seperti membuka usaha, mendaftarkan properti, mengakses pinjaman, pembayaran pajak, hingga kepatutan terhadap kontrak kerja.

Menurut PERC, birokrasi di Indonesia tidak efektif, berbelit-belit, dan rawan korupsi. Secara keseluruhan, hasil survei itu menunjukkan Singapura dan Hong Kong sebagai negara dengan sistem



KESETANAN: Walau sudah tak berdaya, seorang petugas Satpol PP DKI Jakarta terus dipukuli saat kerusuhan di Koja, Tanjung Priok (14/04/2010)

Apa yang Salah

Maraknya kekerasan berkelompok diperkirakan akibat lemahnya penegakan hukum dan wibawa aparaturnegara.

Jika dirunut ke belakang, kekerasan atau kerusuhan marak setelah reformasi 1998. Hal itu mungkin terpengaruh atas keberhasilan massa menurunkan Presiden Soeharto dari kursinya. Semakin banyak massa yang dikerahkan, semakin besar pula harapan kalau tuntutan mereka akan dikabulkan.

Fenomena kekerasan beramai-ramai ini sangat terasa belakangan ini. Dalam dua bulan terakhir saja misalnya, di Ibukota Jakarta terjadi dua kekerasan yang melibatkan banyak massa. Pertama, kekerasan di Tanjung Priok pada pertengahan April 2010 yang menewaskan tiga orang Satpol PP dan merusak puluhan kendaraan. Kedua, di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat akhir Mei 2010 yang menewaskan satu orang warga dan merusak puluhan mobil dan rumah.

Mengenai faktor pemicu, jika sebelumnya kekerasan berkelompok ini berkaitan dengan persoalan politik seperti sengketa pilkada atau pilkada, belakangan pemicunya semakin merambah ke persoalan macam-macam, seperti klan, kampung, kerja, bahkan persoalan pribadi.

Di bidang politik, Indonesia yang masih dalam proses pendewasaan demokrasi memang cukup rentan dengan konflik-konflik berkelompok. Misalnya, sebagian masyarakat masih belum terbiasa menerima kekalahan dalam sistem pemungutan suara. Di lain pihak, belum semua masyarakat mau dengan ikhlas menyelenggarakan pemilihan yang jujur. Bahkan,



Mobil polisi dibakar perusuh

beberapa kelompok menganggap kekuatan massa itu juga merupakan bagian dari demokrasi. Peristiwa kekerasan dalam demonstrasi menuntut pembentukan provinsi tapanuli di Medan Sumatera Utara beberapa waktu lalu misalnya, karena pendemo menganggap tuntutan mereka lama direspon DPRD, massa pun melakukan demo kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya ketua DPRD Prov Sumut waktu itu.

Di bidang sosial, seperti bentrok antar-desa, antar-klan ataupun yang lain, pemicunya diduga akibat kesenjangan sosial dan berkurangnya rasa kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Di masyarakat Papua dan Nusa Tenggara Barat, bentrok antar desa atau dusun seperti menjadi bagian dari kehidupan mereka. Fenomena ini diduga karena kurangnya rasa kebersamaan antara warga bertetangga. Demikian halnya di lingkungan kampus, kalangan mahasiswa pun sudah terbawa menyampaikan protes

yang bernuansa anarkis seperti melakukan pengrusakan kampus dan lain sebagainya. Sementara kekerasan yang terjadi di berbagai perusahaan, seperti yang terjadi di Pulau Batam baru-baru ini diduga dipicu oleh kesenjangan sosial antara pimpinan dan karyawan. Sedangkan kekerasan yang terjadi terhadap pemeluk agama, seperti kekerasan terhadap Ahmadiyah, jelas karena kurangnya rasa toleransi di antara pemeluk agama.

Dalam beberapa kasus, bentrok antar dua kelompok masyarakat juga kadang terjadi hanya karena masalah sepele. Dalam kasus bentrok di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng misalnya, bentrokan antara kelompok Betawi dan Madura itu sebenarnya hanya dipicu masalah sederhana, bukan konflik antara dua etnis. Kejadiannya hanya karena ada dua mobil serempetan. Pengemudi sedan Honda Jazz cekcok mulut dengan sopir taxi di dekat lapak milik etnis Madura. Mereka yang terlibat cekcok diminta pergi dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

Ketika meminta menjauh, rupanya ada kata-kata yang dirasakan oleh pengemudi Honda Jazz sebagai pelecehan. Karena tidak terima, malamnya dia kembali bersama beberapa temannya dari organisasi Forkabi. Malam itu, bentrokan pun tak terhindarkan.

Masih banyak lagi contoh kekerasan massa yang sudah terjadi selama ini. Semuanya itu diperkirakan karena masih lemahnya penegakan hukum di negeri ini. Seiring dengan itu, ketaatan hukum sebagian besar masyarakat juga masih jauh dari yang diharapkan. Karena menurut sebagian orang, hukum tidak bisa dipercaya dan dianggap hanya milik orang tertentu saja.

Di samping penegakan hukum, menjamurnya perilaku kekerasan massa ini diperkirakan tidak lepas juga dari merosotnya wibawa aparaturnegara di mata masyarakat. Kemerotan wibawa itu terjadi karena perilaku para elit politik dan penyelenggara dianggap tidak menunjukkan keteladanan.

Seperti pendapat Ketua Setara Institute Hendardi, kekerasan bukanlah konstruksi sosial masyarakat Indonesia. Tetapi buah dari para elit politik dan penyelenggara negara yang gemar melakukan politisasi identitas untuk memupuk dukungan politik publik.

Belajar dari pengalaman berbagai peristiwa kekerasan massa selama ini, sudah seharusnya bangsa ini mereformasi berbagai hal dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di antaranya, melakukan penegakan hukum sesegera mungkin, menegakkan wibawa aparaturnegara dengan menunjukkan keteladanan, dan menanamkan kembali jiwa kebersamaan dan gotong royong kepada masyarakat. ■ **BI**

Sebuah Pertanyaan untuk Anas

Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, bisakah Anas menjadi diri sendiri, lepas dari bayang-bayang kebesaran sosok Yudhoyono?

Kongres ke-II Partai Demokrat (PD) di Bandung 21-23 Mei memutuskan Anas Urbaningrum sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010-2015. Pria kelahiran Blitar 15 Juli 1969 itu menyisihkan dua rivalnya, yakni Menpora Andi Malarangeng dan Ketua DPR Marzuki Ali dalam voting yang berlangsung dua putaran. Pada putaran kedua, Anas dan Marzuki sebagai dua calon peraih suara tertinggi pada putaran pertama, bersaing cukup ketat. Anas akhirnya memenangkan pemilihan dengan meraih 280 suara (53%) sementara Marzuki meraih 248 suara (47%).

Kemenangan Anas ini pun mendapat interpretasi yang berbeda dari pemerhati politik nasional. Ada yang menyebutnya sebagai kemenangan demokrasi internal di dalam PD sehingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Dewan Pembina PD juga patut diberikan acungan jempol karena tidak memihak kepada salah satu calon dan membiarkan proses itu berlangsung secara demokratis, santun, tanpa politik uang dan aman. Ada pula yang menginterpretasikan bahwa Anas hanyalah "etalase demokrasi" yang dibangun kelompok Cikeas agar PD tetap dipandang sebagai partai politik yang demokratis agar tetap laku dipasarkan pada pemilu legislatif 2014.

Terlepas dari interpretasi di atas, umumnya pengamat berpendapat bahwa kemenangan Anas adalah bentuk akomodasi pada kepemimpinan kaum muda. Kemenangan ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan alih generasi kepemimpinan politik nasional termasuk di partai politik.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat misalnya mengatakan, terpilihnya Anas menjadi momentum bagi PD, termasuk partai politik lainnya untuk melakukan alih generasi dalam kepemimpinan partai. Dengan kemenangan itu, PD menurutnya menjadi berbeda dengan partai lain yang umumnya masih dipimpin oleh tokoh lama yang berusia sekitar 60 tahun.

Hal senada dikatakan Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi. Menurutnya, kemenangan Anas merupakan pertanda babak baru kepemimpinan kaum muda



Anas Urbaningrum

menyongsong Pemilu 2014. Sedangkan peneliti senior CSIS, J Kristiadi menilai SBY dan Anas adalah pemenang bersama. "Kita pantas bersyukur, di tengah makin menguatnya politik dinasti dan oligarki partai, muncul tokoh muda yang kokoh dan santun seperti Anas yang perjalanan politiknya masih panjang," kata Kristiadi. Namun menurutnya, Yudhoyono juga menjadi pemenang. Karena masyarakat akan melihat Yudhoyono sebagai demokrat sejati.

Pengamat politik dari UI Boni Hargens, juga memuji PD karena mampu mengakomodasi kepemimpinan kaum muda. Namun demikian, Hargens mencurigai adanya faktor nonrasional yang memengaruhi pemilihan itu.

Selain dari faktor usia, para pengamat juga menganggap kemenangan Anas fenomena politik bersejarah yang menandai mulai pudarnya "politik pencitraan". Karena, Anas melalui jaringan dan pendekatannya yang intens kepada pengurus akar rumput PD, ternyata mampu mengalahkan politik pencitraan besar-besaran yang dilakukan Andi Malarangeng. Mengenai hal ini, Yuddy Chrisnandi mengatakan, dinamika PD mem-

beri pesan, untuk menjadi pemimpin, uang bukan segalanya. Andi Malarangeng sendiri juga mengakui intensitasnya berdialog dengan si pemegang suara (DPC) menjadi salah satu faktor kealahannya.

Selain itu, Ikrar Nusa Bhakti menyebutkan bahwa kemenangan Anas juga menunjukkan betapa gaya "kepemimpinan karismatik" ala SBY mulai usang dan berganti dengan gaya "kepemimpinan sistemik" yang lebih mengandalkan sistem jaringan internal partai seperti yang ditonjolkan Anas.

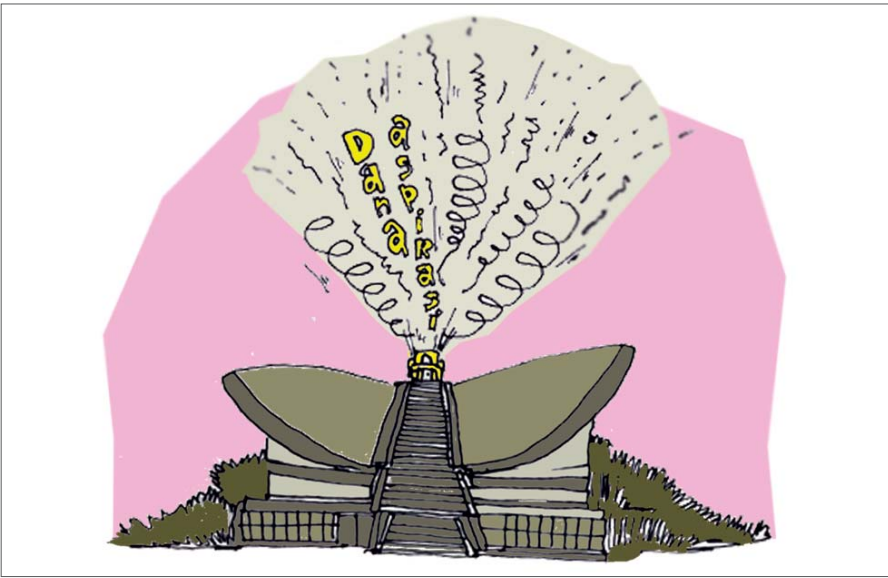
Menurutnya, kekuatan jaringan yang dimiliki Anas dan "operasi kilat" Marzuki Alie yang amat masif tampaknya lebih berhasil ketimbang "politik pencitraan" yang digunakan Andi Malarangeng.

Belakangan kepemimpinan DPP PD juga sudah dilengkap. Putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) terpilih jadi Sekjen PD, dua orang wakil ketua juga terpilih dari kubu Andi dan Marzuki. Kini masyarakat, khususnya kader PD menunggu kiprah pengurus DPP yang baru ini, khususnya Anas. Un-

tuk waktu dekat misalnya, sikap ketua umum partai terbesar ini ditunggu ketika berhadapan dengan mitra politiknya di Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang ketua hariannya dipegang Aburizal Bakrie.

Untuk waktu panjang, mengingat dinamika internal PD selama ini hampir selalu berada di balik bayang-bayang kebesaran sosok Yudhoyono, maka tantangan terbesar Anas ke depan bukan hanya bagaimana mengelola potensi internal partai sambil mengurangi ketergantungan berlebihan terhadap sosok Yudhoyono. Lebih dari itu, Anas dituntut menjadi dirinya sendiri dan tidak sekadar menjadi bayang-bayang Yudhoyono.

Apalagi dalam struktur kepemimpinan PD sekarang ini dikenal adanya majelis tinggi yang anggotanya terdiri dari tiga unsur dewan pembina, yaitu ketua, sekretaris, dan seorang anggota. Lainnya dari dewan pimpinan pusat (DPP), yakni ketua umum, sekjen, direktur eksekutif, bendahara umum, dan dua wakil ketua umum. Sementara tugas majelis tinggi ini juga cukup luas, seperti menentukan calon anggota DPR, calon gubernur yang akan diusung PD, dan kebijakan strategis lain yang bersifat nasional. ■ SIT



DPR Minta Duit Lagi

Bukan DPR namanya kalau tidak buat berita kontroversial. Setelah usul tentang pembangunan gedung baru senilai Rp 1,2 triliun, pengadaan komputer baru, pengadaan TV LCD yang ditaruh di lift, muncul lagi usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar.

Kalau biasanya kontroversi ini dimunculkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) atau Setjen DPR, kini giliran Fraksi Partai Golkar yang melakukannya. Mereka mengusulkan adanya dana pembangunan daerah pemilihan (dapil) senilai Rp 15 miliar per tahun bagi anggota dewan.

Menurut F-PG sebagaimana disampaikan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (6 Juni 2010), dana aspirasi itu dimaksudkan antara lain sebagai respon terhadap aspirasi yang disampaikan konstituen dan untuk pemerataan pembangunan.

Ketua Fraksi Golkar, Setya Novanto mengatakan, Indonesia bukan negara satu-satunya yang mempraktikkan penggunaan anggaran negara bagi dewan untuk diberi ke daerah pemilihannya. Filipina, Afrika Selatan, Swedia, Norwegia, dan Denmark merupakan negara dengan dewan yang memiliki hak mendapatkan anggaran negara bagi kebutuhan konstituen anggota dewannya. Anggota dewan di Filipina bahkan mendapat Rp 60 miliar per orang.

Meski disertai dengan berbagai alasan yang masuk akal, banyak pihak yang keberatan dengan usul itu karena; usulan itu rawan penyalahgunaan; akan memperlebar kesenjangan pembangunan; memperburuk citra wakil rakyat; akan menambah defisit APBN; overlapping dalam pengaturan anggaran negara; dan

melanggar UU.

Fraksi PDI-Perjuangan misalnya, melalui rapat pimpinan fraksi seperti disampaikan Ketua Fraksi PDIP yang juga Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo mengemukakan, karena anggota dewan sudah dibekali dana reses dan dana konstituen untuk menjaga konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, jadi dana aspirasi itu kurang tepat.

Sementara menurut F-PKS, seperti dikatakan Sekjen PKS Anis Matta, dana yang akan dialokasikan itu akan memperlebar kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Sebab, bila dikalkulasikan, mayoritas anggota DPR berasal dari daerah pemilihan di Pulau Jawa. Terdapat 304 legislator dari 560 total anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan di Pulau Jawa. Karena itu, dana aspirasi tidak mungkin memeratakan pembangunan, tapi malah menimbulkan kesenjangan sosial.

Sedangkan menurut Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, usulan dana aspirasi dapil itu tidak mungkin direalisasikan, mengingat defisit APBN tahun ini sudah disetujui Rp 1,7 triliun. Senada dengan itu, anggota Komisi I DPR RI dari F-PD yang juga Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono juga berpendapat bahwa usulan tersebut akan menyebabkan *overlapping* atau tumpang tindih

dalam pengaturan anggaran negara.

Di luar DPR, penolakan juga datang dari berbagai LSM dan pengamat. Sekjen TII Teten Masduki misalnya berpendapat, usulan itu menyalahi prinsip dan filosofi anggaran negara atau APBN. Bahkan menurutnya, kebijakan tersebut melanggar UU yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU 15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, UU no 27 / 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Intinya, UU tersebut menjelaskan lembaga legislatif adalah pengguna anggaran dan bukan pengelola keuangan Negara, bukan pelaksanaan pembangunan, tetapi pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan yang dijalankan pemerintah.

Pengamat politik Andrinof Chaniago juga mengatakan, usulan itu terkesan memaksa. Nominal yang diajukan juga terlihat aneh, karena jumlahnya pukul rata untuk setiap daerah pemilihan. Padahal pembangunan tiap daerah punya anggaran yang berbeda.

Dari peta pro-kontra usulan itu di DPR, jelas terlihat bahwa F-PG hanya berjuang sendiri alias tidak didukung oleh satu fraksi pun. Terkait hal tersebut, F-PG sempat tersinggung karena merasa ditinggalkan teman-temannya yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Parpol Pendukung Pemerintahan. Karena usulan itu menurut F-PG sebelumnya sudah disepakati anggota Setgab lainnya, maka ketika kemudian merasa ditinggalkan, sempat ada wacana dari anggota F-PG akan keluar dari Setgab.

Tapi, pernyataan telah adanya kesepakatan itu langsung dibantah sejumlah anggota Setgab Koalisi lainnya. Wakil Ketua Komisi XI DPR Achsanul Qosasi misalnya, membantah jika pihaknya disebut menarik diri atas usulan itu karena sebelumnya memang belum ada kesepakatan. Belakangan, sebagian fraksi anggota Setgab bahkan sampai merasa perlu membicarakan lebih serius di internal fraksinya tentang polemik keberadaan Setgab serta adanya klaim-mengklaim kesepakatan tersebut.

Meski begitu besar penolakan masyarakat atas usulan ini, F-PG tampaknya belum juga bermaksud menarik niatnya. Terlepas dari apa niatan sesungguhnya dari F-PG, namun melihat berbagai alasan penolakan yang ada, di mana beberapa diantaranya cukup logis dan bijaksana, kita berharap, F-PG rela menghentikan usulan ini. Lebih baik energi anggota dewan digunakan membahas persoalan-persoalan lain yang lebih penting. ■ **BS, BI**



BEBAN RAKYAT: BLT yang dibagikan dan gaji ke-13 PNS, semuanya dibayar dari utang

Pengutang Terbesar Sepanjang Sejarah

Ada predikat baru untuk pemerintahan saat ini, yakni pengutang terbesar sepanjang sejarah RI.

Menurut data Dirjen Pengelolaan Utang Depkeu, utang Republik Indonesia (RI) pada tahun 1998 sebesar 238 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2000, pinjaman untuk BLBI membuat utang RI bengkak menjadi 1234 triliun rupiah. Sedangkan tahun 2004, utang RI sebesar 1300 triliun dan pada Maret 2009 menjadi Rp 1.700 triliun.

Data itu mengartikan bahwa utang RI selama tahun 2000-2004 bertambah 66 triliun, sedangkan tahun 2004-2009 bertambah 400 triliun. Jika dibandingkan dengan utang RI tahun 1998 yang sebesar 238 triliun, maka utang RI Maret 2009, 7 kali lipat lebih besar dari utang RI selama Orde Baru. Bahkan kalau yang dilihat cuma yang diutang selama 5 tahun terakhir, yakni tahun 2004-2009 yang 400 triliun saja, itu pun masih lebih besar dari utang selama 32 tahun Orde Baru yang cuma 238 triliun.

Itu artinya, utang RI selama lima tahun terakhir merupakan utang terbesar sepanjang sejarah republik ini. Dan jika yang dilihat per periodik masa pemerintahan setiap presiden (kecuali masa krisis ekonomi tahun 1998-2000), utang yang dibuat pada masa pemerintahan Presiden SBY tetap yang terbesar.

Masih menurut data Direktorat Jende-

ral Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, nilai utang pemerintah yang jatuh tempo pada tahun 2010 mencapai Rp 116 triliun. Jumlah itu meningkat tajam jika dibandingkan jumlah utang jatuh tempo pada tahun 2009 yang hanya Rp 29 triliun.

Menurut data tersebut, puncak tingginya utang jatuh tempo pemerintah Indonesia akan terjadi pada tahun 2033. Pada tahun tersebut, jumlah utang jatuh tempo mencapai Rp 129 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 127 triliun berasal dari surat utang eks BLBI.

Data ini barangkali sangat kontradiktif dengan pengertian masyarakat awam selama 5 tahun ini. Selama ini, pemerintah dengan bangga selalu menyebut target rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) terus diturunkan. Seperti dikatakan Wakil Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Lukita Dinarsyah Tuo di Jakarta, 22 Januari 2010 lalu misalnya, target rasio utang terhadap PDB yang 30 persen pada tahun 2009 akan terus diturunkan menjadi 24 persen pada tahun 2014. Itu artinya, ketergantungan Indonesia terhadap utang dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin kecil. Menurut Lukita, penurunan rasio utang tersebut sudah

memperhitungkan kenaikan defisit pada APBN setiap tahunnya.

Dalam pengertian masyarakat awam, penurunan ketergantungan itu barangkali dianggap karena pemerintah telah berhasil meningkatkan PDB sekaligus tidak menambah utang baru lagi. Namun kenyataannya, utang yang dibuat pemerintahan sekarang malah yang terbesar dari utang yang pernah dibuat pemerintahan sebelumnya.

Menanggapi pernyataan seperti itu, pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit, Revisond Baswir pernah mengatakan, masalah utang hendaknya tidak direduksi menjadi masalah keuangan dan manajemen. Utang menurut Revisond, adalah masalah sosial politik. Maka pernyataan yang berulang-ulang bahwa rasio utang terhadap PDB turun menuutnya menunjukkan bahwa tim ekonomi pemerintah malas mencari solusi menyeluruh atas masalah utang.

Di samping itu, banyak juga masyarakat yang baru sadar bahwa selama ini ternyata dinobatkan pemerintah dengan penjejasannya yang selalu mengatakan kalau ekonomi Indonesia stabil. Ekonomi Indonesia memang boleh benar stabil, tapi ternyata kestabilan itu berasal dari utang. BLT yang dibagi-bagikan selama ini dan gaji ke-13 PNS ternyata semuanya dibayar dari utang.

Dengan keterbukaan informasi ini, masyarakat baru menyadari bahwa selama ini APBN selalu defisit, sehingga untuk menutupi kekurangan pembiayaan anggaran belanja negara pemerintah belum bisa melepaskan diri dari utang. Yang menjadi pertanyaan sekarang, jika memang masih mengandalkan utang untuk menutupi defisit APBN, kenapa harus membuat program seperti BLT dan gaji ke-13 untuk PNS yang memboroskan keuangan negara.

Melihat kenyataan utang Indonesia ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan jadi bertanggung negatif atas perpindahan mantan Menkeu Sri Mulyani. ICW menduga bahwa kepindahan Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia karena terkait status Indonesia sebagai salah satu negara pengutang terbesar ini.

Melihat besarnya utang yang akhirnya harus dibayar seluruh rakyat ini, kini rasa pesimisme wajar merundung masyarakat. Karena kesejahteraan yang diimpikan selama ini ternyata semakin susah direngkuh. Jika harus memberi saran kepada pemerintah, diharapkan pemerintah tidak lagi mewariskan utang kepada generasi penerus. Untuk menanggulangi defisit APBN, pemerintah juga seharusnya jangan lagi mengandalkan utang, tapi membereskan kebocoran keuangan negara yang dirampok para koruptor.

■ BS, SIT

Piala Dunia 2010 Afrika Selatan

Yang Mereka Jagokan

Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan menyihir jutaan penduduk dunia. Mereka seakan berlomba-lomba menjagokan tim kesayangannya. Tak terkecuali berbagai tokoh publik memberikan komentar mengenai pertandingan Piala Dunia 2010. Bagaimana dengan orang nomor satu di kepolisian? “Belanda,” ucap Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di Gedung PTIK (10/6), ketika dita-

nya tim nasional negara mana yang dia jagokan. Sedangkan mantan Kabareskrim, Komjen Susno Duedji yang kini mendekam di balik jeruji besi di rumah tahanan Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok menjagokan tim nasional Inggris dan Brasil pada Piala Dunia di Afrika Selatan. Salah satu pilihan Susno ini sama dengan pilihan Menteri Perekonomian Hatta Rajasa yang menjagokan Inggris.

Sementara pilihan yang ber-

beda datang dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Menurutnya kans paling kuat untuk menjuarai Piala Dunia 2010 kali ini adalah Afrika Selatan. Agus mengatakan, Afrika Selatan mempunyai peluang besar karena seperti Argentina pada waktu menjadi tuan rumah ternyata bisa memegang trophi tersebut. Sedangkan Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan menjagokan Brazil dan Jerman dalam piala dunia kali ini.



Anies mengaku pecandu sepakbola, dia berharap final Piala Dunia 2010 kali ini mempertemukan kedua tim kesayangannya itu. “Untuk final impian Brazil lawan Jerman? Amiiinnn...,” pungkasnya. ■

Alwi Shihab

Alumnus Terbaik Universitas Temple

Mantan menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini menerima Distinguished Alumnus Award 2010 di Universitas Temple, Philadelphia, Amerika Serikat akhir Mei lalu. Alwi dianggap berhasil merepresentasikan Department of Religion Universitas Temple dengan gemilang ke dunia luar.

Prestasinya tak hanya dalam karier akademis, tapi juga kiprah Alwi dalam politik di Indonesia dan di dunia internasional. Penghargaan ini

membuatnya seajar dengan akademisi dunia, seperti Jhon Esposito yang juga alumnus terbaik universitas itu.

Pria kelahiran Rappang, Sulawesi Selatan, 19 Agustus 1946, ini mengatakan bahwa penghargaan itu akan berdampak positif bagi pencitraan Indonesia di mata dunia. “Penghargaan dari luar negeri, apa pun bentuknya bagi warga negara adalah penghargaan bagi bangsa Indonesia.”

Mantan ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyelesaikan studi doktoral-



nya di Universitas Temple pada 1995. Selain dari Universitas Temple ia juga meraih gelar doktor dari Universitas Aynu Syam Mesir. Studi Post-Doctorate-nya diraih di Harvard University sebelum menjadi staf pengajar di Hartford Seminary, Connecticut, AS, 1996-1997, dan di Harvard Divinity School pada 1998. ■

Khofifah Indar Parawansa

Melawan Lewat Buku

Khofifah Indar Parawansa, meluncurkan buku Khofifah Melawan Pembajakan Demokrasi (30/5). Buku ini berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Timur pada 2008. Ia mengaku menjadi korban kecurangan dalam pemilihan itu. Ia tak hendak menyesali kealahannya itu. Tapi, ia menegaskan perlunya perlawanan terhadap segala bentuk pencederaan demokrasi. ■

Christine Hakim

Merasa Malu

Video porno yang diduga diperankan Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari membuat malu aktris senior Christine Hakim. “Video porno yang diketahui publik telah membuat Indonesia malu. Saya sebagai duta kebudayaan Indonesia jika ke luar negeri, belakangan sering ditanya, Indonesia berpenduduk mayoritas muslim, kok, punya artis video porno?” kata Christine. Untuk itu, dirinya sangat berharap kasus Ariel, Luna, dan Cut Tari diambil hikmahnya. Dia meminta para selebriti harus bersikap rendah hati dan jangan sampai lupa diri jika sudah merasa terkenal. Palsanya, karena sudah merasa terkenal, penggemar banyak, lalu lupa diri. Tidak saja menjadi sombong, angkuh, tetapi juga lupa kepada Sang Pencipta. “Lupa kepada Tuhan. Jika sudah begitu, maka dia akan menghalalkan segala cara,” ujarnya di Jakarta. ■



Jero Wacik

Mengaku Bangga

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik mengaku bangga kepada sineas perfilman yang bisa menyuguhkan film berkelas yang disenangi penonton namun bisa membangkitkan kecintaan terhadap tanah air.

Seperti film Red Co. Bex yang mengangkat keragaman budaya yang bisa menyatu untuk menegaskan kebenaran. Untuk memancing mutu film nasional semakin baik, pria berkacamata itu mengajak warga Indonesia untuk beramai-ramai membeli tiket di bioskop yang menyuguhkan film-film nasional yang bermutu. ■



Indonesia Cerdas

Al-Zaytun Sumber Inspirasi, Bagian Ketujuh

Oleh Ch. Robin Simanullang

Pengantar:



Indonesia Cerdas dan Kuat menjadi tema pokok dari rangkaian tulisan 'Al-Zaytun Sumber Inspirasi' dalam seri berikut ini. Tema ini ditinjau dalam beberapa aspek, baik geografis, SDA dan SDM

(demografi dan pendidikan) maupun ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Tentu saja merupakan kelanjutan dari tema sebelumnya, terutama Bagian Keenam tentang ideologi negara di bawah judul: *Al-Zaytun dan Lima Nilai Dasar Negara*.

Bagian Ketujuh ini merupakan prolog *Indonesia Cerdas dan Kuat*, memaparkan bagaimana Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang menginspirasi setiap orang untuk memusatkan perhatian pada proses pencerdasan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, ditinjau dari beberapa aspek tersebut di atas dengan menempatkan kebijakan perbaikan pendidikan (politik pendidikan) sebagai jalan utama.

Sebagian dari aspek-aspek ini memang sudah pernah dipaparkan dalam seri (bagian sebelumnya) tetapi dalam perspektif lain. Seperti, pada Bagian Dua (Edisi 62), 'Toleransi Sebagai Akidah' yang tentu sangat menyatu dengan 'Pelangi Keberagaman' yang akan diuraikan dalam seri berikutnya berkaitan dengan aspek sosial budaya; dan pada Bagian Tiga (Edisi 65), 'Laboratorium Indonesia Kuat' sangat menyatu dengan tema pokok 'Indonesia Cerdas dan Kuat.' Namun, pemaparan dalam konteks 'Indonesia Cerdas dan Kuat' kali ini lebih dipandang dari perspektif pendidikan, yang merupakan tugas dan fungsi pokok lembaga pendidikan Islam modern Al-Zaytun yang dikelola oleh Yayasan Pesantren Indonesia di bawah pimpinan Syaykh Abdusalam Panji Gumilang.



Syaykh al-Zaytun AS Panji Gumilang adalah seorang cendekia (cendekiawan) yang mengabdikan diri dalam jalur pendidikan (pemangku pendidikan). Dia seorang syaykh' (guru besar) yang amat gigih mendorong, mewujudkan dan menginspirasi agar bangsa ini lebih cerdas dan arif dengan pengutamaan perbaikan pendidikan, supaya terwujud Indonesia yang cerdas dan kuat.

Sebagai seorang cendekia² (cendekiawan) atau intelektual, Syaykh Panji Gumilang memiliki ketajaman berpikir secara sistematis (pemikir) dan bersikap terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya (intelektualisasi) untuk menggagas, mengkaji, menganalisis, merumuskan (solusi)

¹ **Syaykh (Syekh)** adalah gelar kehormatan bagi tetua, pemimpin, ulama besar dan guru besar yang alim, arif-bijaksana, berwawasan luas dan mumpuni dalam bidangnya. Kini dalam dunia akademik, sebutan Syaykh (Syekh) juga digunakan untuk rektor atau guru besar, seperti Syekh al Jami 'al Azhar (Rektor Universitas al Azhar) di Kairo, Mesir. Seperti halnya lembaga pendidikan Islam Al-Zaytun, menyebut Syaykh bagi pemimpinnya, Syaykh al-Zaytun.

Kata Syaykh, dan varian lainnya Syaikh, Shaikh, Syekh, Sheikh, Sheyh, Šeih, Šejh, Seyh dan shuyûkh adalah berasal dari kata atau istilah kehormatan dalam bahasa Arab yang secara harfiah berarti 'tetua', seorang penatua atau orang tua yang dihormati. Hal ini umumnya digunakan untuk menunjuk seorang tetua dari suku, seorang bijaksana yang dihormati, atau sarjana Islam. Meskipun sebutan ini umumnya mengacu pada seorang laki-laki, namun dalam jumlah yang sangat kecil syaykh perempuan juga ada dalam sejarah, lazim juga disebut syaykah. Syaykh juga dipakai sebagai panggilan kehormatan untuk seorang pemimpin atau yang mulia, terutama di Semenanjung Arab sebagai pemimpin suku tradisional. (<http://en.wikipedia.org/wiki/Sheikh> dan <http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Shaiikh/> dan *Ensiklopedi Islam*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Pusat Bahasa Depdiknas (2008) kata Syaikh, Syekh diartikan sebagai 1) kata sapaan kepada orang Arab (terutama orang Arab keturunan sahabat Nabi); 2) kata sapaan kepada orang Arab yang berasal dari Hadramaut; 3) ulama besar: syekh jemaah, maulim (pemimpin) orang-orang yang naik haji.

² **Cendekia** berasal dari kata *Chanakya* (Sansekerta), nama seorang penasihat dan perdana menteri pertama di Kekaisaran Maurya (340-293 SM) yang didirikan Chandragupta. Di dunia Barat, Chanakya disebut sebagai *The India Machiavelli* meskipun karya-karya Chanakya jauh lebih awal (sekitar 1.800 tahun) mendahului Machiavelli. Chanakya, seorang arsitek kepala yang karena keahliannya dan kecerdasannya naik ke puncak kekuasaan dan telah dianggap sebagai pelopor bidang ekonomi dan ilmu politik. (Kulke, Hermann; Rothermund, Dietmar (1998) [1986]. *A History of India (Third Edition)*. London: Routledge, ISBN 0-415-15481-2, p. 59)

dan Kuat



Syaykh Al-Zaytun: Bangsa yang arif akan memilih jalan pendidikan secara mutlak bagi bangsanya.

suatu atau berbagai masalah dan menyumbangkannya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kepentingan pencerdasan bangsa.

Dalam pandangan Syaykh al-Zaytun, bangsa yang arif akan memilih jalan perbaikan pendidikan secara mutlak bagi bangsanya. Sebab bangsa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, 2008, C, hlm.258, *cendekia*, diartikan 1) tajam pikiran, lekas mengerti (kalau diberitahu tentang sesuatu), cerdas, pandai; 2) cepat mengerti situasi dan pandai mencari jalan keluar (pandai menggunakan kesempatan), cerdik; 3) terpelajar, cerdik pandai, cerdik cendekia, kaum cerdik. Sedangkan orang cerdik pandai, disebut *cendekiawan*. *Cendekiawan* juga diartikan 1) orang intelek; 2) Orang yang memiliki sikap hidup yang terus-menerus meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk dapat mengetahui atau memahami sesuatu.

yang cerdas³, terdidik atau berkecerdasan pasti akan menjadi bangsa yang kaya dan sejahtera, bangsa yang amanah dan terhormat, dan bangsa yang dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi pencerahan dunia masa depan.

Bangsa (orang) terdidik atau berkecerdasan adalah mereka yang sanggup menyukuri nikmat Tuhan yang selalu diberikan kepadanya. Yang dalam visi Syaykh al-Zaytun, itulah budaya baru Indonesia yang harus diwujudkan dan itu juga yang dia maksudkan dengan *kontrabudaya*. Yakni melalui pendidikan kita wujudkan: Indonesia

³ **Cerdas**, berarti: 1) sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti dan sebagainya); tajam pikiran: sekolah bertujuan mendidik anak-anak agar menjadi orang yang cerdas lagi baik budi; 2) sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat).



SYAYKH AL-ZAYTUN: Budaya baru Indonesia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bagi pencerahan dunia masa depan.

yang Cerdas, Indonesia Toleran, Indonesia Damai, dan Indonesia Cinta Hukum.

Indonesia yang cerdas yang kita maksudkan dalam konteks ini adalah bangsa (rakyat) yang sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikirannya dan baik budinya serta sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat) untuk berpikir, visioner, mengerti, bertindak, berkarya dengan etos kerja tinggi, berdisiplin dan berorientasi pada dunia ilmu pengetahuan demi kesejahteraan rakyat dan kejayaan bangsa dan negaranya.

Kecerdasan yang meliputi kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional yakni kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antarsesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar; Kecerdasan intelektual yakni kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain; Kecerdasan spiritual yakni kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antarsesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa.

Pemahaman ini, kita maknai dari tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan Pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial; berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dalam konteks ini, Al-Zaytun sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam modern namun bersempangat pesantren di bawah pimpinan Syaykh AS Panji Gumilang, tentu lebih berperan dalam tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang justru dipandang sebagai jalan utama menuju pencapaian tujuan-tujuan negara lainnya yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Menurut Syaykh Panji Gumilang⁴, lemahnya pendidikan suatu bangsa akan mengakibatkan kelemahan ekonomi, politik dan persatuan bangsa itu. Kelemahan produktivitas pengetahuan suatu negara (institusi) lebih dari apapun yang lain, merupakan pangkal dari kelambanan, erosi dan krisis yang tak berkesudahan pada sosial ekonomi negara. Kita di Indonesia jelas pengeluaran untuk

⁴ Syaykh al-Zaytun Dr. Abdussalam Rasydi Panji Gumilang. Pidato Penghargaan *Doctor Of Management in Education and Human Resources Development* dari International Management Centres Association (IMCA) Buckingham, United Kingdom & Revans University, The University of Action Learning at Boulder Colorado, United States of America, hari Sabtu, 24 Mei 2003 M - 23 Rabi' al-Awwal 1424 H.

produktivitas pengetahuan jauh lebih rendah dari pengeluaran lain-lainnya. Syukur dalam beberapa tahun terakhir ini telah diamanatkan dalam konstitusi tentang anggaran pendidikan sebesar 20% dari keseluruhan anggaran belanja negara.

Itulah sebabnya, menurut Syaykh Panji Gumilang, sehingga dalam segala bidang produktivitas pengetahuan di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara manapun. Akibatnya, bangsa kita juga belum mampu masuk ke dalam produktivitas pengetahuan baru, bahkan gagal sekalipun hanya untuk mengubah pengetahuan yang telah ada menjadi inovasi yang berhasil, pengetahuan yang ada tetap merupakan informasi dan bukannya menjadi pengetahuan yang produktif.

Mestinya, kata Syaykh Panji Gumilang, kita tidak usah takut menjadi modern, menjadi "terwesternisasi" dalam ekonomi, teknologi, institusi-institusi politik dan kemiliterannya asalkan kita (khususnya ummat Islam tetap menjadi muslim yang taat) dan Indonesia yang utuh.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia kepada pergaulan dan percaturan politik antar-bangsa. Namun, dalam percaturan politik antar-bangsa belakangan ini, Indonesia tidak banyak tampil berkesan. Hal ini menurut Syaykh Panji Gumilang, disebabkan berbagai krisis yang melanda di dalam negeri, baik ekonomi, keamanan, dan lain-lain (multidimensi). Daya saing sumber daya manusianya pun belum dapat diandalkan, memandangkan kualitas pendidikan yang dimiliki masih terus menjadi bahan diskusi. Semua itu merupakan pengalaman yang tidak mengenakan namun harus dapat dijadikan pendorong untuk maju ke depan.

Padahal Indonesia, dilihat dari berbagai potensi yang dimilikinya, baik potensi geografis, potensi sumber daya alam (SDA) maupun potensi sumber daya manusia (SDM), sudah sepatutnya Indonesia menjadi sebuah negara besar yang berkemampuan memberi kontribusi besar dalam percaturan kehidupan dunia. Lalu kenapa Indonesia masih tergolong miskin dan terpuruk?

Ditinjau dari sudut pandang geografi⁵ (ilmu bumi) yang bertujuan⁶ untuk memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dunia (bumi) di mana kita hidup, bahwa letak geografis Indonesia berada dalam posisi silang yang sangat strategis, yakni selain berada dalam garis khatulistiwa juga



Lemahnya pendidikan suatu bangsa akan mengakibatkan kelemahan ekonomi, politik dan persatuan bangsa itu. Tampak dalam gambar bursa buku murah.

diapit dua benua (Asia-Australia dan dua samudera (Indonesia dan Pasifik).

Posisi silang ini tidak saja strategis secara fisik geografis, tetapi juga ideologis, politis, sosial-ekonomis, militer dan demografis. Syaykh AS Panji Gumilang sependapat dengan Hasnan Habib (1970)⁷ yang berpandangan bahwa hanya ada dua alternatif bagi bangsa yang berdiam di posisi silang seperti Indonesia, yakni: 1) harus kuat dan *survive*; atau 2) tenggelam dilanda oleh lalulintas yang lebih kuat. Untuk bisa kuat, Hasnan Habib lebih menekankan pada diperlukannya integrasi nasional, sementara Syaykh Panji Gumilang lebih menekankan pada perbaikan pendidikan sebagai jalan utama.

Menurut Syaykh al-Zaytun, dengan potensi ini, kita dapat meletakkan visi untuk Indonesia masa depan agar dapat bangkit, berdiri sama tinggi dan

⁵ **Geografi** adalah ilmu tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan (variasi) keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *gê* (bumi) dan *graphein* (menulis atau menjelaskan). Geografi juga merupakan nama judul buku terkenal dan bersejarah yakni *Geographia* tulisan Klaudios Ptolemaios, pada abad kedua.

⁶ **George B. Cressey**, seorang ahli ilmu bumi kenamaan berpendapat bahwa tugas pokok geografi adalah untuk mengumpulkan keterangan (data) dari berbagai sumber yang terpencah-pencar untuk kemudian dirangkai menjadi satu kelompok keterangan yang secara khusus bertujuan untuk memberikan pengertian tentang sesuatu wilayah tertentu. (George B. Cressey: *Asia's Land and Peoples*, McGraw-Hill Book Company, Inc., New York, 1944-1945, hlm.34-35)

⁷ **Hasnan Habib**, *Wawasan Nusantara dan Hubungannya dengan Ketahanan Nasional*, 1970, Bunga Rampai Ketahanan Nasional, Himpunan Lemhannas, 1980, hlm.101.

didukung sama rendah di tataran dunia antarbangsa. Membangkitkan Indonesia dari keterpurukan adalah mutlak melalui perbaikan kualitas bangsa, tak ada jalan lain hanya melalui peningkatan pendidikan.

Jika lebih dipertegas, pandangan Syaykh al-Zaytun ini menekankan pada pendekatan politik pendidikan sebagai jalan utama dalam rangkaian kebijakan geopolitik dan geostrategis Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan (nusantara) atau archipelago⁸.

Di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih kurang 17.508 pulau, dan sekitar 6.000 di antaranya merupakan pulau yang dihuni 240 juta penduduk. Luas total daratan 1.922.570 km² (daratan non-air: 1.829.570 km² dan daratan berair: 93.000 km²) dan luas lautan 3.257.483 km². Ada juga yang mencatat luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km², atau mendekati 70% dari luas keseluruhan luas negara Indonesia. Juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai yang ada di seluruh dunia.

Di samping itu, Indonesia sebagai negara tropis

⁸ **Archipelago**, negara kepulauan, adalah sebuah rangkaian atau sekelompok pulau yang terbentuk secara tektonik. Kata archipelago berasal dari Yunani arkhi, berarti kepala dan pelagos berarti laut. Di Italia, mengikuti tradisi kuno, archipelago mengacu pada Laut Aegean, yang kemudian penggunaan bergeser pada Kepulauan Aegean. Sekarang istilah archipelago umumnya digunakan untuk kelompok pulau yang dikelilingi laut atau laut yang di dalamnya terdapat sejumlah pulau, seperti Laut Aegea.

yang berada pada koordinat geografis 6°LU - 11°08'LS dan dari 95°BT - 141°45'BT dan berlokasi sebelah tenggara Asia, di Kepulauan Melayu (Nusantara) antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, hanya memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kering. Juga ekosistem di laut Indonesia sangat bervariasi, yang sangat menopang kehidupan dari sekian banyak spesies di dalamnya. Di samping perut bumi (laut dan daratan) Indonesia menyimpan sumber daya alam yang amat kaya. Serta luas wilayah udara yang amat luas dan strategis.

Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, kaya sumber daya alam dan berpenduduk 240 juta jiwa itu, menurut pandangan Syaykh al-Zaytun harus dengan cerdas dijadikan sebagai sesuatu kekuatan dalam menentukan arah kebijakan geopolitik dan geostrategi dalam visi wawasan nusantara.

Geopolitik⁹ yang dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara di mana setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah suatu bangsa; dan, Geostrategi yang merupakan suatu strategi memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional (pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewu-

⁹ **Geopolitik** secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yakni kata geo yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup; dan polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara; dan teia yang berarti urusan (politik) bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa.



KAMPUS AL-ZAYTUN: Indonesia yang kaya sumber daya alam dan penduduk harus dengan cerdas dijadikan sebagai sesuatu kekuatan dalam membuka arah kebijakan



WAWANCARA SYAYKH AL-ZAYTUN: *Indonesia yang cerdas adalah rakyat yang sempurna perkembangan akal budinya, tajam pikirannya, baik budinya serta sempurna pertumbuhan tubuhnya*

judkan tujuan politik); serta Wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, sebagai aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

Oleh Syaykh al-Zaytun, ketiga hal itu (geopolitik, geostrategis dan wawasan Nusantara) harus diperkuat dengan pengutamakan pencerdasan bangsa melalui pendidikan. Sehingga semakin banyak orang (warga negara) yang memiliki kecerdasan dalam memahami, menyikapi dan menjalankannya.

Geopolitik dan geostrategi Indonesia yang dilandasi perbaikan pendidikan sebagai jalan utama akan mencerdaskan setiap warga bangsa dalam cara memandang, cara memahami, cara menghayati, cara bertindak, berfikir dan bertingkah laku dalam berbagai aspek (geografis, SDA dan SDM, ideologi, politik, sosial-ekonomi dan pertahanan keamanan) dan bermuara kepada Indonesia yang cerdas dan kuat atau ketahanan nasional yang cerdas dan kuat.

Secara khusus, Syaykh Panji Gumilang memberi perhatian serius pada sumber daya manusia (insani) yang berjumlah sekitar 240 juta jiwa (perkiraan Sensus Penduduk 2010). Dalam pengamatannya, jumlah sumber daya insani yang harus mendapatkan perhatian serius ternyata sangat signifikan jumlahnya, yakni mencapai hampir 65% (Persentase pembagian umur (sensus 1990): 0-14=36,6%; 15-29=28,3%; 30-44=18,1%; 45 -59= 10,6%; 60-74=5,2%; >75= 1,1%).

Menurutnya, jika Indonesia gagal menata generasi angkatan pertama dan dua ini (0-14 tahun dan 15-29 tahun), sudah barang pasti 20 tahun mendatang nasib bangsa Indonesia tidak dapat dibayangkan betapa nistanya di pergaulan antarbangsa, atau mungkin Indonesia hanya akan menjadi kenangan. Namun jika pendidikannya ditangani secara tepat dan serius, maka kegemilangan Indonesia akan menjadi kenyataan.

Visi Kontra Budaya

Syaykh al-Zaytun berpendirian teguh bahwa melalui pendidikan yang benar dan tepat, budaya baru Indonesia dapat ditumbuhkan. Dia berpandangan bahwa budaya Indonesia hari ini, cenderung tidak dapat bersatu, tidak mempunyai etos kerja yang tinggi, tidak mandiri dalam membangun diri, kurang berorientasi pada ilmu pengetahuan, sumber daya tenaga kerja lemah dan rendah, tidak produktif, dan sebagainya. Semuanya itu merupakan indikator kemunduran kualitas bangsa (umat). Karenanya, menurut Syaykh, harus diciptakan kontra budaya, dan sekali lagi jalan satu-satunya adalah pendidikan.

Bangsa Indonesia harus sanggup menyisihkan segala yang dimiliki untuk mendidik bangsa. Memang terasa aneh, berbangsa dan bernegara kok hanya berbicara pendidikan. Bagi kelompok yang berpikir instan, memang hal itu merupakan keanehan, namun bagi bangsa yang berpikir kebaikan masa depan bangsanya yang hari ini sedang sengsara dilanda keterpurukan, maka perkara itu bukan merupakan hal yang aneh.

Bangsa yang arif, menurutnya, akan memilih jalan perbaikan pendidikan secara mutlak bagi

bangsanya, sekalipun hasil yang akan diraihinya menunggu waktu yang sangat lama. Namun bila dilaksanakan dengan tekun dan penuh kesabaran, hasil yang diidam-idamkan, yakni kesejahteraan dan perubahan budaya dari budaya negatif menjadi budaya positif sudah pasti akan dirasakan. Masa 20 tahun memang panjang, namun masa menunggu perubahan budaya yang diakibatkan perbaikan pendidikan akan dapat dirasakan walau sebelum 20 tahun.

Dia berkeyakinan, kelak jika pendidikan dibangun dengan serius, budaya bangsa Indonesia akan menjadi cinta kesatuan dan persatuan karena manusia terdidik yang baik akan mendahulukan urusan kebersamaan (kekitaan) dari pada urusan pribadi dan golongannya. Manusia terdidik dengan baik akan bersikap mendahulukan kepentingan bangsa dan negaranya. Bangsa yang terdidik individu-individunya akan mempunyai etos kerja yang tinggi, karena semua yang mereka lakukan berdasar kalkulasi riil. Bangsa yang terdidik dengan baik akan menjadi bangsa yang mandiri.

Kemandirian, selalu mendapat penekanan khusus dari Syaykh al-Zaytun. Tidak hanya dalam kata atau tausiyah, tetapi dalam praktek pengelolaan Al-Zaytun. Dia juga selalu merasa prihatin tatkala melihat kebijakan yang diambil pemerintah yang sampai hari ini masih sangat gemar dan bangga mengandalkan utang. Dia tidak mempersoalkan apakah kegemaran dan kebanggaan berutang itu sebagai jalan ekonomi neoliberal atau tidak. Yang dia prihatinkan adalah kecerdasan

bangsa ini, mulai dari pemimpin sampai rakyat paling jelata, yang lebih suka mengambil jalan pintas, instan.

Itulah sebabnya, pendiriannya amat teguh bahwa jalan utama untuk kebangkitan bangsa ini adalah perbaikan pendidikan. Dia berkeyakinan, jika bangsa ini semakin cerdas, maka tatkala mereka berkepentingan dengan bangsa lain, mereka akan mampu merumuskan dengan produk yang mereka hasilkan dan bukan mengandalkan utang, karena sesungguhnya kehidupan ini saling ketergantungan.

Menurut Syaykh al-Zaytun, Bangsa yang terdidik dengan baik, akan dapat: *Pertama*, menyumbangkan ilmu pengetahuan bagi pence- rahan dunia masa depan, bersama-sama bangsa-bangsa dunia lainnya, sehingga mampu berinteraksi ilmu pengetahuan dan teknologi di tataran antarbangsa; *Kedua*, mempunyai tenaga kerja yang kuat dan produktif, karena lapisan dasar tenaga kerjanya terdiri dari sumber daya yang pengetahuannya sesuai dengan pekerjaannya;

Ketiga, akan menjadi bangsa yang amanah dan terhormat sehingga tanpa diminta, bangsa lain akan menghormatinya, dan mereka akan berhitung seribu kali jika akan mengambil kebijakan yang tidak tepat kepadanya, apalagi menghinanya; *Keempat*, akan menjadi bangsa yang kaya dan sejahtera, karena mereka sanggup bersyukur nikmat Tuhan yang selalu diberikan kepadanya.

Keempat hal itulah, budaya baru Indonesia yang harus diwujudkan dan itu juga yang dia



Letak geografis Indonesia berada dalam posisi silang yang sangat strategis.

Base: 802899AI (C00429) 11-02



TAUSIYAH SYAYKH AL-ZAYTUN: Geopolitik, geostrategis dan wawasan Nusantara harus diperkuat dengan pengutamakan pencerdasan bangsa melalui pendidikan.

maksudkan dengan kontraduk budaya itu: Indonesia Cerdas, Indonesia Toleran, Indonesia Damai, dan Indonesia yang Cinta Hukum.

Jika seperti itu kontraduk budaya yang kita ciptakan melalui budaya baru Indonesia, maka menurut Syaykh Panji Gumilang, kebangkitan dunia Islam melalui dan dimulai dari Indonesia (kata banyak orang) bukan merupakan hal yang mustahil. Oleh karenanya, dia selalu mengajak seluruh civitas akademik Al-Zaytun dan para sahabatnya, sebagai sebagian kecil dari bangsa Indonesia harus memulai ke arah itu. Dia mengajak dan menginspirasi semua orang supaya mengatakan dengan bahasa lisan, mulai melangkah membangun dan merealisasikan visi budaya baru Indonesia (kontraduk budaya).

Syaykh al-Zaytun bersama seluruh komponen Al-Zaytun yang berlokasi di desa yang jauh dari keramaian, telah terbukti mengubah suatu paradigma bahwa: "hanya kotalah yang mampu mewujudkan fasilitas pendidikan yang memadai." Ternyata desa jika ditata dan di-*manage* dengan amanah dan jujur perkembangannya jauh lebih cepat dari pada kota yang tidak berbudaya.

Maka dalam hal kebijakan dan anggaran pendidikan nasional, Syaykh al-Zaytun berpesan agar jangan dibedakan antara pendidikan di kota maupun di desa, serta anggaran untuk sekolah negeri atau swasta.

Kadang-kadang pengamat mengatakan bahwa antara daerah dan kota itu mesti dibedakan. "Itulah yang mesti tidak ada beda, tidak boleh," tegasnya. Menurutnya, membedakan daerah yang terpencil dengan daerah kota, itu bahaya. Mestinya yang terpencil itulah yang diberi suatu

tekanan atau aksentuasi, baik pendekatan maupun sarana dan lain-lain sebagainya. Jadi rasanya tidak arif kalau harus dibedakan.

Al-Zaytun yang berada di desa, paling jauh dari kota, paling sepi, paling hutan, paling tidak ada jalan, telah terbukti menjembatani antara perbedaan kualitas pendidikan di desa dan di kota.

Begitu pula mengenai sekolah negeri dengan sekolah swasta, tidak perlu ada pembatasan. Amanat Undang-Undang Dasar negara mengenai anggaran belanja negara bidang pendidikan 20 persen, tidak pakai dibatasi negeri dan swasta. Mestinya semuanya ini harus berimbang. Swasta, yang didirikan tanpa dana pemerintah itu malah harus dipandang sebagai menguntungkan negara. "Maka dalam penggunaan anggaran negara yang 20 persen tadi mestinya tidak pakai dibatasi swasta maupun negara," kata Syaykh Panji Gumilang dalam wawancara dengan TokohIndonesia.com dan Majalah Berita Indonesia.

Syaykh al-Zaytun juga tidak sepaham dengan penggunaan istilah pendidikan gratis. Menurutnya, jangan dikatakan pendidikan gratis. Tapi pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Namun yang terpenting adalah bagaimana kebijakan membangun pendidikan yang baik dan modern. Apakah itu di desa maupun di kota, dilaksanakan oleh negara maupun swasta, tidak dibiayai negara maupun dibiayai sepenuhnya oleh negara.

Pendidikan Modern

Membangun pendidikan yang baik, menurut Syaykh Panji Gumilang, berarti mendidik berorientasi masa kini dan masa depan. Itu pula yang

dinamakan modern. Karenanya pendidikan modern tidak dapat difasilitasi dengan fasilitas yang tidak mempunyai nilai kekinian. Fasilitas modern bukan terbatas hanya dalam bidang fisik, namun segala yang memenuhi persyaratan modern.

Dalam pandangan Syaykh al-Zaytun, pendidikan modern bermakna 1) visioner, 2) berprogram jelas, 3) berorientasi ilmu pengetahuan, 4) berdisiplin dan 5) etos kerja. *Pertama*, visioner. Karenanya visi pendidikan mesti diarahkan kepada kebangkitan Indonesia yang dapat berdiri sama tinggi duduk sama rendah di tataran antarbangsa.

Kedua, program jelas. Program pencapaian pendidikan Indonesia harus diarahkan membangkitkan bangsa Indonesia menjadi setara dengan bangsa-bangsa lain dalam segala bidang dan aspek kemajuan dan perkembangan bangsa-bangsa menjadi bangsa yang arah berpikirnya berwawasan antarbangsa.

Ketiga, berorientasi pada dunia ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Sebab budaya Indonesia ke depan adalah ditentukan oleh hasil pendidikan yang berorientasi ilmu pengetahuan yang tak kunjung henti, ilmu pengetahuan yang tidak pernah kenal titik berhenti.

Keempat, disiplin. Pendidikan modern harus mempunyai sarana disiplin. Dalam kehidupan modern, disiplin merupakan sesuatu yang mesti diwujudkan. Disiplin bukan milik kalangan militer atau sipil, semua bangsa modern pasti konsisten dengan disiplin. Bangsa akan hancur jika disiplin dipelekan dalam kehidupan kesehariannya.

Disiplin inilah yang akan mengantarkan suatu bangsa akan kenal prosedur hidup bermasyarakat dan berbangsa. Disiplin pula yang akan membawa bangsa akan mencintai kehidupan bertata hukum yang rapi. Masyarakat atau bangsa yang berdisiplin sebagai cermin masyarakat yang dapat menghormati hukum dan menegakkannya dalam tatanan hidup kesehariannya, baik untuk dirinya maupun masyarakat dan negaranya.

Kelima, etos kerja. Dalam kehidupan pendidikan modern, diperlukan sarana yang dapat membawa kepada tingkatan hidup yang mengarah kepada etos kerja yang tinggi. Tanda masyarakat modern adalah mempunyai etos kerja tinggi dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Karenanya, menurut Syaykh al-Zaytun, semua sarana yang diperlukan untuk menunjang kehidupan pendidikan modern seperti itu harus kita adakan jika kita menginginkan Indonesia menjadi bangsa yang maju dan modern di masa kini dan mendatang.

Dia berkeyakinan tatkala bangsa Indonesia sudah memasuki era pendidikan modern seperti yang telah diuraikan tadi, tentu: 1) Bangsa Indonesia akan tampil dengan gagah, bangga menjadi bangsa Indonesia dengan kebanggaan yang beralasan. Bangsa Indonesia akan menjadi cinta persatuan dan kesatuan, sebab pikirannya sudah menjadi cerdas, wawasannya menerobos cakrawala yang tak terbatas oleh kekangan-kekangan

tetek-bengek yang mematkan makna persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sanggup hidup berdampingan dengan sesama bangsanya dan bangsa-bangsa dunia lainnya. Solidaritasnya tak terbatas hanya oleh kepicikan isme-isme dan madzhab-madzhab yang membelenggu kehidupan. 3) Bangsa Indonesia yang terdidik ini akan menjadi bangsa yang sanggup berkorban demi kemajuan bangsa dan umat manusia secara keseluruhan.

Tentang pengorbanan, bangsa di dunia mana pun pada taraf kehidupan apa pun, di negara maju pun, mereka masih tetap dituntut untuk mempunyai jiwa pengorbanan yang tinggi terhadap perjuangannya.

Maka dalam kesempatan mengisi dan memaknai perjalanan abad kebangkitan ini, Syaykh mengajak semua warga bangsa yang sadar akan hakikat masa depan dunia Islam, untuk terus mengasah jiwa kesadaran terhadap makna pengorbanan itu di tengah-tengah keadaan yang serba terbatas, serta memberanikan diri untuk tampil menata kehidupan pendidikan bangsa dan umat.

Menurutnya, ini adalah manifestasi dan bentuk sebuah pengorbanan. Pengorbanan yang takkan terbatas dengan suatu titik pencapaian. Dia memberi contoh, dengan izin Allah SWT, Al-Zaytun telah dapat menyelesaikan proyek pembangunan pendidikan di suatu tempat, maka akan melangkah ke berbagai tempat sesuai dengan program yang telah ditentukan bersama.

Dia pun mengajak semua komponen bangsa, khususnya ummat Islam, bertanya kepada diri masing-masing. Sudah lelahkah kita untuk berkorban demi kejayaan dan kebangkitan pendidikan dan kemajuan dunia Islam dan kemajuan bangsa? Bila kita tidak merasa lelah apa yang dapat kita buktikan untuk itu semua? Bangsa yang selalu siap dengan pengorbanan, itu tandanya bahwa umur bangsa ini akan menjadi panjang dan tak terbatas.

Selanjutnya kepada umat Islam bangsa Indonesia dan segenap warga bangsa lainnya, Syaykh al-Zaytun bertanya: Sanggupkah kita dengan segala daya dan upaya kita berperan aktif membangun bangsa Indonesia, demi kejayaan dan kegemilangan masa depan? Sanggupkah kita mendanai tanpa utang luar negeri untuk program pembangunan pendidikan bangsa dan umat?

Syaykh Panji Gumilang berharap baiklah ini menjadi *statement* dan pernyataan serta program yang harus kita lakukan secara konsekuen. Semoga kita dapat mengabdikan diri demi kebangkitan kembali bangsa dari keterpurukan, dan semoga dengan tekad dan kesanggupan kita untuk berbuat ini Allah SWT melampirkan segala cita-cita kebangkitan bangsa Indonesia, kebangkitan umat, dan kebangkitan dunia baru Islam yang penuh toleransi dan perdamaian yang dapat dirasakan oleh segala lapisan umat manusia tanpa kecuali. Indonesia yang cerdas dan kuat.

(Bersambung)

Indonesia Youth Hockey Challenge Al-Zaytun Mengukir Prestasi



JUARA BARU: Tim Hoki Al-Zaytun tampil sebagai juara untuk Putra U-21 dan U-14 di Lapangan Hoki Senayan, Jakarta (28/05/2010)

Meski baru pertama kali mengikuti turnamen Indonesia Youth Hockey Challenge, Tim Hoki Al-Zaytun berhasil menyabet dua trofi juara untuk Tim Hockey Putra U-21 dan U-14.

Gemuruh sorak sorai memenuhi lapangan hoki Senayan, Jakarta pada tanggal 28 Mei 2010. Hari itu, Pondok Pesantren Al-Zaytun mengukir prestasi dengan meraih dua trofi juara sekaligus dalam satu turnamen yakni juara Tim Hockey Putra U-21 dan U-14 pada turnamen Indonesia Youth Hockey Challenge.

Kemenangan tim putra U-21 diperoleh Al-Zaytun setelah mengalahkan tim hoki putra Universitas Trisakti melalui adu penalti dengan skor 3-2. Sedangkan U-14 Al-Zaytun berhasil mengalahkan tim hoki dari Bandung Selection. Sebelumnya, Tim Al-Zaytun juga hampir membuat kejutan besar dengan membawa seluruh trofi dalam turnamen tersebut. Karena, pada pertandingan di kelompok putri, tim putri U-21 Al-Zaytun sempat memberikan kejutan dengan mengalahkan juara bertahan 2009, Sunday Morning binaan Rolls Royce. Namun sayang, di babak semifinal, atau satu langkah lagi sebelum menuju final, tim putri yang dipimpin Kapten Amanah Saldiah itu terhalang setelah ditundukkan tim hoki putri Universitas Trisakti. Kekalahan itu sendiri merupakan kekalahan terhormat karena kalah melalui adu finalti.

Dalam Turnamen Indonesia Youth Hockey Challenge yang dilangsungkan



Tim Hoki Al-Zaytun

selama dua hari, 27-28 Mei 2010 ini diikuti beberapa peserta baru, seperti Al-Zaytun dan Bandung Selection yang memberikan perlawanan yang sangat berarti bagi tiap tim yang dihadapi. Selain diikuti peserta baru, menurut panitia pelaksana, jumlah peserta tahun ini juga lebih banyak dari tahun sebelumnya. Untuk tahun ini, turnamen diikuti 24 tim yakni: 10 tim di kelompok U-21 putra; 8 tim di kelompok U-21 putri; dan 6 tim di kelompok U-14 dengan total pemain keseluruhannya 400 pemain. Lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya 100 orang.

Hal itu juga diakui pemerhati hoki Indonesia Mc Gray yang juga Direktur Indonesia Rolls Royce. "Perkembangan hoki semenjak 10 tahun ini pesat sekali. Kita

dari 100 orang, kini menjadi 400 orang pemain. Dari sini kita melihat ada kemajuan yang sangat pesat," katanya. Ia juga mengatakan penyelenggaraan kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini, pertama kalinya turnamen ini mengadakan final untuk umur 14 tahun, dimana tim hoki Al-Zaytun U-14 keluar sebagai juara. "Selamat untuk Al-Zaytun. Ini untuk pertama kali ikut dan langsung juara," katanya.

Kesuksesan Al-Zaytun di turnamen Indonesia Youth Hockey Challenge ini tidak lepas dari pendidikan yang ditanamkan di kampus Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Di kampus ini, pendidikan olahraga khususnya olahraga hoki memang sangat didukung dan merupakan salah satu olahraga favorit pelajar. Pelatih Hockey Al-Zaytun, Yaser Arafat mengatakan, dukungan pemimpin Al-Zaytun Syaikh Panji Gumilang juga sangat menentukan kemenangan tim yang diasuhnya.

Selain itu, Yaser Arafat yang juga pernah bergabung di Pelatda DKI Jakarta ini mengatakan, kemenangan tersebut juga merupakan hasil dari kerjasama semua pihak di Al-Zaytun, mulai dari santri, atletnya, karyawan, pelatih dan seluruh tim official. "Ini hasil dari kerja keras kita semua," katanya.

Di sela-sela turnamen Youth Indonesia Challenge, tim Hockey Club ISCI dari Hongkong menyerahkan peralatan olahraga sebagai bukti perhatiannya pada perkembangan hoki di Indonesia. Peralatan olahraga tersebut diterima Sutedjo, pelatih Sunday Morning Club. Dalam kesempatan yang sama, Rolls Royce juga memberikan kesempatan gratis setiap Minggu pagi jam 7.00-9.00 bagi siapa saja yang ingin berlatih di Lapangan Hoki Senayan, Jakarta untuk anak-anak SD. "Siapa saja boleh datang, gratis tinggal datang latihan. Stick disediakan, bola disediakan. Darimana saja, perlengkapan sudah ada di sini," kata Ichsan Muhammad mantan bendahara PHSI (Persatuan Hoki Seluruh Indonesia).

Sebelum mengikuti Turnamen Indonesia Youth Hockey Challenge, tim Hoki Al-Zaytun pada 27 April - 6 Mei 2010 lalu juga mengikuti kejuaraan nasional Hockey in door (dalam ruangan) antar perguruan tinggi se-Indonesia yang memperebutkan Piala Bergilir Menegpora RI Ke-V. Kejuaraan yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu diikuti 42 perguruan tinggi se-Indonesia. Dalam turnamen itu, kemenangan belum berpihak pada Tim Hoki Al-Zaytun. ■ **BS, BI**

Merayakan Kemanusiaan

Sepakbola mempersatukan semua orang tanpa memandang bahasa, warna kulit, politik atau agama.

Bola yang dipakai dalam permainan sepakbola adalah gambaran sebuah bentuk yang sempurna. Dilihat dari sudut manapun bentuk bola itu tetap sama. Wujud demikian seakan menggambarkan permainan sepakbola itu sendiri yang tidak membedakan ras, warna kulit, agama, bahasa, bahkan status sosial.

Demikianlah Piala Dunia 2010 yang sangat bermakna sebagai kemenangan cinta, kemenangan kesetaraan, dan yang jelas kemenangan kemanusiaan. Jadi, pesta sepakbola ini merupakan penghancur tembok pemisah di antara bangsa, sekaligus pemersatu seluruh umat manusia. Seperti kata tokoh anti apartheid Nelson Mandela, Piala Dunia 2010 Afrika Selatan ini merupakan simbol kekuatan sepakbola yang dapat mempersatukan orang dari berbagai negara dunia, warna kulit, bahasa, politik maupun agama.

Makna kemenangan kemanusiaan dari pesta sepakbola terakbar sejadat ini semakin terasa karena diselenggarakan di Afrika Selatan, negara yang memiliki sejarah hitam soal politik perbedaan warna kulit atau apartheid. Terkait dengan hal itu, jauh ketika masih berupa usulan jadi tuan rumah, kekhawatiran dan kecemasan memang sempat dialamatkan pada Afrika Selatan akibat politik apartheid di negara ini yang terjadi sejak tahun 1948, kemudian berakhir pada tahun 1994

seiring dengan terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di negara itu.

Namun, setelah penyelenggaraan Piala Dunia 2010 dimulai sejak 11 Juni 2010 lalu, kekhawatiran itu akhirnya tidak terbukti. Seluruh acara berlangsung dengan baik dan aman. Lihatlah begitu indahnya tarian khas Afrika Selatan yang dibawakan para penari yang terdiri dari kulit hitam dan putih yang penuh kegembiraan pada acara pembukaannya. Kemeriahan itu mempertontonkan kepada dunia bahwa Afrika Selatan yang dulunya kaku akibat sekat yang diciptakan politik



Nelson Mandela, tokoh anti apartheid Afrika Selatan

rasisme, kini tampak lebih dinamis dan membuat segalanya terlihat berbeda.

Dalam skala antarnegara, lihatlah juga misalnya indahnya dua negara bersaudara Korea Selatan dan Korea Utara yang di negaranya selalu siap siaga setiap waktu berperang, namun di Afrika Selatan duduk bersama tanpa ada rasa permusuhan sedikitpun.

Selain Mandela, semua sepakat Piala Dunia bukan hanya sekadar tontonan keahlian mengolah si kulit bundar dan



Vuvuzela: Terompet khas Afrika Selatan

Jabulani Bikin Gemas

Jabulani dijadikan biang masalah atas kegagalan sebagian tim peserta Piala Dunia.

Nama "Jabulani", yang dalam bahasa lokal di Afrika Selatan berarti "bergembira ria" disematkan buat bola resmi Piala Dunia 2010 yang perhelatannya dilakukan 11 Juni-12 Juli 2010 di Afrika Selatan. Dari segi teknologi, Adidas sebagai pencipta bola ini mengklaim Jabulani lebih canggih ketimbang Teamgeist, bola resmi pada Piala Dunia 2006. Jika Teamgeist dibuat dari 12 lembaran bahan khusus dan direkatkan satu sama lain dengan menggunakan suatu sistem pemanasan, Jabulani lebih disempurnakan lagi dengan hanya terbuat dari delapan lembaran bahan khusus saja. Harapannya, dengan lembaran yang lebih

sedikit, ketepatan dan kestabilan bola ketika melayang lebih sempurna.

Jabulani terbuat dari bahan yang disebut ethylene-vinyl acetate (EVA) dan thermoplastic polyurethanes (TPU) yang memang disesuaikan dengan kondisi cuaca Afrika Selatan yang panas. Sementara desainnya dibuat dengan pola 4 segitiga warna-warni.

Namun, entah ada kaitannya dengan teknologi dan desain bola Jabulani itu, bagi sebagian pemain, khususnya kiper, Jabulani disebut tragedi. Karena, arah Jabulani disebut sulit diterka kala sedang melayang di udara.

Keraguan atas akurasi Jabulani ini katanya telah dikemukakan oleh beberapa pihak sebelum

perhelatan dimulai. Kiper Brasil Julio Cesar misalnya, menyebut Jabulani sebagai bola yang mengerikan. Rekan setimnya, Luis Fabiano bahkan menyebut Jabulani seperti memiliki kekuatan supranatural karena putaran yang dibuatnya di udara.

Keraguan itu pun seakan mendapat pembeneran saat pertandingan kesebelasan Inggris Vs Amerika Serikat di awal babak penyisihan. Ketika itu, tim Inggris harus ikhlas menerima hasil seri 1-1 setelah pemain AS, Clint Dempsey melesatkan tembakan ke gawang Inggris yang dijaga Robert Green. Bola sebenarnya sudah dikuasai, namun kembali lepas dan bergulir masuk ke gawang. Robert kembali berusaha menguasai, namun jabulani sepertinya enggan untuk dikejar. Ke-



Presiden FIFA Sepp Blatter bersama Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma

mencari juara dunia. Lebih dari itu, Piala Dunia dianggap sebagai alat yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Seperti obat mujarab, pesta sepakbola Piala Dunia menjelma menjadi pil penawar terhadap berbagai problema masyarakat di berbagai lapisan tanpa membedakan latar belakangnya. Sepakbola memang universal, milik semua orang.

Hari-hari menjelang perhelatan dimulai, harapan sudah banyak digantungkan pada pesta empat tahun ini. Mantan Presiden Afrika Selatan, Thabo Mbeki, misalnya, mengharapkan sesuatu yang baru dilahirkan di Piala Dunia kali ini. "Renaissance African bukan hanya untuk Afrika Selatan saja, tapi untuk benua Afrika keseluruhan," ujarnya berharap.

Sementara inisiator Piala Dunia Afrika Selatan Nelson Mandela yang lama menderita selama rezim kekuasaan politik apartheid diharapkan, Piala Dunia yang baru pertama kali diadakan di Benua Afrika

ini semakin menyadarkan seluruh manusia untuk bersama-sama memberantas rasisme di dunia yang masih merajalela.

Sedangkan Presiden Afrika Selatan, Jacob Zuma yang merasa bangga atas penyelenggaraan Piala Dunia di negaranya ini mengaku optimis Piala Dunia sepakbola akan mempersatukan negaranya dan meninggalkan warisan untuk beberapa dasawarsa mendatang. Rasa kagum Zuma memang terlihat sangat besar bahkan ketika masih mempersiapkan turnamen. "Kami melihat sesuatu yang belum pernah kami lihat sebelumnya," katanya melihat ribuan orang yang memakai kaos tim kesayangannya dan mengibarkan bendera. Hal itu menurutnya cukup mengesankannya.

Presiden FIFA Sepp Blatter juga mengatakan, Piala Dunia akan meninggalkan warisan kepada benua Afrika secara keseluruhan yang masih diabaikan negara-negara kaya, melalui pengembangan

sepakbola dan proyek-proyek pendidikan.

Sebagai penyelenggara Piala Dunia, misi yang diusung Afrika Selatan memang sangat besar, yakni membawa nama Benua Afrika secara keseluruhan untuk dapat meningkatkan kesan positif kepada dunia, mengingat identitas yang melekat bagi Afrika selama ini adalah kemiskinan.

Eto'o, kapten kesebelasan Kamerun mengatakan, Piala Dunia kali ini harus bisa menunjukkan sesuatu yang lain dari Afrika. Ia mengatakan, kebanyakan orang memandang Afrika dari segi kemiskinan, kelaparan dan bencana. Sehingga Piala Dunia kali ini menurutnya memberikan kesempatan kepada Afrika untuk menunjukkan Afrika yang lain. "Saya kira seluruh dunia akan dikejutkan oleh Afrika. Ini dapat menjadi Piala Dunia yang terbaik dalam sejarah," kata Eto'o optimis.

Sementara mantan Sekjen PBB, Kofi A. Annan yang berasal dari Ghana mengaku optimis Piala Dunia Afrika Selatan terlaksana dengan sukses. "Saya tahu betapa sulitnya Afrika Selatan bekerja keras mempersiapkan diri. Saya kira Piala Dunia akan mengejutkan bagi mereka yang sudah berprasangka soal Afrika," katanya. Sebagaimana pada Piala Dunia 2006 mengubah persepsi soal Jerman dari sudut pandang positif, ia melihat Piala Dunia 2010 di Afrika juga terjadi hal yang sama. Benua Afrika akan beralih menjadi lebih baik. Turnamen ini akan sekaligus mempertontonkan keragaman bakat dan potensi yang dimiliki Afrika tanpa menyembunyikan tantangan yang sebenarnya.

Kita juga berharap pencapaian besar akan terjadi di Afrika Selatan bahkan untuk dunia. Sebagaimana semboyan *Kenako it's Afrika turn*. Kenako it's time to celebrate humanity. Kinilah giliran Afrika. Inilah saatnya merayakan kemanusiaan. Seperti kata Zuma, Afrika Selatan telah mempersatukan dunia. Semoga persatuan itu tetap setelah Piala Dunia usai. ■ **HB, JK**



salahan pun banyak ditujukan kepada sang kiper.

Tak ingin temannya disalahkan, Kapten Inggris Steven Gerrard membela Robert Green. "Itu adalah salah satu hal aneh. Aku tak berpikir, Anda bisa mengkritik kiper karena orang sudah mengkritik bola itu dan bola itu sangat sulit. Jadi, kami harus berada di belakang Robert dan

mendukungnya. Aku yakin ia akan membuat penyelamatan penting bagi kami," ucap Gerrard. Pelatih Inggris, Fabio Capello juga menilai Jabulani yang menyebabkan gawang Robert Green kebobolan.

Gelandang tim Inggris, Michael Carrick juga heran melihat reaksi Jabulani. Ia menyebutnya seperti bola pantai, tidak punya akurasi bagus.

Bahkan Tim Howard, kiper AS saat tragedi itu juga memuji Robert Green sebagai pemain hebat. Howard menilai blunder yang dilakukan Robert Green karena Jabulani.

Beberapa pelatih juga pesimis akan keakuratan Jabulani. Pelatih Belanda, Bert van Marwijk misalnya mengatakan pengamatannya, setiap ada

tendangan bebas, selalu melayang tinggi di atas mistar, terlihat sulit untuk melakukan kontrol. Pelatih Aljazair, Rabah Saadane pun menuduh kualitas bola yang buruklah penyebab kekalahan timnya saat ditukuk Slovenia 0-1 pada 13 Juni 2010.

Menanggapi kritikan itu, perancang Jabulani menepis. "Saya kira para kiper itu hanya mencari apologi atau beralasan. Kami sudah melakukan pengujian dengan teliti. Bola ini sangat stabil dan punya aerodinamis yang natural. Selain itu, permukaannya kami buat ada geretan-geretan sehingga tak licin. Kalau ditendang pun bisa sesuai dengan keinginan pemain," kata Hans-Peter Nuerberg. Beberapa kiper juga disebutnya sudah mencobanya dan mengaku puas. ■ **BS, BI**



Basket Makin Menarik

Selain mengganti nama Indonesian Basketball League (IBL) menjadi National Basketball League (NBL), sejumlah perubahan juga dilakukan untuk membuat dunia bola basket Indonesia makin menarik.

Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, kini perbolasport Indonesia memasuki era baru. Kompetisi tertinggi bola basket nasional kini berada di bawah pengelolaan PT DBL Indonesia, penyelenggara kompetisi basket pelajar terbesar, Development Basketball League (DBL). Dalam sejarahnya, kompetisi bola basket pertama kali diselenggarakan pada tahun 1982 dengan nama Kompetisi Bola Basket Utama (Kobatama) setelah diamanatkan Kongres Perbasi (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) VIII Tahun 1981. Ketika itu, kompetisi masih diikuti klub-klub terkemuka dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pada tahun 2003, kompetisi berganti nama dari Kobatama menjadi Indonesian Basketball League (IBL). Namun dalam kurun waktu 20 tahunan itu, prestasi basket nasional belum mengalami peningkatan. Bahkan di berbagai daerah dirasakan penurunan. Keadaan itu mendorong para pengurus basket di daerah pada Desember 2009 sengaja menemui DBL untuk meminta kesediaannya jadi pengelola kompetisi basket nasional. Namun, karena DBL ketika itu masih mengembangkan liga pelajar, permohonan itu tidak langsung diterima. Setelah berbincang dengan berbagai pihak di dalam negeri maupun luar negeri, baru DBL bersedia. "Banyak yang mendorong kami untuk menuruti, dengan alasan untuk membantu basket Indonesia," kata Direktur PT DBL Indonesia, Azrul Ananda.

Dengan kesediaan DBL itu, pergantian nama kompetisi pun dilakukan dari IBL menjadi National Basketball League



Setiap tim bertemu tiga kali di NBL

(NBL) Indonesia. Perubahan tersebut secara resmi diumumkan di Ballroom Hotel Four Seasons, Jakarta 25 Mei 2010 yang dihadiri beberapa tokoh olahraga nasional. Selain perubahan nama dan logo, PT DBL Indonesia yang berpusat di Surabaya itu juga melakukan sejumlah perubahan lainnya, seperti jadwal dan penambahan jumlah pertandingan.

Kehadiran DBL sebagai pengelola NBL itu, mendapat apresiasi yang tinggi dari para Pengurus Besar Perbasi (PB Perbasi) dan semua pihak yang mengharapkan perkembangan bola basket Indonesia. Ketua Umum PB Perbasi Noviantika Nasution misalnya, mengaku merasa lega dengan hadirnya DBL Indonesia sebagai

pengelola. "Basket Indonesia membutuhkan orang-orang muda seperti di DBL Indonesia. Visioner tapi paham menghadapi keadaan. Visi mereka sejalan dengan apa yang kami inginkan," katanya.

Ketua Dewan Komisaris liga, Bella Erwin Harahap juga menilai DBL layak menjadi pengelola basket nasional karena memiliki infrastruktur yang memadai, cukup SDM, kuat dalam hal media, cukup finansial, dan memiliki jaringan kuat di lingkungan basket. Karena itu, ia berharap dengan lahirnya liga baru dan identitas baru dengan slogan "For Indonesia" itu dapat memberi suntikan semangat kepada klub-klub peserta. Untuk memberikan dukungan penuh dengan misi dan visi sama untuk mengembalikan kejayaan basket profesional Indonesia.

Walau tidak hadir saat peresmian nama baru kompetisi bola basket nasional itu, Menpora Andi Mallarangeng juga menaruh kepercayaan kepada DBL akan bisa meraih sukses yang belum pernah dicapai Indonesia sebelumnya. Bahkan, dia berharap NBL menjadi inspirasi bagi cabang olahraga lainnya di Indonesia. "Semoga NBL Indonesia pada akhirnya bisa menghasilkan prestasi tertinggi baru untuk olahraga Indonesia, serta menginspirasi olahraga-olahraga lain untuk berkembang secara profesional," kata Andi.

Di bawah pengelolaan DBL, NBL Indonesia akan menyesuaikan diri dengan liga profesional di negara-negara yang basketnya sudah maju, dimana kompetisi selalu diselenggarakan pada akhir tahun, lalu berakhir di awal tahun berikutnya. Jadi pada musim perdana NBL Indonesia 2010-2011, musim reguler akan diselenggarakan mulai Oktober 2010 hingga Februari 2011, sementara kompetisi resmi preseason (pramusim) pada bulan Juli 2010. Kemudian, kompetisi ditutup dengan Championship Series pada Maret 2011. Delapan klub terbaik akan berkumpul di satu tempat, lalu saling mengunggulkan lewat sistem *single game elimination*. Tim yang bertahan sampai akhir akan dinobatkan sebagai champion NBL Indonesia 2010-2011.

Dengan mengusung format yang baru itu, liga ini dipastikan akan menjadi kompetisi yang mendebarkan. Karena, setiap tim hanya punya satu kesempatan untuk menang dan lolos, menuju pertandingan *National Collegiate Athletic Association* (NCAA) di Amerika dan Euro League. Sementara itu, jumlah pertandingan akan bertambah signifikan. Kalau di IBL setiap tim bertemu hanya dua kali sehingga hanya bermain 18 kali musim. Di NBL, setiap tim bertemu tiga kali sehingga setiap klub bermain 27 kali. Secara keseluruhan, NBL Indonesia akan memainkan 166 pertandingan pada musim 2010-2011. Lebih banyak dari musim IBL yang hanya sampai 130 pertandingan. ■ SAN, BI

Hikkapi Siap Kembangkan Perkeretaapian



PERESMIAN: Dirjen Perkeretaapian Tunjung Inderawan (memotong tumpeng) didampingi Abraham Mose saat peresmian kantor Hikkapi.

Para pelaksana pembangunan perkeretaapian dituntut untuk meningkatkan kemampuan penguasaan prasarana kereta terkini sesuai dinamika yang terus berkembang.

Penilaian cukup optimis mengenai Himpunan Kontraktor Perkeretaapian Indonesia (Hikkapi) datang dari Dirjen Perkeretaapian Departemen Perhubungan, Tunjung Inderawan. Dia memandang asosiasi tersebut sebagai wadah yang akan lebih fokus dan lebih mudah berkomunikasi untuk meningkatkan profesionalitas di bidangnya.

Sebab menurut Tunjung, angkutan kereta api (KA) memerlukan kecermatan dan keamanan, baik dalam penempatan rel (*track*) maupun bantalannya (*rolling-stone*), sehingga mau tidak mau para pelaksana konstruksi dituntut untuk bisa bekerja secara profesional.

Wadah inilah satu-satunya yang bisa memberikan fasilitasi bagi seluruh anggota Hikkapi. Profesional di dalam melaksanakan tugasnya, dalam pengerjaan infrastruktur dan bantalan. Dia mengharapkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) asosiasi tersebut karena teknologi KA selalu berkembang. Sedangkan bidang persinyalan semakin dinamis sesuai dinamika teknologi yang berkembang.

Tunjung tidak melihat banyak perubahan di dalam pembangunan prasarana lintasan KA (*infrastructure*). Boleh dikatakan sama. Tetapi pada segmen tertentu, misalnya jembatan KA mengalami sedikit perubahan paradigma yang mengarah



dari pemeliharaan dengan semprotan anti karat (*maintenance spray*). Jika memungkinkan, diubah dari sambungan baja bercelah menjadi jembatan pres jadi. Targetnya harus mengarah ke sana, kata Tunjung. Ibaratnya, dari bintang kecil menjadi bintang besar. Untuk kemajuan pembangunan prasarana, dia mengharapkan kerjasama yang lebih padu sesama anggota Hikkapi.

Sementara itu, Agus Gurlaya Kartasaminta, Dewan Pembina Hikkapi mengharapkan, asosiasi ini lebih fokus pada bidang perkeretaapian. Menurut Agus, asosiasi tersebut patut mendapatkan apresiasi publik lantaran kemampuan para anggotanya. Dan pada saatnya nanti, Hikkapi akan menjadi sebuah asosiasi yang terkenal. Kantor sekretariatnya yang cukup representatif, kata Agus, membuktikan keseriusan para anggotanya un-

tuk membesarkan nama asosiasi tersebut.

Para anggota yang tadinya bergabung di Gapensi, sekarang lebih fokus pada Hikkapi. Keanggotaan di Gapensi punya cakupan yang cukup luas, tetapi di Hikkapi lebih konsentrasi di bidang pembangunan perkeretaapian sehingga asosiasi ini akan mendapatkan apresiasi masyarakat.

Ketua umum Hikkapi Abraham Mose mengatakan tujuan pembentukan Hikkapi agar pembangunan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin optimal dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun profesional. Dengan terbentuknya lembaga ini akan terbangun iklim persaingan yang sehat sehingga setiap kontraktor lebih fokus dan profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

Apalagi dengan diresmikannya kantor sekretariat Hikkapi, yang dilukiskannya sebagai komitmen asosiasi tersebut untuk meningkatkan peran anggotanya sehingga kemampuan membangun prasarana perkeretaapian semakin maju. Secara sistem maupun kelembagaan, Hikkapi selalu berusaha maksimal agar semua anggota tanggap terhadap perkembangan, yakni penguasaan teknologi yang semakin berkembang dan secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan di negara maju.

Keberadaan Hikkapi, menurut Abraham, mendorong semua anggotanya agar menghasilkan kinerja yang jauh lebih baik dan setiap kontraktor meningkatkan kualitasnya. "Jika ada kontraktor bergerak di sektor perkeretaapian dan jika belum menjadi anggota, kita terbuka menerima mereka menjadi anggota," katanya.

Selain pengurus pusat, Hikkapi didukung oleh 7 pengurus daerah (Pengda) di Jawa dan Sumatera. Hikkapi mungkin berkembang ke provinsi-provinsi lain yang belum memiliki lintas kereta tetapi punya prospek pengembangan lintas KA, baik oleh pemerintah maupun swasta. "Kami siapkan pembentukan Pengda, seperti di Sulawesi dan Kalimantan," kata Abraham.

Dia menghimbau para anggota Hikkapi di mana pun agar beradaptasi dan mendukung kebijakan pemerintah dan turut menyukseskan UU 23/2007. Dia juga menghimbau sosialisasi, tidak hanya kepada anggota tetapi juga masyarakat, terutama yang bermukim berdekatan dengan lintas kereta. Sasaran yang ingin dicapai adalah Hikkapi sejajar dengan asosiasi-asosiasi lain dan diakui secara nasional. ■ RI



Kondisi Bandara Kuala Namu, Medan, saat ini

Menuju Bandara Berkelas Dunia

Satu lagi akses internasional akan terbuka dari pintu gerbang wilayah barat dengan adanya pembangunan Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Kondisi saat ini sudah mencapai 50 persen. Direktur Operasional dan Teknik PT Angkasa Pura II, Tulus Pranowo, mengatakan, Bandara berstandar dunia ini akan mengakomodasi kebutuhan transportasi udara di masa datang.

Pembangunan bandara tidak lepas dari kebersamaan yang Sinergi-komplementer dan ini akan memiliki prospektif multifungsi dan kearifan *living culture* yang menggambarkan aspek strategis dan dinamika sosial ekonomi yang berkembang cepat, bersatunya potensi dan kompetensi memberi warna dalam perekonomian nasional dan global.

Bangunan yang memiliki ciri khas keanekaragaman dalam simbol budaya daerah yang diaplikasi dalam keberagaman budaya yang berseni cita rasa tinggi, semisal desain dan konstruksi seperti yang dibangun di Bandara Kuala Namu, menunjukkan ragam khas daerah yang terkenal dengan perkebunan sawit yang diaktualisasi ke dalam ornamen bangunan dan menjadikan sebuah inspirasi dan khayal dari makna dan nilai keberadaan pohon sawit.

Nuansa modern dan klasik seakan menyatu dengan alam, baik interior dan eksterior apalagi bahan yang digunakan memiliki kualitas yang tinggi. Saat masuk di area bandara, gambaran sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia semakin

jelas. Kesibukan di setiap sudut para koreografi dan pekerja saling bekerja sama membangun. Sementara di sudut lain, berdiri bangunan kargo yang selesai dibangun.

Bandara juga memberi keakraban kultural terhadap masyarakat lingkungannya, dimana budaya yang dimiliki menjadi pesona bagi turis mancanegara untuk datang ke Indonesia, maka tidak berlebihan wajah bandara merupakan cermin

awal perhatian internasional ke Indonesia.

Peran bandara bukan saja dilihat dalam perspektif lalu lintas jasa, tapi wajah sebuah negara yang maju dan berbudaya tercermin saat berada di bandara. Selain aspek ekonomi yang mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, antar daerah dan nasional. Untuk mendukung itu, rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa penerbangan telah menjadi obsesi Angkasa Pura (AP) II.

Bila bersaing di tingkat global, pembangunan Bandara Kuala Namu, di antara yang siap memasuki era kompetisi itu. Lokasi Bandara yang strategis dan dimungkinkan sebagai tempat hub internasional bersaing dengan Bangkok, Kuala Lumpur dan Singapura. Bandara ini juga menjadi tempat penyebaran pengguna jasa penerbangan ke berbagai kota tujuan di Indonesia.

Salah satunya sebagai pendukung sektor pariwisata untuk Indonesia bagian utara maupun berbagai kepentingan bisnis ke berbagai daerah dan ke mancanegara.

Bandara yang baru ini pembangunannya didanai oleh sumber daya lokal—

RENCANA PEMBANGUNAN BANDARA KUALA NAMU

	TAHAPAN	TAHAP I		TAHAP II	TAHAP III/ ULTIMATE
		Stage 1	Stage 2		
I.	Landas Pacu (Runway) Pesawat Terbesar Pergerakan Pesawat	3.000 x 60 m B 747 - 400 113.709/th	3.750 x 60 m A 380 113.709/th	3.750 x 60 m A 380 170.364/th	3.750 x 60 m A 380 255.617/th
II.	Terminal Penumpang Kapasitas	90.000 m ² 8 juta/th	125.000 m ² 10 juta/th	170.000 m ² 15 juta/th	225.000 m ² 22 juta/th
III.	Terminal Kargo Kapasitas	13.000 m ² 65.000 ton/th	13.000 m ² 65.000 ton/th	18.000 m ² 90.000 ton/th	27.000 m ² 115.000 ton/th
IV.	Area Parkir	20.000 m ²	90.000 m ²	140.000 m ²	140.000 m ²

Sumber: Satker AP II Bandara Kuala Namu



KUNJUNGAN: Tulus Pranowo (tengah), Direktur Operasional dan Teknik PT.AP II saat melakukan kunjungan bersama tim ke Bandara Kuala Namu, Medan (18/06).

APBN murni Kementerian Perhubungan dan anggaran PT. AP II. Dimana pekerjaan konstruksi dibagi dalam empat tahap, investasi ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan tahap I fase 1 diperhitungkan akan mampu melayani kebutuhan 8 juta penumpang dan 65.000 ton kargo per tahun. Bandara bisa didarati oleh pesawat berbadan besar sejenis B747-400 dan jarak terjauh untuk penerbangan haji.

Menurut Tulus Pranowo, Direktur Operasional dan Teknik PT. Angkasa Pura II, pada bidang infrastruktur dan akses menuju bandara Kuala Namu, nantinya, tahap awal bisa dijangkau lewat non-tol, namun pembangunan masih terkendala pembebasan tanah khususnya tanah ex HGU (Hak Guna Usaha). Saat ini, kata Tulus, oleh pemda setempat masih diinventarisasi pihak-pihak mana saja yang berhak menerima ganti rugi—kepada para penggarap atau perusahaan kekebunan (PTP). Akses lain, adalah jalan tol yang langsung menembus ke Bandara Selain itu, mengoptimalkan angkutan kereta api dari Stasiun Aras Kabu sepanjang 4,8 km menuju area Bandara.

Rencananya Bandara Kuala Namu, Medan, menjadi Bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, di bawah pengelolaan PT AP II. Pembangunan fisik terus dipacu dan disinkronkan, karena melibatkan banyak instansi di bawah koordinasi Dirjen Perhubungan Udara. Dengan demikian kiprah PT Angkasa Pura II disesuaikan dengan program perhubungan udara. Juga yang tak kalah penting, kata Tulus, unsur-unsur penunjangnya.

Tulus mencatat progress pembangunan fisik—gudang kargo sudah selesai. Sedangkan gedung security dan jalan akses di Bandara diperhitungkan selesai dalam 3 bulan. Dia menyebutnya tiga katagori sebuah Bandara bisa dikatakan siap operasional, yaitu *runway* (landasan pacu),

apron (tempat parkir) dan terminal. “Dalam kaitan ini, perhubungan udara menyelesaikan runway dan apron. Sedang AP II merampungkan terminal dan area parkir. Menurut rencana, semua bangunan fisik sudah selesai tahun 2011,” kata Tulus kepada Berita Indonesia disela kunjungan ke Bandara Kuala Namu-Medan.

“Kerangka bentuk bangunan, seperti ornamen di area gedung berbentuk mirip pohon sawit, itu adalah *brand mark* bandara, indah dipandang dan pengguna jasa



Konstruksi menyerupai pohon sawit

yang melihatnya punya kesan yang mendalam. Semua ini merupakan ciri khas Bandara Kuala Namu,” ungkap Tulus menggambar.

AP II terus mengikuti pentahapan pembangunan tersebut, terutama dari sisi pendanaan. Awalnya AP II, jelas dia, untuk kebutuhan anggaran direncanakan melalui dana pinjaman. Namun perkembangan di lapangan, akhirnya belum dibutuhkan pinjaman itu. Dananya dialokasikan melalui anggaran perusahaan, dan sampai hari ini dibayar dengan *cash flow* (dana tunai) perusahaan.

Pekerjaan utama pembangunan bandara memberi prioritas kepada kontraktor lokal, Sedang segi kebutuhan operasional, kata Tulus, bandara memilih penggunaan teknologi terkini dan baru, baik dari *maintenance* (pemeliharaan) maupun *spare-part* (suku cadang) yang mudah didapat.

Misalnya, X-Ray yang terbaru dengan teknologi yang mampu melihat dari berbagai arah dan sudut obyek. Sebelumnya X-Ray yang ada hanya melihat dalam satu sudut obyek. Perhatian lain adalah penyesuaian masalah kamera keamanan (security CCTV), targetnya disinkronkan dengan perhubungan udara.

Pengembangan Bandara

Di samping Bandara Kuala Namu, kata Tulus lebih jauh, AP II juga merencanakan pembangunan dan pengembangan bandara-bandara antara lain, Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru-Riau. Gedung terminal penumpang baru saat ini dalam tahap penyelesaian. Apron diperluas, *runway* diperpanjang dan diperlebar, sesuai standar lebar 45 M. Ini sedang tahap pembebasan tanah.

Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjung Pinang sedang dibangun terminal baru, selain apron yang lebih bagus, karena di Bandara itu terlibat tiga instansi - pemerintah daerah, AP II dan Kementerian Perhubungan. Tulus mengungkapkan, di seputar lokasi Bandara ada sebuah gunung yang harus dipangkas dan disesuaikan dengan tingkat kepentingan penerbangan. Pengembangan bandara mencapai tahap 50 persen selesai.

Pembangunan terminal baru Bandara Sultan Thaha, Jambi dalam tahap tender, sementara untuk Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang yang akan dipindahkan ke seberang dari lokasi yang lama. Semua aktivitas nantinya pindah, jalan maupun areal parkir semuanya ke lokasi yang baru.

Bandara-Bandara di bawah pengelolaan AP II, tutur dia, secara bertahap semuanya akan baru, baik runway, apron yang diperluas, diperpanjang maupun diperlebar. Diketahui secara keseluruhan semua bandara di bawah AP II sudah melampaui kapasitas yang ada. “Dan sebagaiantisipasi ke depan, akan adanya berbagai jenis pesawat berbadan lebar, seperti Airbus dan Boeing 737-400, yang membutuhkan runway lebih panjang dan lebar. Kondisi di lapangan perlu disesuaikan dengan perkembangan.” jelasnya.

Banyak investasi yang dilakukan Angkasa Pura II untuk merespon lalu lintas udara (*air traffic*) dalam turut mendukung percepatan lalu lintas perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan pembangunan dan peremajaan bandara memerlukan dukungan semua pihak. Sebab bandara sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah dan nasional. Bagi AP II siap mendukung kebijakan itu, dan perlu diketahui, perusahaan bukan hanya berorientasi meraih laba, juga sebagai sektor pelayanan publik harus mampu memberi pelayanan yang prima,” jelas Tulus. ■ RI



Bupati Purwakarta H.Dedi Mulyadi, SH dan Perwakilan Uni Eropa Novianty Manurung

Kabupaten Purwakarta Percontohan Pengembangan PLP

Keberhasilan Pusat Layanan Pengadaan (PLP) menandakan keberhasilan program “Digjaya IT Purwakarta 2010”.

Pengadaan barang/jasa di dalam lingkungan pemerintah saat ini telah menjadi beban tersendiri bagi aparat pemerintah. Selain karena rentan dengan tekanan-tekanan yang bersifat psikologis maupun fisik, aparat pemerintah juga sering menge-luhkan beban kerja yang sangat menyita waktu dan pikiran mereka sehingga berpotensi mengganggu tugas dan fungsi pokoknya. Selain itu, pemerintah sendiri juga memiliki keterbatasan jumlah aparat yang memiliki sertifikat pengadaan seperti yang disyaratkan peraturan untuk menjadi panitia pengadaan.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No 80 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa, disyaratkan pembentukan unit layanan pengadaan (ULP) sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Merespon peraturan tersebut, Kabupaten Purwakarta sejak tahun 2008 telah membentuk ULP melalui Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2008. Namun, setelah beroperasi selama satu tahun, beberapa keluhan muncul dari pihak penyedia barang/jasa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dari ULP sendiri. Kondisi tersebut mendorong

pemerintah daerah (Pemda) Purwakarta meningkatkan kapasitas kelembagaan ULP dengan menjalin kerjasama dengan Bandung Trust Advisory Group (B-Trust) yang didukung oleh Komisi Uni Eropa (European Union Commission). Hasil dari kerjasama ini, dibentuklah Pusat Layanan Pengadaan (PLP) pada tanggal 25 Juni 2009 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30/2009.

PLP dibentuk dengan visi dan misi: Melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan terpadu. PLP juga memiliki tugas memproses pengadaan barang/jasa pemerintah yang bernilai di atas Rp.100.000.000,- atau di bawah itu tetapi atas permintaan dari SKPD terkait.

Untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat pada kinerja PLP ini, Bupati Purwakarta, H.Dedi Mulyadi, SH pun meluncurkan pembukaan PLP pada 19 Mei 2010 di Aula Wikara Setda Kabupaten Purwakarta yang dihadiri oleh perwakilan Uni Eropa Novianty Manurung, Direktur Senior B-Trust Ir.Siswanda,MPM, Sekda Kabupaten Purwakarta Drs.H.Hamim Mulyana,M.si, Ketua PLP Titov Firman H.SH, dan para tamu lainnya.

Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ahmad

Heryawan telah menjadikan Kabupaten Purwakarta percontohan pengembangan PLP mulai tahun 2010 dalam seluruh kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa, kecuali pemilihan jasa konsultan yang menggunakan sistem elektronik (e-proc). Program kerjasama ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan ULP melalui perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa yang selama ini dianggap rentan terhadap pungutan liar dan didominasi oleh kelompok tertentu saja.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut, PLP mengimplementasikan sistem pengadaan secara elektronik (e-proc) bekerjasama dengan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat. Bupati Purwakarta H Dedi Mulyadi SH juga menerangkan bahwa salah satu manfaat sistem ini adalah untuk membuka akses yang lebih luas bagi para penyedia jasa, khususnya usaha kecil dan menengah untuk ikut berkompetisi secara sehat. Sekaligus diharapkan akan menimalisasi terjadinya praktek KKN baik antara panitia dengan penyedia jasa maupun di antara penyedia jasa.

Manfaat lain dari e-proc bagi para penyedia jasa adalah kemudahan dalam mengikuti pelelangan proyek pemerintah. Dengan sistem ini, lelang bisa diikuti tanpa kehadiran secara fisik di sekretariat panitia pelelangan. Hal itu bisa dilakukan karena hampir seluruh tahapan kegiatan lelang mulai dari pendaftaran, rapat penjelasan (aanwijiing), pemasukan penawaran dan tahapan lainnya menggunakan sistem elektronik.

Bupati Purwakarta memaparkan bahwa ke depan seluruh paket kegiatan pengadaan di PLP akan menggunakan sistem elektronik. Sebagai daerah percontohan, Purwakarta harus menampilkan percepatan dibandingkan daerah lainnya. Dengan keberhasilan PLP ini, makin mengukuhkan bahwa program “Digjaya IT Purwakarta 2010” berhasil. PLP juga menjadi input untuk keberhasilan lelang. Bahkan, bukan cuma proses lelangnya yang berhasil, tetapi pekerjaan juga tetap baik.

Sementara itu, Direktur Senior B-Trust, Ir.Siswanda H.Siswanto, MPM dalam sambutannya mengatakan bahwa dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan e-proc, Pemkab Purwakarta dan B-Trust telah mengadakan beberapa persiapan. Dengan dukungan dari semua pihak, telah disusun Standard Operating Procedure (SOP) pengadaan barang jasa dan elektronik, Standar dokumen pengadaan secara elektronik hingga penyelenggaraan pelatihan pengadaan barang dan jasa secara elektronik bagi panitia di PLP, PA/KPA maupun penyedia jasa. Harapan ke depan adalah terwujudnya pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan dan kompetitif di Kabupaten Purwakarta”.

■ BND, AMR, BI

Menangkap Nelayan Ala Polair

Nakhoda kapal berbendera Malaysia ditembak saat mencari ikan di perairan Malaysia. Nakhodanya dihukum atas dakwaan melakukan penangkapan ikan tanpa ijin. Ada apa dengan Polair?

Raut muka Hajinu bin Osi (52) mendadak meringis menahan sakit. Toh, lelaki yang sehari-harinya terpaksa didampingi isterinya, Wa Ode Rasiamu (49) itu tetap berusaha tersenyum ketika menerima *Berita Indonesia* yang menjenguknya di sebuah kamar di Markas Satuan Kepolisian Perairan Polri-Juata Laut Tarakan, Kaltim, beberapa waktu lalu.

Penderitaan yang dialami Hajinu terjadi pada Desember 2009 lalu. Menurut Hajinu, saat itu Satuan Patroli Nusantara Kapal Polisi Murai (KP Murai)-633 menangkap kapal KM. SA 2015/F sebuah kapal nelayan berbendera Malaysia yang dinakhodainya. Masih menurut Hajinu, kapalnya ditembak ketika mencari ikan di sekitar lampu merah Tawau Sabah, Malaysia Timur. Setelah menembak dua kali pada bagian paha kanan Hajinu, ia dan tiga orang ABK bersama KM SA 2015/F kemudian diseret ke perairan Indonesia.

“Kami sedang menangkap ikan di lampu merah Tawau waktu itu. Pada sekitar jam 03.00 subuh, Rabu, 2 Desember 2009, tiba-tiba kapal Patroli Murai-633 merapat ke kapal KM. SA2015/F. Seseorang mengarahkan senjatanya ke arah saya dan menembak paha saya. Jaraknya cukup dekat,” ujar Hajinu, TKI pemilik passpor AL964145 yang sudah puluhan tahun bekerja di Sabah Malaysia Timur mengenang peristiwa itu.

Sementara itu, dalam laporan penangkapan yang dibuat Perwira Nautika KP Murai-633, Ipda Ambar Marwanto SST, kapal nelayan Malaysia itu ditangkap di perairan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur pada posisi 04° 05' 40" Lintang Utara - 118° 09' 50" Bujur Timur, yang berarti masuk wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Berdasarkan laporan Polisi Perairan (polair) inilah akhirnya Kejaksaan Negeri Tarakan menyeret TKI yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai nelayan di Sabah Malaysia itu ke meja hijau.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tarakan yang diketuai Soedibijo Prawiro, SH menyatakan: Hajinu Bin Osi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berupa memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia tanpa dilengkapi Surat Ijin Penang-



Paha sebelah kanan Hajinu bin Osi ditembak dua kali

kapal Ikan (SIPI). Dengan pertimbangan itu, hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara dua tahun, dan denda Rp 5 milyar, atau 3 bulan kurungan kepada Hajinu. Sementara barang bukti berupa kapal KM. SA2015/F GT 38,90 dan 615 Kg ikan jenis campuran dan udang yang telah dilelang senilai Rp 1.550.000,- dirampas untuk Negara.

Banding di Pengadilan Tinggi (PT) Samarinda dan kasasi di Mahkamah Agung, juga menguatkan putusan PN Tarakan. Tampaknya, hakim hanya men-

engar keterangan saksi memberatkan yang mengatakan, Tim Patroli KP Murai 633 Dit Polair Babinkam Polri yang dipimpin Iptu Suryanto sebelumnya telah mengeluarkan tembakan peringatan berkali-kali ke udara, tapi KM. SA2015/F tidak mau berhenti sehingga mengarahkan tembakan ke tiang kapal yang kemudian mungkin memantul ke paha.

Sebaliknya, hakim tampaknya tidak mempertimbangkan keterangan Hajinu yang menyatakan bahwa mereka diseret dari perairan Malaysia setelah Polair menembak dua kali dari jarak dekat ke arah paha kanan Hajinu. Hakim juga mengesampingkan luka tembakan pada paha kanan lelaki yang tinggal di Desa Bahagia RT 11 Sei Nyamuk Sebatik, Nunukan itu.

Ketua Kerukunan Masyarakat Sulawesi Tenggara di Tarakan, Muchtar LO menyayangkan tindakan Polair itu. Menurut purnawirawan TNI-AL ini, dari bekas luka, korban ditembak dari jarak dekat, sebab jika jarak jauh – lebih 10 meter dengan senjata laras panjang, pasti remuk.

Mengenai SIPI, sebagai TKI yang bekerja jadi nelayan resmi di Malaysia, Hajinu seharusnya tidak diwajibkan memiliki SIPI yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, karena ia bekerja untuk kapal berbendera Malaysia dan mencari ikan di perairan Malaysia.

Lebih lanjut menurut Muchtar LO, tugas Polisi Perairan hanya sejauh 12 mil dari pantai. Sedangkan kejadian itu menurut versi Polair berjarak 14 mil Timur Pulau Sebatik. Jadi, itu artinya mereka berada di wilayah status quo. Kini yang jadi pertanyaan, ada apa dengan Polair? Seyogyanya, ini tugas TNI-AL. Tapi, buktinya menurut Hajinu, siang sebelum kejadian dia bersama ABKnya melihat ada kapal KRI di sekitar perbatasan. Tapi TNI itu tidak melakukan sesuatu karena kapal Hajinu berada di perairan Malaysia.

Muchtar LO sendiri mengaku tidak bermaksud mengomentari vonis yang telah dijatuhkan hakim, baik di PN Tarakan, PT Samarinda, maupun MA. “Saya hanya berharap agar kasus ini ditinjau ulang. Harapan saya, Direktorat Kepolisian Perairan Polri, punya tanggung jawab moral terhadap Hajinu yang cacat seumur hidup,” ujarnya. ■ SLP



Gedung SMUN II Dolok Sanggul, Humbahas



kung pembelajaran yang masih sangat terbatas, SMU ini dirasa perlu mendapat dukungan dari pemerintah, masyarakat, dan sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Seperti diakui Kepala Sekolah Gordon Simarmata kepada wartawan *Berita Indonesia* Parasian Manalu. Menurutnya, dukungan dimaksud misalnya, prasarana jalan atau akses yang sangat perlu perbaikan. Dan yang paling utama adalah sarana pendukung pembelajaran sekolah, di antaranya buku-buku pembelajaran, laboratorium dan lain-lain.

Dalam rangka memperoleh dukungan tersebut, Gordon Simarmata S.pd selaku Kepala Sekolah SMU II Dolok Sanggul dan para pendidikannya sudah mencoba menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, sekolah lain di sekitarnya, termasuk orang tua siswa. Dalam hubungannya dengan instansi terkait, para kepala sekolah sekecamatan Dolok Sanggul telah beberapa kali mengadakan pertemuan untuk mencari solusi terbaik untuk sekolah tersebut.

Dengan terjalannya komunikasi yang baik dengan pihak-pihak tersebut, hasil yang memuaskan pun sudah terlihat dari prestasi yang dihasilkan sekolah tersebut. Dimana dua siswanya, Agnes Panjaitan (Kimia) dan Sallin Simanullang (Teknologi Informasi dan Komunikasi) berhasil menjadi yang terbaik yakni juara I. ■ **PM**

Menggali Potensi SMUN II Dolok Sanggul

Meski sarana dan prasarana yang dimiliki masih minim, SMU Negeri II Matiti, Dolok Sanggul bisa meraih prestasi gemilang.

Prestasi tidak selalu harus diraih dengan sarana dan prasarana yang serba lengkap. Hal itu dibuktikan oleh SMU Negeri II Dolok Sanggul, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Dengan segala keterbatasannya, SMU yang baru berusia dua tahun ini meraih prestasi gemilang dengan meraih juara I pada kompetisi di tingkat Kabupa-

ten Humbahas belum lama ini. Melihat perkembangan sekolah ini dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat sekitarnya, SMU Negeri II Dolok Sanggul yang terletak di Desa Matiti ini memiliki potensi besar.

Namun, memperhatikan letak sekolah ini yang kurang strategis, prasarana yang masih sangat minim dan sarana pendu-

Sidoarjo Raih Adipura Ketiga Kalinya

Meski Sidoarjo terendam lumpur sejak 27 Mei 2006, Sidoarjo kembali meraih penghargaan Adipura dari Presiden RI dengan kategori kota sedang. Penghargaan yang diterima tahun 2010 ini merupakan penghargaan yang ketiga. Penghargaan sebelumnya diraih tahun 2008 dan 2009 lalu. Penghargaan ini membuktikan kalau Kabupaten Sidoarjo mampu mempertahankan supremasi pengelolaan lingkungan perkotaan selama 3 tahun. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono kepada Bupati Sidoarjo Drs Win Hendrarso Msi di Istana Negara Jakarta (8/6). Selain Adipura, Kabupaten Sidoarjo juga menerima penghargaan Adiwiyata bidang pengelolaan kebersihan sekolah yang diterima SD Al Muslim Kecamatan Waru.

Selain Kabupaten Sidoarjo, ada 31 kabupaten/kota di Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan yang sama dengan kategori berbeda. Kabupaten/kota itu diantaranya, Kota Surabaya (kategori kota metropolitan), Kota Malang (kategori kota besar), Kabupaten Pasuruan, Bangkalan, Kota Batu, Kota Blitar, Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Gresik, Jember, Jombang, Kota Kediri, Lumajang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dan Tulungagung (kategori kota sedang).

Sedang untuk kategori kota kecil, Presiden SBY memberikan kepada Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Lamongan, Mojokerto, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri.

Dengan predikat tersebut, Provinsi Jawa Timur dinyatakan sebagai provinsi yang mendapatkan predikat daerah terbanyak dalam penganugerah Adipura 2010 dari Presiden RI.

Untuk tahun 2010 ini, jumlah penerima penghargaan Piala Adipura dibandingkan tahun 2009 meningkat dari 126 menjadi 140 kota. Program ini memberikan pengaruh signifikan pada peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan di beberapa kota menjadi kota yang lebih bersih, teduh dan nyaman, kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Halta. Menurutnya peningkatan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan serta semakin besarnya tuntutan masyarakat akan peningkatan kualitas lingkungan. ■

Teluk Meksiko Makin Kritis



Semburan minyak dari pengeboran lepas pantai yang meledak di Teluk Meksiko

Tumpahan minyak mentah semakin mencemari Teluk Meksiko. Lebih dari 600 spesies hewan terancam mati, padang terumbu karang hancur, dan ribuan warga di sepanjang pesisir timur Meksiko secara ekonomi terpukul.

Teluk Mexico kini menjadi sorotan dunia. Namun bukan pariwisatanya yang disorot melainkan tumpahan minyak yang mencemari perairan teluk sejak terjadi ledakan, 20 April lalu, di Deepwater Horizon, sebuah anjungan pengeboran minyak, 66 kilometer lepas pantai Louisiana, AS. Usaha ini dimiliki Transocean Ltd, tapi sedang disewa oleh British Petroleum (BP) PLC, sebuah perusahaan minyak dari Inggris.

Titik ledakan tepat mengenai kepala sumur yang berada di kedalaman 1.500 meter di bawah permukaan laut. Bencana ini diramalkan bisa menyaingi tumpahan minyak Exxon Valdez, tahun 1989, yang disebut sebagai terburuk dalam sejarah perminyakan Amerika.

Dua hari pascaledakan, 22 April 2010, sebagian anjungan roboh dan terbakar. Sebelas pekerja tewas dalam musibah itu. Sejak itu semburan minyak mentah sekitar 5.000 barrel atau 210.000 galon (795.000 liter) per hari merembet semakin jauh dari pusat ledakan akibat terbawa arus. Badan Penerbangan dan Antariksa AS per 27 April sempat merilis gambar udara tumpahan minyak. Saat itu luas area yang tercemar 9.933 km (77 x 129 km).

Memasuki minggu kedua sejak ledakan (6/5), dampak tumpahan minyak kian buruk. Departemen Margasatwa dan Perikanan Louisiana mengatakan, lebih dari 600 spesies hewan terancam mati. Di lepas pantai Louisiana adalah habitat bagi 445 jenis ikan, 134 jenis burung, 45 jenis mamalia, serta 32 jenis reptil dan amfibi. Habitat pelikan coklat dalam kondisi kritis.

Ahli biologi Louisiana, Robert Lover, mengatakan, pelikan coklat yang dijuluki "si burung anggun" bertelur di pesisir pulau-pulau kecil di perairan Teluk Mek-



Lebih dari 600 spesies hewan terancam mati

siko. Burung itu terancam mati karena memakan ikan yang tercemar minyak. Begitu juga kura-kura, katak, buaya, paus, lumba-lumba, manatee, tuna, hiu, kakap, dan tiram terancam mati jika minyak tidak dibersihkan.

Burung-burung dan hewan lainnya itu menghuni 1.700 pulau di Teluk Meksiko wilayah Florida. Gugus pulau ini membentang dari Florida Keys hingga Key West yang legendaris itu. Kematian hewan-hewan itu sudah di depan mata. Selain minyak menutupi muka laut, gumpalan minyak mengandung aspal mencemari tengah hingga dasar laut.

Robert S Carney, pakar kelautan Universitas Negeri Louisiana, mengatakan, aspal membuat semakin banyak biota laut terancam. Bakteri, plankton, cacing, dan biota kecil lain menyerap minyak. Mereka dimakan ikan kecil, kepiting, dan udang yang juga dimakan hewan laut yang lebih besar. Padang terumbu karang juga hancur.

Ribuan warga, terutama para nelayan di pesisir Havana (Kuba), Tampa, New Orleans, Houston di AS, hingga di sepanjang pesisir timur Meksiko terpukul. Hasil tangkapan nelayan merosot tajam. Nelayan Louisiana menuturkan, "lahan garapan" mereka tercemar berat. Seorang nelayan,

Jason Malerine (26), mengatakan bahwa upaya pengendalian oleh pemerintah sangat lambat.

Musibah tumpahan minyak ini membuat Presiden AS Barack Obama (7/6) menegcam Pemimpin Utama British Petroleum (BP) Tony Hayward atas ucapannya yang sesumbar beberapa waktu lalu, "Saya ingin hidup saya kembali. Teluk itu adalah lautan yang luas, dan dampak bencana ini terhadap lingkungan sangat kecil."

Obama mengatakan, pemimpin BP itu tidak akan pernah bisa bekerja untuknya. Obama telah berupaya meyakinkan seluruh rakyat AS bahwa pantai Teluk Meksiko akan "bangkit kembali" dari pencemaran minyak terburuk sepanjang sejarah AS, tetapi bukan tanpa waktu, upaya, dan kompensasi dari BP.

Presiden Obama menegaskan, raksasa minyak Inggris itu harus bertanggung jawab sepenuhnya atas musibah itu. Bahkan, dia meminta BP menanggung semua biaya operasional untuk membersihkan minyak. Ini berbeda dengan kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Penegasan Obama ini direspon BP dengan menyiapkan dana sebesar 20 miliar dollar AS. Dana tersebut akan dipakai sebagai kompensasi kerugian akibat pencemaran minyak di Teluk Meksiko, AS. BP pun mengumumkan penundaan pembagian dividen bagi para pemegang saham, dividen untuk empat bulan pertama tahun ini.

BP juga akan menyetero 100 juta dollar AS ke pos lain untuk membantu para pekerja industri perminyakan. Para pekerja menganggur akibat kebijakan moratorium pengeboran laut dalam yang diputuskan Obama.

Kesanggupan BP itu melebihi angka yang tertera di dalam surat dari penegak hukum AS, yang menyebutkan kerugian ekonomi terkait pencemaran minyak sekitar 75 juta dollar AS.

Keputusan BP mengalokasikan dana untuk penanganan pencemaran minyak di Teluk Meksiko itu berdampak baik bagi harga saham BP, yang memiliki total aset sekitar Rp 236 miliar dollar AS.

Sementara itu, berbagai upaya membersihkan tumpahan minyak dan menekan kebocoran di pusat ledakan terus dilakukan AS dan operator kilang minyak, BP. Sejak 28 April, sudah lebih dari 1.900 personel dilibatkan dalam menekan tumpahan minyak. Mereka menggunakan 300 kapal dan pesawat, termasuk 10 unit kapal selam yang ditugaskan untuk mendekati ke titik ledakan.

BP memperkirakan, upaya untuk membersihkan minyak di Teluk Meksiko akan menelan biaya lebih dari 6 juta dollar AS atau Rp 54,2 miliar per hari. Regu penyelamat sudah menuangkan lebih dari 156.000 galon (590.525 liter) dispersant ke laut untuk mengurai minyak. ■ **CID**

'Penjara' Gaza Mulai Dibuka

Pasca tragedi "Gaza Freedom Flotilla" dan tekanan dari dunia internasional yang terus menerus, Israel memberi isyarat akan memperlonggar secara penuh blokade Gaza.

Pasca serangan berdarah yang menyasar konvoi kapal misi bantuan kemanusiaan 'Flotilla Gaza' pada 31 Mei, dunia internasional terus menekan Israel agar menerima penyelidikan internasional dan membuka lagi blokade Jalur Gaza untuk kepentingan misi kemanusiaan ke Palestina.

Tekanan, antara lain, disampaikan Perancis dan Inggris. Menlu Perancis Bernard Koucher dan Menlu Inggris William Hague di Paris mendesak Israel menerima penyelidikan internasional atas insiden penyerangan kapal misi kemanusiaan Gaza. Koucher mengatakan, penyelidikan internasional diperlukan karena aktivis dari beberapa negara menjadi korban.

Kecaman juga dilontarkan Ratu Rania dari Jordania. Dia memperingatkan Israel bahwa kebijakan "garis keras" terhadap Palestina bisa menghilangkan sikap moderat di wilayah itu. Serangan Israel terhadap konvoi kapal yang berusaha menembus blokade dan menyebabkan 9 aktivis tewas pada 31 Mei telah dilakukan secara membabi buta.

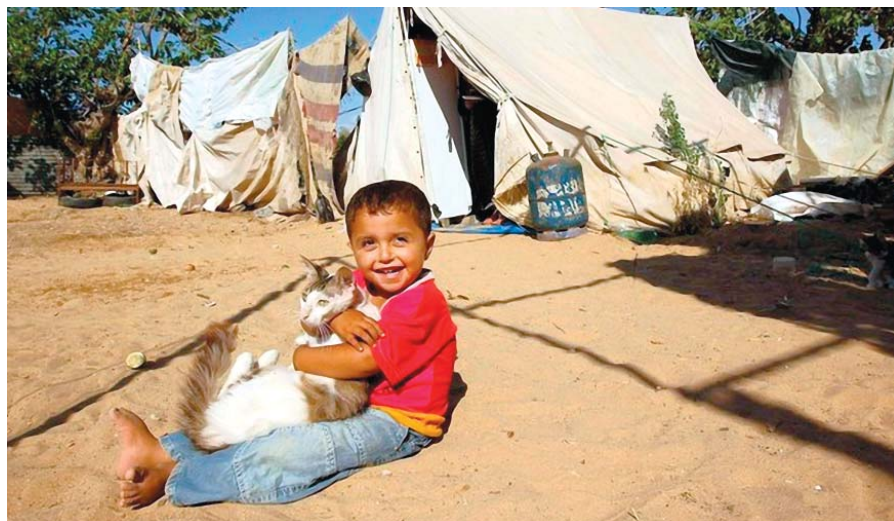
Ratu menyebutkan di surat kabar The Independent (London) edisi 7 Juni, serangan Israel dilakukan terang-terangan dan mengabaikan hukum internasional, hak asasi manusia, dan norma-norma diplomatik. Blokade telah menjadikan Jalur Gaza sebagai penjara terbuka. Istri Raja Abdullah II ini melanjutkan, "Dengan mengandalkan otoritas dan imunitasnya, para petinggi Israel merasa memiliki hak untuk bertindak semena-mena dan tidak memedulikan teriakan dunia internasional."

Di sisi lain, tuntutan agar Israel menerima penyelidikan internasional atas serangan berdarah 31 Mei dianggap percuma. Bothaina Shaaban, penasihat urusan pers untuk Presiden Suriah Bashar al-Assad, mengatakan, tuntutan Barat tersebut hanya dagelan politik. Komite itu tidak akan bekerja sebaik sebuah komite, yang dipimpin mantan jaksas Afrika Selatan, Richard Goldstone, tentang kejahatan perang Israel di Jalur Gaza.

Ia menegaskan, jika komite yang dipimpin Goldstone berakhir tanpa kabar, bisa digambarkan komite penyidik Flotilla Gaza, bila dibentuk, berakhir serupa. Menurut dia, komite penyidik apa pun yang akan dibentuk tidak akan pernah sampai ke DK PBB yang bisa menjatuhkan sanksi atas Israel karena tindakan itu akan diveto AS.

Israel sendiri bersikukuh menolak penyelidikan oleh komisi internasional. Duta Besar Israel di Washington Michael Oren menegaskan, Israel adalah negara demokrasi. Israel memiliki kemampuan dan hak untuk menyelidiki sendiri, tidak mau diselidiki oleh dewan internasional. PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, negaranya tak akan membiarkan suatu situasi di mana senjata bisa dikirim lewat Gaza.

Sikap keras Israel ini oleh sejumlah pengamat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pertama, koalisi koalisi pemerintah PM Israel Benjamin Neta-



BERMAIN: Anak Palestina, Mahmoud Al-Qarawi sedang bermain dengan kucingnya di luar tendanya (09/06). Tenda itu dibangun setelah rumahnya hancur selama serangan Israel ke Gaza tahun lalu

nyahu saat ini berasal dari kubu agama dan nasionalis radikal. Komposisi koalisi pemerintahan Israel saat ini tidak hanya menolak terciptanya perdamaian, tetapi juga berpotensi menimbulkan kekerasan. Aksi kekerasan terhadap armada kapal misi kemanusiaan Gaza itu tidak terlepas dari komposisi koalisi pemerintah Netanyahu itu.

Faktor kedua adalah ideologi soal keamanan yang dianut sejak Israel berdiri tahun 1948. Ada dua pendekatan keamanan yang jadi acuan Israel. Pertama, pendekatan keamanan terhadap Palestina. Kedua, pendekatan keamanan terhadap musuh-musuh lebih luas di Timur Tengah, seperti Iran, Suriah, Hezbollah, dan Hamas.

Pendekatan keamanan Israel terhadap Palestina sudah jelas. Sejak bergulirnya gerakan Zionisme, Israel selalu berusaha

menekuk Palestina dan mengusirnya dari tanah yang diklaim Israel milik nenek moyangnya. Pascaperang 1967, Israel dengan dalih keamanan segera menggerakkan proyek permukiman Yahudi di seantero Palestina dan terus berlanjut di berbagai pemerintahan Israel.

Dalam upaya ekspansi, Israel selalu berusaha menghindari perundingan serius dengan Palestina. Bagi Israel, keberhasilan perundingan tergantung pada pemberian konsesi tanah kepada Palestina.

Serangan militer Israel terhadap misi kemanusiaan Gaza, 31 Mei lalu, merupakan upaya Israel menggagalkan perundingan tidak langsung yang sedang berjalan. Jika Presiden Mahmoud Abbas membekukan perundingan tidak langsung, yang digalang utusan khusus AS George Mitchell, berarti Abbas masuk



KEPALA KELUARGA: Warga Palestina, Muhammed Maadi (49) sedang duduk di pinggir jalan sementara isterinya Hannan (44) melihat ke luar dari pintu rumah di tempat penampungan pengungsi di Gaza. Maadi menganggur karena Israel mencabut izin kerjanya setelah Hamas memenangkan pemilu parlemen pada 2006

skenario Israel. Kubu garis keras Israel memiliki kepentingan, yaitu macetnya perundingan damai.

Derita Gaza

Israel memblokade Gaza sejak Juni 2006, setelah Gilad Shalit, seorang serdadu Israel, ditangkap Hamas dan kemenangan Hamas dalam pemilu parlemen bulan Januari 2006. Blokade itu diperketat setelah Hamas berkuasa mulai Juni 2007. Sejak saat itu, Israel menghentikan pengiriman semua barang, kecuali makanan dan obat-obatan, ke Gaza. Itu pun diawasi.

PBB memperkirakan, akibat blokade itu, sekitar 60 persen dari 1,5 juta penduduk Gaza kekurangan pangan. Tujuh dari 10 orang hidup dari penghasilan kurang dari satu dollar AS dan enam dari 10 orang tak dapat memperoleh air bersih. Tidak berlebihan kalau PBB menyebut blokade atas Gaza itu merupakan "hukuman kolektif" oleh Israel terhadap rakyat Gaza yang tidak semuanya Hamas, yang menjadi sasaran Israel.

Sebenarnya, menurut Jean Shaoul (World Socialist Web Site), blokade Israel tidak akan begitu efektif kalau saja Mesir tidak ambil bagian. Presiden Hosni Mubarak menyetujui untuk mengawasi perbatasan bagian selatan di Rafah. Bahkan, Mesir telah membangun tembok sepanjang 14 kilometer di perbatasan, yang dirancang oleh para insinyur militer AS.

Belum lama ini, Mesir juga menangkap George Galloway, anggota Parlemen Inggris yang mengorganisasi konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza di bawah bendera Viva Palestina, sebuah organisasi karitatif Inggris. Galloway di-"persona non grata" dan dilarang masuk Mesir lagi.

Ketika pecah Perang Gaza (27 Desember 2008-18 Januari 2009), Mesir tidak membuka Rafah kecuali untuk para korban parah. Mesir khawatir bila Rafah dibuka akan banjir pengungsi Palestina. Namun, tragedi "Gaza Freedom Flotilla" telah mendorong Mubarak membuka perlintasan Rafah sehingga bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza lewat Mesir.

Bicara soal Gaza, John Dugard, seorang pejabat PBB, punya pernyataan khusus, "Gaza adalah sebuah penjara dan Israel telah membuang kuncinya." Yang dikatakan John Dugard sama dengan yang diceritakan Rami (21), seorang pemuda Gaza, di sebuah kafe di Gaza City. "Kami seperti hidup di sebuah penjara. Gaza memang penjara. Inilah penjara terbesar di dunia, yang dihuni oleh satu setengah juta orang."

Israel memang mengontrol wilayah udara, laut, dan juga perbatasan, serta semua pintu perlintasan. Ada enam perlintasan yang menghubungkan Gaza dengan dunia luar. Di bagian selatan yang berbatasan dengan Mesir ada Rafah dan Karem Shalom. Empat perlintasan lainnya adalah tiga di bagian timur, yang artinya di perbatasan Gaza dengan Israel, dan satu di utara, perbatasan Gaza dengan Israel. Tiga perlintasan di bagian timur itu adalah Sufa (di perbatasan timur bagian selatan) dan Karni serta Nahel Oze (di perbatasan timur bagian utara), dan satu-satunya di perbatasan utara adalah Erez. Dengan kata lain, setelah kebijakan *disengagement* sepihak yang dilakukan Israel pada tahun 2005, Gaza justru menja-

di kawasan yang disegel, yang tidak bisa dimasuki.

Namun, pasca tragedi "Gaza Freedom Flotilla" dan tekanan dari dunia internasional yang terus menerus, hati petinggi Israel mulai melunak. Israel untuk pertama kalinya (9/6), mengizinkan 130 jenis makanan, terutama makanan ringan, masuk ke Jalur Gaza. Langkah ini mengurangi blokade empat tahun terhadap Gaza.

Bahkan, PM Israel Benjamin Netanyahu (20/6) di Jerusalem, bertemu utusan khusus kuartet perdamaian (AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB) Tony Blair, membahas inisiatif Israel membuka semua gerbang menuju Gaza. Pertemuan tersebut secara prinsip menyetujui pemasokan semua jenis barang ke Jalur Gaza, termasuk bahan bangunan, kecuali senjata dan bahan-bahan yang terkait dengan militer.

Netanyahu meminta Blair melobi Mesir, AS, dan Uni Eropa agar membujuk Presiden Palestina Mahmoud Abbas bersedia membuka pembicaraan dengan Hamas untuk membahas mekanisme operasi gerbang menuju Gaza, termasuk gerbang Rafah antara Mesir dan Gaza. Israel memberi syarat, keputusan memperlonggar secara penuh blokade Gaza harus tidak memberikan manfaat kepada Hamas dan Hamas juga tidak berperan dalam operasi semua gerbang menuju Gaza itu.

Netanyahu juga meminta Blair agar berusaha mencegah pengiriman kapal lagi ke Gaza karena kapal-kapal itu bukan untuk misi kemanusiaan, melainkan hanya memprovokasi Israel.

Menteri Sosial dan Kesejahteraan Israel Isaac B Herzog juga mengatakan, sekarang tidak perlu lagi mengirim kapal untuk menembus blokade Gaza dan kini sudah bisa menyampaikan kepada dunia bahwa Israel telah mengubah kebijakannya menyangkut blokade Gaza. ■ ROY



MAKANAN: Truk-truk pembawa buah dan sayuran diperbolehkan masuk ke Gaza oleh militer Israel (13/06)



Merokok Itu Kampungan

Perokok itu sosok yang egois. Selain merugikan orang-orang di sekitarnya, mereka juga mengeluarkan uangnya untuk rokok enam kali lebih penting dari pendidikan dan kesehatan.

Sudah sebelas tahun, Tian Sian Long berhenti merokok. Pria kurus ini menceritakan pengalamannya jatuh bangun berhenti merokok kepada *Berita Indonesia*. Ia mengatakan, upaya kerasnya untuk berhenti akhirnya membawa perubahan signifikan terhadap kondisi kesehatannya.

Kini, pria berusia 57 tahun yang akrab dipanggil Ian itu sudah bisa menghirup napas dalam-dalam dan dadanya tidak terasa sesak lagi, hal yang tidak pernah dirasakannya ketika dirinya masih gemar merokok. Bahkan, ketika menjadi perokok, Tian kerap kali batuk-batuk pada malam hari.

Saat menjadi perokok, Tian bisa menghabiskan dua sampai tiga bungkus rokok, baik rokok kretek maupun rokok putih. Sebagai perokok berat, seringkali asap rokok yang dikeluarkan dari mulutnya, dia masukkan lagi lewat hidungnya. Artinya, asap rokok itu berputar-putar saja di seputar mulut dan hidung.

Sebagai pecandu rokok berat, kebiasaan ini tetap ia lakoni meski pernah mengidap penyakit TBC. Hingga pada suatu ketika Tian akhirnya memutuskan berhenti merokok yang dipicu oleh teguran seorang

pendeta. "Awal saya berhenti merokok karena mendengar khutbah Pendeta di televisi yang mengatakan merokok menyebabkan Tuhan marah karena paru-paru merupakan organ tubuh ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Kalau saya merokok berarti saya merusak ciptaan Tuhan itu."

"Ketika itu saya pun pelan-pelan mulai menyadari dan kemudian berhenti total," ujar Tian yang berprofesi sebagai jurnalis itu. Setelah meninggalkan kebiasaan merokok, Tian merasakan banyak manfaat.

Selain tubuhnya lebih sehat, dia mampu menabung. Setiap hari, minimal uang 10 ribu rupiah yang biasanya digunakan untuk membeli rokok dikumpulkannya. Kini, jumlah tabungannya telah mencapai hampir 45 juta rupiah. "Tadinya saya berpikir merokok itu bagian dari hak asasi dan gaya hidup. Tapi sekarang, buat saya, orang yang merokok itu orang yang kampungan, tidak menghargai hidup yang diberikan Tuhan," ujar Tian menutup pembicaraan dengan *Berita Indonesia*.

Adanya dampak positif dari keputusan menghentikan kebiasaan merokok diakui pula oleh Kartono Muhamad, pengamat kesehatan dari Indonesia Tobacco Control Network. Dalam pandangannya, nilai

kerugian akibat merokok bahkan lebih besar daripada 'manfaat'-nya, seperti nilai cukai yang didapatkan negara dari rokok. Penghasilan negara dari cukai rokok tercatat 60 triliun rupiah per tahun. Namun, angka itu tidak sebanding dengan nilai kerugian dari timbulnya penyakit akibat kebiasaan merokok tersebut. "Berdasarkan penelitian Kementerian Kesehatan pada 2007, diketahui nilai biaya pengobatan penyakit akibat rokok mencapai 185 triliun rupiah. Biaya itu mencakup anggaran pemerintah melalui rumah sakit pemerintah serta biaya yang dikeluarkan masyarakat," ujar Kartono.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar rokok diekspor saja untuk menghasilkan devisa negara. Kartono juga mengungkapkan kekhawatirannya akan semakin banyaknya kaum perempuan yang merokok dan terpapar asap rokok.

Kekhawatiran Kartono juga dirasakan oleh Nita Yudi, Ketua Umum Wanita Indonesia Tanpa Tembakau (WITT). Soalnya, kian hari, kecenderungan orang Indonesia jadi perokok, terus meningkat. Dalam kurun 2001-2004 saja, naik sampai sembilan kali lipat. Bahkan, menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) sebanyak 25 persen anak Indonesia usia 3-15 tahun sudah mencoba rokok dimana 3,2 persen di antaranya adalah perokok aktif.

Yang lebih memprihatinkan, menurut data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) sebanyak 70% perokok yang

paling banyak adalah masyarakat miskin. Orang miskin di Indonesia mengalokasikan uangnya untuk rokok pada urutan kedua setelah membeli beras. Fakta yang lebih mencengangkan, mereka mengeluarkan uangnya untuk rokok enam kali lebih penting dari pendidikan dan kesehatan. "Ini sangat menyedihkan," sesal Nita, yang langsung mengindikasikan bahwa anak-anak dan perempuan adalah target market dari industri rokok.

Fakta ini membuat organisasi yang didirikan pada 1995 ini tidak mau berpangku tangan. Salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk hidup sehat lewat terapi stop smoking. Terapi tersebut dengan suka hati, diikuti mulai dari anak 13 tahun sampai para petinggi perusahaan. Konon, rata-rata mereka biasa menghabiskan dua bungkus rokok per hari. Lalu, lewat terapi, mereka "dibikin" mual, dan merasa kapok sehingga berjanji tidak merokok lagi.

Dalam upayanya mengumandangkan bahaya merokok, WITT punya banyak pengalaman unik. Salah satunya dengan cara membawa dokter saat melakukan penyuluhan di sebuah perusahaan sekuritas. Ternyata, tiga per empat karyawan di sana perokok berat. Usai penyuluhan, Direktur Keuangan perusahaan tersebut dengan tegas berkeputusan: Kalau ada pegawai yang jatuh sakit akibat merokok, perusahaan

tidak akan menanggung. Seketika seluruh karyawan berhenti merokok.

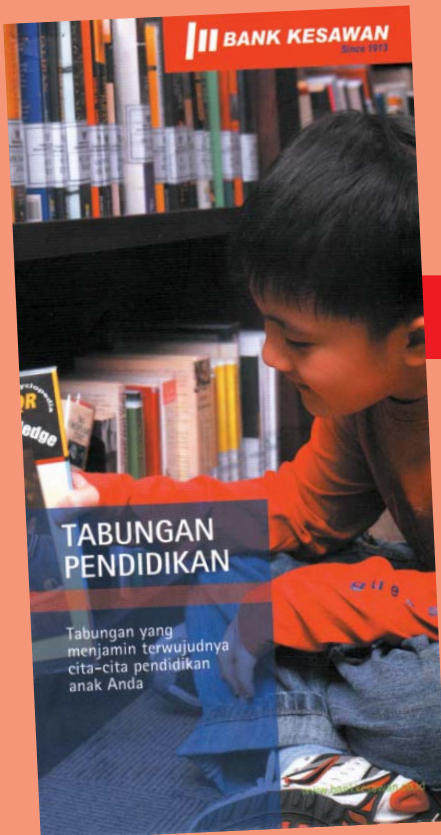
WITT juga berupaya mendesak pemerintah untuk segera mensahkan RPP Tembakau. Dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tersebut nantinya ada larangan produk rokok mensponsori berbagai kegiatan. Juga larangan iklan rokok dipasang di mana-mana, pelarangan menjual rokok secara eceran, hingga larangan menjual rokok kepada anak-anak di bawah 18 tahun.

WITT mengingatkan bahwa rokok bukanlah pemasukan terbesar untuk kas negara. Posisi rokok cuma di urutan ke 19. Nomor satu adalah perdagangan, dan migas di posisi kedua. Jadi, apa yang dikumandangkan produsen rokok bahwa rokok adalah penyumbang devisa terbesar, tidaklah benar. Pekerja atau buruh rokok pun hanya 0,02%, atau sekitar 2 juta orang dari total seluruh petani dan buruh di Indonesia.

Upaya serius dari pemerintah dalam perang melawan bahaya rokok juga sangat diharapkan. Di Jakarta, ketentuan larangan merokok di tempat umum sesungguhnya sudah diatur dalam Perda Nomor 2/2005 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 75/2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang kemudian direvisi menjadi Pergub Nomor 88 Tahun 2010.

Sesuai Pergub revisi ini, ruang khusus perokok di dalam gedung yang wajib disediakan pengelola gedung ditiadakan. Perokok harus pindah ke luar gedung. Jika para pemilik/pengelola gedung tidak memiliki komitmen melaksanakan pergub ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin. "Saya tahu ini banyak yang protes, tapi kenyataannya mengusir orang yang merokok di gedung lebih gampang dari pada membuat ruangan khusus perokok," ujar Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo kepada wartawan di Balaikota, Jumat (21/5).

Selain itu, sedikitnya 20 gedung perkantoran di DKI Jakarta dijadikan proyek percontohan penerapan kawasan dilarang merokok (KDM) mulai Juli 2010. Nantinya, 20 gedung itu segera menerapkan peraturan dilarang merokok di dalam gedung atau ruang tertutup. Gedung yang akan dijadikan proyek percontohan antara lain, gedung Balai Kota DKI Jakarta dan lima kantor Wali Kota Administrasi DKI Jakarta. Sedangkan sisanya antara lain, rumah sakit, sekolah, mal, dan gedung-gedung pemerintahan daerah DKI Jakarta. ■ PAN



Guna melengkapi kebutuhan nasabah yang kian beragam dalam perencanaan biaya pendidikan, Bank Kesawan meluncurkan produk baru Tabungan Pendidikan. Penandatanganan MOU Kerjasama antara Bank Kesawan dengan Asuransi Mega Life di Jakarta tanggal 21 Juni 2008.

Business Director Bank Kesawan - Entjik S. Djafar menjelaskan, melalui Tabungan Pendidikan diharapkan nasabah dapat **merencanakan biaya pendidikan** anak lebih baik. Jangka waktu yang diberikan sangat fleksibel yaitu mulai dari **1 tahun sampai 20 tahun** dan usia penabung pada saat jatuh tempo adalah 65 tahun, dan setoran rutin setiap bulan besarnya **mulai dari Rp. 100.000,- atau kelipatannya dengan maksimum sampai dengan Rp5 juta**. Mudah melakukan setoran rutin karena secara otomatis Bank Kesawan akan mendebet rekening Tabungan atau Giro setiap bulannya.

Bank Kesawan Luncurkan Tabungan Pendidikan

Selain kemudahan-kemudahan di atas, Tabungan Pendidikan Bank Kesawan juga memberikan perlindungan **asuransi jiwa**. Dalam hal ini apabila penabung meninggal dunia maka setoran rutin bulannya akan diteruskan oleh Asuransi Mega Life. Jika nasabah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap atau meninggal dunia maka ahli waris akan mendapatkan **santunan duka sebesar 250%** dari kumulatif saldo tabungan atau maksimum Rp500 juta, dan manfaat santunan rawat jalan/inap sebesar biaya rumah sakit atau maksimum 25% dari saldo Tabungan Pendidikan.

Sesuai dengan visi Bank Kesawan untuk menjadi Bank terdepan di kelasnya, kini lebih memantapkan posisi dalam kancah persaingan perbankan nasional. Hal ini didukung oleh 32 jaringan layanan yang tersebar di 10 kota di Indonesia dan ATM Kesawan yang siap untuk memberikan pelayanan selama 24 jam sehari serta **bebas biaya transaksi ATM** untuk info saldo, tarik tunai dan transfer antar rekening Bank Kesawan. Akses jaringan ATM Kesawan tersebar di lebih dari **12.000 mesin ATM** yang berlogokan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Informasi lebih lanjut mengenai Tabungan Pendidikan Bank Kesawan, dapat menghubungi Customer Service kami yang terdekat di kota Anda:

JAKARTA: 021-350.8888; MEDAN: 061-415.2929; BANDUNG: 022-422.0618; SURABAYA: 031-568.7530; DENPASAR: 0361-233.777; PEKANBARU: 0761-33308; BATAM: 0778-456.112; TANJUNG BALAI: 0623-92688 dan PEMATANG SIANTAR: 0622-29666.

Ayo Kerja Setiap Hari

Program Aksi Semangat Indonesia mengajak masyarakat untuk lebih produktif dalam bekerja dan berkarya.

Sebagai salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam dan ditopang dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta jiwa, Indonesia berpotensi menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Potensi ini bisa dimaksimalkan jika masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya meningkatkan produktivitas untuk menciptakan daya saing yang semakin kompetitif dalam menghadapi persaingan ekonomi global yang semakin terbuka. Apalagi Indonesia sudah masuk dalam kelompok negara-negara G-20, dan masuk zona ACFTA yang berlaku sejak awal Januari 2010.

Namun mutu pendidikan, kesehatan, angka melek huruf dan perkembangan ekonomi masih masih jauh dari harapan, yang juga semakin memperlemah daya saing Indonesia akibat rendahnya produktivitas sumber daya manusia Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Hal

itu dapat dilihat dari indeks pembangunan Indonesia (*human development index-HDI*), yang masih rendah.

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*) tahun 2009, indeks pembangunan manusia Indonesia masih berada di posisi 111 dari 182 negara. Sedangkan Singapura jauh di atas Indonesia, berada di posisi 23, Brunei 30, Malaysia 66, dan Thailand 87. Tak hanya itu, daya saing Indonesia juga makin menurun. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh World Economic Forum di tahun 2009, peringkat daya saing Indonesia berada di posisi 42 dari 57 negara, sedangkan untuk Singapura menduduki posisi 3, dan Malaysia di posisi 18. Kini Indonesia makin jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

Berangkat dari keprihatinan tersebut, PT Kalbe Farma Tbk, sebagai salah satu



KICK OFF: Konferensi Pers Aksi Semangat Indonesia di Mario's Place, Jakarta (19/05/2010)

perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara yang merupakan produsen obat resep maupun obat bebas dan minuman energi dan nutrisi, mengadakan Program "Aksi Semangat Indonesia" melalui salah satu merek Kalbe Farma yaitu Fatigon, multivitamin kebugaran tubuh untuk bekerja lebih optimal. Program ini sebagai wujud dan kepedulian dan tanggung jawab perusahaan swasta sekaligus yang pertama kali dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih semangat, tidak mudah menyerah, serta mau berjuang untuk bekerja dan berkarya melakukan yang terbaik. Masyarakat diajak bersama-sama melakukan AKSI (Ayo Kerja Setiap Hari) yang sarat edukasi, inspirasi dan hiburan menuju masyarakat yang produktif.

Dimulai dengan menggelar aksi sema-

Ratnawati Sutedjo

Terpanggil Menolong Orang Tuna Rungu

Ratnawati Sutedjo selalu meyakini bahwa hidup semua orang ada dalam rencana Tuhan. Sebelumnya ia tidak pernah berpikir akan membantu orang-orang berkebutuhan khusus, khususnya tuna rungu.

Pengalaman hidupnya telah menuntunnya untuk memperhatikan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Sekitar tahun 2002 ia pernah jatuh sakit sehingga membuatnya berada dalam posisi titik terendah dalam hidupnya. Saat itu, kondisi tubuhnya sangat lemah bahkan susah untuk menggerakkan badan. "Saya benar-benar sakit. Duduk saja lemas," katanya. Selama dua bulan ia tidak bisa bekerja dan melakukan aktivitas kesehariannya. Sakit yang dideritanya membuatnya merasa tidak berguna dan kesepian.

Namun, justru dalam ketidakberdayaan karena sakit tersebut, ia mendapat

semacam dorongan ataupun ilham yang ia sendiri tidak memahami darimana datangnya dorongan tersebut. "Entah darimana," katanya. Saat itu, sakit yang dirasakannya malah membersihkan sebuah tanda tanya dalam pikirannya. "Bagaimana dengan orang-orang cacat itu, mereka juga mengalami kesendirian, ketidakmampuan, ketidakberdayaan," kata suara dalam hatinya.

Suara itu memunculkan kerinduan dalam hatinya untuk menolong mereka yang cacat. "Seandainya dimungkinkan ada sebuah kesempatan bisa bertemu dengan mereka, orang yang mengalami kekhususan dan bisa membantu diri mereka, saya akan melakukannya,"

katanya. Bermula dari kerinduan itulah, ia bertekad untuk membuat hidupnya lebih berarti bagi orang lain dengan menolong orang berkebutuhan khusus.

Sebagai langkah awal, ia menjadi teman dari beberapa gadis tuna rungu. Selama berteman dengan mereka, ia merasakan ada hal yang lebih besar yang mesti ia lakukan selain menolong gadis-gadis itu menemukan rasa bahagia dalam hidup mereka. Banyak dari temannya itu tidak bekerja.

Ia kemudian mendirikan "Precious One" di Jakarta, sebuah yayasan sosial untuk menolong orang, khususnya tuna rungu yang mengalami gangguan pendengaran dan sulit berkomunikasi. Di sana mereka dibimbing untuk menjahit, memproduksi alat peraga atau gift dan segala macam produksi.

Ia ingin membina mereka sehingga



PAGI CERIA: Aksi Semangat Jalan Sehat yang digelar di Lapangan Parkir Timur, Senayan, Jakarta (16/06/2010) memecahkan rekor MURI dimana sekitar 15.000 peserta membunyikan alarm weker secara bersamaan

ngat di perkantoran pada 17 Mei lalu. Masyarakat diberi apresiasi tinggi bila berangkat kerja tidak terlambat pukul 07.00-08.00 pagi, di beberapa gedung perkantoran di Jakarta, Surabaya dan Bandung. Kemudian pada 19 Mei, mengambil momen kebangkitan nasional,

digelar acara khusus bertajuk Kick off Fatigon "AKSI SEMANGAT INDONESIA" di Mario's Place Jakarta. Beberapa tokoh dihadirkan untuk memberi motivasi dan inspirasi lewat pengalaman serta prestasinya yakni H. Ahmad Solihun Ihsan-Pendiri Radio AS Indramayu, Susy Su-

Acara serupa juga diadakan di Surabaya pada 18 Juni 2010 dan di Bandung pada 1 Agustus 2010.

Kampanye program Aksi Semangat Indonesia juga akan berlanjut di media digital website dan program TV. Fatigon akan mengadakan malam apresiasi Fatigon

santi-Srikandi Bulu Tangkis Indonesia, Agung Nugroho Susanto-Pengusaha Laundry Kiloan, Simply Fresh). Turut pula hadir Widjanarko Loka Djaja (Sales & Marketing Director PT Kalbe Farma), Moedjiman (Ketua Dewan Pelatihan Kerja Nasional), Abdul Wahab Bangkono, PLT Dirjen Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas, Depnakertrans, serta Ratnawati Sutedjo (Pendiri Precious One).

Segudang rangkaian kegiatan masih terus dilakukan. Seperti Aksi Semangat Jalan Sehat sekaligus memecahkan rekor MURI (membunyikan alarm weker dengan peserta terbanyak) pada 6 Juni di Jakarta dengan peserta 15.000 orang.



memiliki rasa percaya diri sekaligus menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang-orang cacat bisa bekerja. Karena banyak sekali kesempatan kerja yang sulit mereka dapat di lingkungan perusahaan karena keterbatasan fisik tersebut. Padahal menurutnya, kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat

diakui dalam Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, pasal 28 yang menyatakan bahwa perusahaan harus mempekerjakan paling tidak satu persen untuk setiap 100 pekerja.

Langkanya perusahaan yang mau menerima orang-orang "berkebutuhan khusus" ini membuat mereka tidak dapat berkarya. Banyak perusahaan yang menggunakan berbagai alasan untuk menolak karyawan yang memiliki cacat. Hal ini sangat ia sayangkan.

Ia pun berpikir, seandainya bisa, ia mau membalik peraturan itu. Ia justru mau menerima orang berkebutuhan khusus dibanding orang normal."Saya, semuanya orang berkebutuhan khusus, hanya satu orang normal yang saya terima," katanya. Memang, dalam kondisi-kondisi tertentu dengan orang berkebutuhan khusus memang tidak bisa 100% diterima di perusahaan. Namun, sekali lagi kesempatan dan kemampuan

mereka perlu juga dipertimbangkan.

Ia sendiri memang mengakui, sudah cukup banyak perusahaan menerima orang-orang berkebutuhan khusus. Seperti di PT Kalbe Farma ada 1 orang yang menderita down syndrome, di rumah sakit pun sudah menerima orang tuna rungu di bagian administrasi.

Ketika ditanya mengenai produktivitas ia mengatakan, kita juga harus memiliki kreativitas. Justru sekarang itu kita harus ditantang untuk kreatif. Kreatif menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan sesuatu yang baru. Serta memiliki semangat, tanpa itu kita tidak akan punya tujuan hidup. Masih ada harapan, jangan pernah berkata, bahwa saya tidak bisa. Dengan belajar dari banyak orang, tidak punya tangan, tapi bisa melukis dengan kaki. Tidak punya tangan tapi bisa menyeter. "Kita bisa belajar dari mereka. Kendala apapun bisa dilewati, asal ada kemauan," katanya. ■ **BS-BI**

aksi semangat Indonesia dengan bekerja sama dengan Metro TV melalui program Kick Andy tanggal 24 Juli. Sebagian hasil penjualan tiket pada kegiatan-kegiatan tersebut akan didonasikan kepada yayasan sosial peduli tuna rungu, Precious One, dalam bentuk pemberian alat-alat kerja dan perlengkapan pendukung kerja untuk peningkatan produktivitas mereka.

Pilar Produktivitas

Program Aksi Semangat Indonesia memiliki arti sangat penting sebab akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat tentang arti produktivitas bagi setiap individu. Hal itu diungkapkan Abdul Wahab Bangkora, Plt. Dirjen Pembinaan dan Pelatihan Produktivitas, Kemakertrans. Pihaknya menyambut baik dilakukannya aksi semangat Indonesia yang dilakukan Kalbe Farma. Namun ia juga menegaskan, peran serta pemerintah dalam meningkatkan produktivitas masyarakat sangat dibutuhkan untuk menunjukkan komitmennya memfasilitasi masyarakat agar bisa membuka lapangan usaha, salah satunya dengan memberi kemudahan prosedur pinjaman modal di bank.

Kepada *Berita Indonesia*, Abdul mengatakan, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing masyarakat, Indonesia harus menyiapkan benteng-

berupa sumber daya manusia yang berkompeten dengan meningkatkan pendidikan dan pelatihan. Pemerintah, mulai dari presiden hingga DPR memberikan dukungan pembiayaan untuk membangun infrastruktur dan membangun SDM. Sehingga bisa menghasilkan tenaga-tenaga trampil yang bisa memenangkan persaingan. "Itu yang penting. Itulah pilar utama untuk meningkatkan produktivitas," katanya.

Sedangkan untuk meningkatkan produktivitas menurut pakar produktivitas yang juga Ketua Dewan Pelatihan Kerja

Nasional Moedjiman mengatakan diperlukan beberapa strategi dasar yakni menanamkan budaya produktif. Karena ini suatu budaya maka tidak akan tercapai dengan hanya single event. Membangun budaya itu memerlukan proses yang terus menerus, sistematis dan komprehensif; SDM berkualitas; kompeten dan profesional; inovasi teknologi yang terus menerus supaya tidak ketinggalan. Empat strategi ini harus seiring sejalan menuju semangat Indonesia membangun bangsa yang lebih produktif dengan daya saing yang tinggi. ■ RA, BS, BI

Agung Nugroho Susanto "Saya Yakini, Saya Tekuni, Saya Berhasil"

Meski sempat mendapatkan tawaran bekerja dengan gaji 15 juta per bulan di Bank Indonesia setelah lulus dengan IPK 3,3 dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, tidak menyurutkan hati Agung Nugroho Santoso (25) untuk menggeluti bisnis cucian laundri kiloan.



Pria muda asal Yogyakarta ini lebih memilih melanjutkan usaha yang dirintisnya sejak kuliah pada 28 Februari 2006 ketimbang menjadi pegawai bank. Dalam kurun waktu empat tahun dengan modal awal hanya satu mesin cuci dan satu mesin pengering kini ia telah memiliki Laundry kiloan Simply Fresh yang tersebar di 130 outlet di 50 kota di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Bahkan iapun berencana buka cabang di luar negeri.

Usaha laundry kiloan yang dianggap sebagai bisnis recean ternyata memberikan penghasilan cukup besar. Pendapatan sebesar 15 juta bisa ia peroleh hanya dalam satu hari dan

meraup keuntungan 2 milyar/bulan. "Saya ingin buktikan bahwa ini pilihan hidup saya. Dan saya yakini, saya tekuni, saya bisa berhasil," katanya. Menurutnya, menjadi seorang entrepreneur saat ini adalah pilihan bukan keterpaksaan.

Bukan karena terpaksa karena tidak mendapatkan pekerjaan. Bermodal tekad tersebut, Simply Fresh kini berkembang pesat. Menurutnya apapun pekerjaannya, profesinya harus dikerjakan dengan ikhlas dengan semangat, kerja keras dan tidak perlu mengeluh. Yakini berhasil, yakin memiliki semangat yang besar. Otomatis semua akan menjadi lebih mudah. "Dari pada kita hanya bisa mengeluh, malahan kita hanya rugi sendiri. Langsung action saja, tidak terlalu banyak berpikir, action dan modal utama adalah dari skill kita sendiri. Jangan menganggap modal itu hanya berupa materi uang," katanya dengan penuh semangat. ■



H. Ahmad Solihun Ihsan Menjadi Kebanggaan Keluarga

Lahir dengan cacat tidak memiliki kaki, tidak menghambat Ahmad Solihun Ihsan atau yang biasa dipanggil Solihun untuk meraih sukses. Ia berhasil mendirikan Radio AS Indramayu sejak tahun 2001. Dari awal lima karyawan kini usahanya telah memiliki 25 orang karyawan. Dengan tinggi kurang lebih 50 sentimeter, dia membuktikan bahwa dirinya mampu membanggakan keluarga besarnya. "Kita harus semangat,

kita harus kerja. Kita harus menunjukkan setidak-tidaknya, kita harus jadi kebanggaan keluarga, bukan untuk orang lain. Nanti orang lain buahnya. Kita harus menunjukkan kepada keluarga kita, saya juga bisa. Nanti buahnya, ya kaya ginilah barangkali (keadaannya sekarang). Ini (semua) juga buah dari jatuh bangun saya dari ejekan orang dan segala-galanya. Ini barangkali hari ini saya bisa ngomong sama mas, dan

mbak-mbak. Barangkali 25 tahun yang kemarin saya tidak didengar. Istilahnya, saya mau ngomong apapun mereka tidak mau mendengar. Ini barangkali buahnya dari jatuh bangun saya. Jadi bekerja terus, buahnya kita akan terima," katanya berpesan untuk tidak pantang menyerah. ■





Penandatanganan deklarasi Nabaja di TMII, Jakarta (31/05/2010)

Eksis di Era Globalisasi

Generasi muda Batak Jabodetabek (Nabaja) bertekad mengawal dan mempertahankan identitas dan keutuhan budaya Batak.

Sama seperti suku-suku lainnya di Indonesia, suku Batak juga memiliki kekayaan budaya yang tak ternilai. Ada beberapa unsur budaya Batak yang bisa dijadikan contoh. Dari segi bahasa misalnya, dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari, orang Batak menggunakan beberapa logat, ialah: Logat Karo yang dipakai oleh orang Karo; Logat Pakpak yang dipakai oleh Pakpak; Logat Simalungun yang dipakai oleh Simalungun; Logat Toba yang dipakai oleh orang Toba, Angkola dan Mandailing.

Dari segi pengetahuan, orang Batak mengenal sistem gotong-royong kuno dalam hal bercocok tanam. Dalam bahasa Karo aktivitas itu disebut Raron, sedangkan dalam bahasa Toba hal itu disebut Marsiurupan. Sekelompok orang tetangga atau kerabat dekat bersama-sama mengerjakan tanah dan masing-masing anggota secara bergiliran.

Sedangkan dari segi nilai kekerabatan, masyarakat Batak utamanya terwujud dalam pelaksanaan adat Dalihan Na Tolu,

dimana seseorang harus mencari jodoh di luar marganya, orang-orang dalam satu kelompok saling menyebut Sabutuha (bersaudara), untuk kelompok yang memberi gadis untuk diperistri disebut Hula-hula. Kelompok yang menerima gadis disebut Boru.

Unsur-unsur budaya Batak termasuk yang disebutkan di atas belakangan mulai luntur di kalangan generasi muda Batak. Pengaruh globalisasi dan individualisme menjadi beberapa faktor penyebab rendahnya apresiasi dan penghargaan terhadap budaya itu. "Rasa bangga terhadap suku pun, sangat berkurang. Sangat menyedihkan, ada orang Batak yang malu untuk mencantumkan marganya sebagai bagian dari jati dirinya," kata Robert Ketaren dari Etnis (Puak) Karo, saat deklarasi Nabaja/Muda-mudi Batak se-Jabodetabek, di Anjungan Sumatra Utara, TMII, Jakarta 31 Mei 2010. Bahkan lebih ironis lagi menurutnya, banyak generasi muda Batak yang tidak tahu lagi silsilahnya, yang sangat penting dalam mempererat tali persaudaraan.

Di samping itu, dalam hal bahasa, generasi muda Batak berlomba-lomba menguasai bahasa asing namun mengabaikan bahasa daerahnya. Sehingga tidak sedikit yang meragukan bahasa Batak bisa bertahan lama, karena semakin sedikit yang menguasainya.

Leo Nababan Staf Menkokesra yang juga salah satu Ketua Dewan Pembina Nabaja (Naposo Batak Jabodetabek), mengungkapkan kekhawatiran tersebut. "Waktu kawan-kawan ini datang (panitia deklarasi) ke kantor saya di Menkokesra, mereka berbahasa Indonesia. Saya tantang bahasa Batak," katanya. Bagaimana membuat sebuah organisasi muda-mudi orang Batak, kalau tidak mengerti bahasa Batak, kata Leo mengingatkan. Menurutnya yang lebih lucu lagi, baru 2-3 tahun merantau di Jakarta, tapi ketika diajak berbahasa Batak, ngotot menggunakan bahasa Indonesia.

Sementara itu masalah lain yang perlu diwaspadai oleh generasi muda Batak adalah kekerasan yang kini seolah menjadi tren dan terjadi dimana-mana. Seperti kejadian kerusuhan Pilkada Sibolga dan Pilkada Humbanghasundutan, Sumatera Utara, belum lama ini. Begitu juga dengan kekerasan brutal massa yang menimpa keluarga Paris Manalu (18/5). Mereka membakar Paris Manalu beserta dua anggota keluarganya sampai mati dengan tuduhan Manalu memelihara begu ganjang (jin).

Kejadian tersebut menurut Leo Nababan tidak akan terjadi jika tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Tradisi Batak dengan konsep "Dalihan Natolu" manat mardongan tubu, somba marhulahula, elek marboru, bisa menjadi panduan dalam mengatur pola hubungan dalam masyarakat dan mempererat kebersamaan. Orangtua dalam hal ini menjadi harapan utama dalam menanamkan nilai-nilai luhur budaya Batak bagi generasi penerus.

Untuk itulah, lewat organisasi muda-mudi/Naposo Batak Jabodetabek (Nabaja) yang dideklarasikan lima Puak Batak yaitu Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Simalungun, Batak Karo dan Batak Pakpak, generasi muda Batak bertekad untuk meningkatkan kekerabatan, memelihara nilai-nilai leluhur adat dan budaya dengan keragaman dan potensinya.

Gusti Terkelin Surbakti yang juga pengusaha jasa transportasi Lorena-Karina berharap, wadah ini bisa bermanfaat, khususnya agar muda-mudi tetap memelihara persatuan dan kesatuan serta memelihara budaya dan identitas sebagai orang Batak di tengah-tengah Kota Jakarta dengan kesibukannya. Sehingga budaya dan jati diri tetap eksis walaupun di tengah pengaruh globalisasi yang makin intens. ■ SAN, BI

Data di Atas Awan

Meski sedang mencari bentuk terbaiknya, cloud computing memungkinkan kita bekerja tanpa harus terikat dengan satu komputer karena semua aplikasi dan data yang dibutuhkan ada di internet.

Cloud Computing atau komputasi awan beberapa tahun terakhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pelaku dunia teknologi informasi (TI). Sejumlah nama besar seperti IBM, Microsoft, Google, dan Apple, berlomba-lomba memberikan layanan berbasis awan ini.

IBM di paruh akhir 2009 telah meluncurkan LotusLive, layanan kolaborasi berbasis cloud. Microsoft menggadang Windows Azure, sistem operasi berbasis cloud yang akan menjadi masa depan Windows OS. Apple telah menyediakan layanan Mobile Me yang memungkinkan pengguna produk Mac untuk melakukan sinkronisasi data ke dalam cloud.

Sementara Google sudah lebih dulu memberikan layanan berbasis cloud yakni Google Docs yang memungkinkan pengguna membuat dokumen atau bekerja dengan *spreadsheet* secara online tanpa perlu software ter-*install* di PC atau notebook.

Bahkan Google sudah menyiapkan sistem operasi cloud-nya, Chrome OS, yang bisa menjadi ancaman serius bagi para penyedia sistem operasi lain. Namun boleh dibilang, keberhasilan Salesforce.com-lah yang membuka mata dunia bahwa *cloud computing* punya masa depan yang cerah.

Pada dasarnya, cloud computing adalah "layanan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan atau diakses oleh pelanggannya melalui jaringan internet". Kata "cloud" sendiri merujuk kepada simbol awan yang digunakan di dunia TI untuk menggambarkan jaringan internet (*internet cloud*).

Kita bisa menyebut layanan yang ada di internet berbasis cloud computing apabila: Pertama, layanan bersifat "On Demand", pengguna dapat berlangganan atau membayar untuk layanan yang mereka butuhkan/gunakan. Kedua, layanannya bersifat elastis/*scalable*, di mana pengguna bisa menambah atau mengurangi jenis dan kapasitas layanan yang dia inginkan kapan saja dan sistem selalu bisa mengakomodasi perubahan tersebut. Ketiga, layanan sepenuhnya dikelola oleh penyedia/provider, dan yang dibutuhkan oleh pengguna hanyalah komputer personal/notebook ditambah koneksi internet yang cepat.



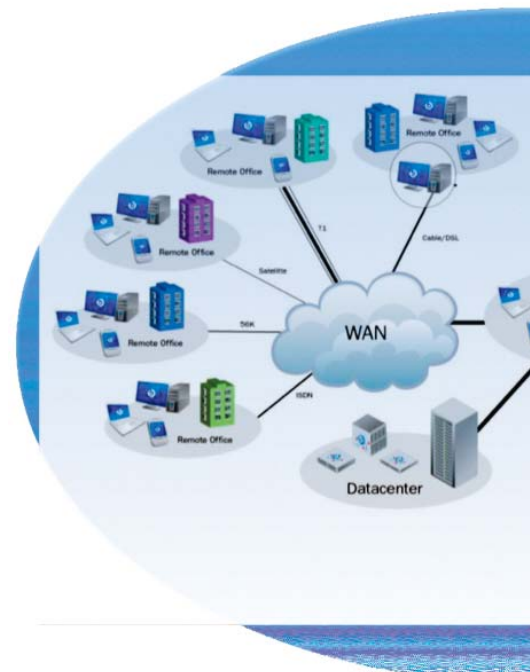
Aplikasi chatting di EyeOS

Atau sederhananya, kita tidak perlu membeli lalu meng-*install* software karena sudah tersedia di internet ; kita tidak perlu kuatir akan semakin bertambah banyaknya data karena biaya penyimpanan online bisa selalu disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus membeli hardisk baru dan tidak perlu takut akan hardisk rusak dan lupa backup ; dan kita bisa bekerja di komputer manapun tanpa harus terikat dengan satu komputer karena semua aplikasi dan data yang dibutuhkan ada di internet. Dalam hal ini, perusahaan bisa menghemat banyak uang dalam hal pengeluaran membeli aplikasi maupun hardisk.

Sejauh ini, cloud computing terbagi dalam 3 jenis layanan yaitu : Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Infrastructure as a Service (IaaS).

Software as a Service (SaaS) merupakan layanan cloud computing yang lebih dulu populer. SaaS merupakan evolusi lebih lanjut dari konsep ASP (Application Service Provider). Sesuai namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bisa menggunakan software dengan cara berlangganan via web. Mereka tidak perlu meng-*install* software tersebut di komputernya atau membeli lisensi. Kekurangan layanan ini adalah, pelanggan tidak memiliki kendali penuh atas software yang mereka sewa.

Contoh layanan SaaS cukup banyak. Misalnya layanan CRM online Salesforce.com yang dikomandoi Marc Benioff dan telah menjadi ikon SaaS. Selain itu, Zoho.com menyediakan layanan SaaS berupa *word processor* seperti Google Docs, project management, hingga invoicing online. Layanan akunting online pun tersedia, seperti yang diberikan oleh Xero.com dan masih banyak lagi. IBM



Google Chrome OS

dengan Lotuslive.com nya dapat dijadikan contoh untuk layanan SaaS di area kolaborasi/unified communication.

Sedangkan Platform as a Service (PaaS) adalah layanan yang menyediakan modul-modul siap pakai yang dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi, yang hanya bisa berjalan di atas platform tersebut. Seperti juga layanan SaaS, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar seperti memory, media penyimpanan, processing power dan lain-lain, yang semuanya diatur oleh provider layanan ini. Pionir di area ini adalah Google AppEngine, yang menyediakan berbagai tools untuk mengembangkan aplikasi di atas platform Google, dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan Django.

Facebook juga bisa dianggap menyediakan layanan PaaS, yang memungkinkan kita untuk membuat aplikasi di atasnya. Salah satu yang berhasil menanggung untung besar dari layanan PaaS Facebook adalah perusahaan bernama Zynga, yang



mendasar dengan layanan data center saat ini adalah IaaS memungkinkan pelanggan melakukan penambahan/pengurangan kapasitas secara fleksibel dan otomatis. Salah satu pionir dalam penyediaan IaaS ini adalah Amazon.com yang meluncurkan Amazon EC2 (Elastic Computing Cloud). Layanan Amazon EC2 ini menyediakan berbagai pilihan persewaan mulai CPU, media penyimpanan, dilengkapi dengan sistem operasi dan juga platform pengembangan aplikasi yang bisa disewa per jam.

Intinya, cloud computing adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan kita “menyewa” sumber daya teknologi informasi (software, processing power, storage, dan lainnya) melalui internet dan memanfaatkan sesuai kebutuhan kita dan membayar secukupnya pula. Pengguna bisa mendapatkan layanan-layanan yang hanya dibutuhkan sewaktu-waktu saja.

Sejarah Cloud Computing

Ide awal dari cloud computing datang dari John McCarthy pada 1960. Pakar komputasi MIT yang dikenal juga sebagai

bertahan lama karena kualitas dan kecepatan jaringan komputer saat itu masih belum memadai sehingga orang-orang akhirnya kembali memilih kenyamanan PC Desktop, seiring dengan semakin murah nya harga PC.

Kemudian di akhir era 90-an muncul konsep ASP (Application Service Provider). Seiring dengan semakin meningkatnya kualitas dan kecepatan jaringan komputer sehingga akses aplikasi menjadi lebih cepat, banyak pemilik data center menawarkan ‘hosting’ aplikasi yang dapat diakses oleh pelanggan melalui jaringan komputer. Dengan demikian pelanggan tidak perlu membeli perangkat data center.

Berbagai teknik baru dalam pengembangan perangkat lunak terutama di area pemrograman berbasis web di awal abad 21 termasuk koneksi jaringan yang semakin cepat membuat banyak situs tidak lagi menyajikan konten statis tapi sudah berupa aplikasi yang kompleks.

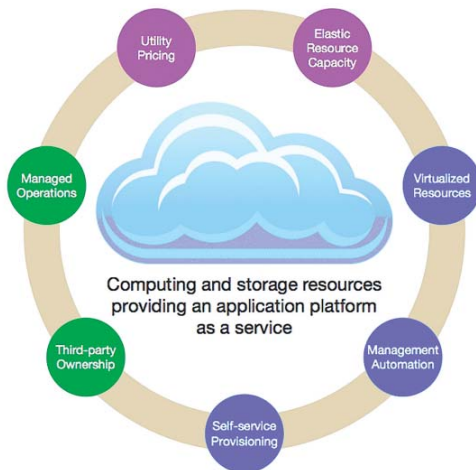
Popularitas cloud computing kemudian bangkit saat Salesforce.com meluncurkan layanan aplikasi CRM dalam bentuk Software as a Service di awal 2000-an. Marc Benioff ex VP di Oracle dengan misinya yang terkenal yaitu “The End of Software”, berhasil mewujudkan visi bos-nya di Oracle, Larry Ellison, tentang Network Computing satu dekade kemudian.

Selanjutnya Cloud Computing mulai diadopsi berbagai pelaku dunia TI. Amazon.com meluncurkan Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), Google dengan Google App Engine-nya, tak ketinggalan raksasa biru IBM meluncurkan Blue Cloud Initiative. Lewat berbagai jurnal dan media massa, cloud computing mengokohkan dirinya sebagai teknologi masa depan.

Meski teknologi cloud computing disambut semarak di dunia namun tidak sedikit pihak yang apatis dan memandangnya sebagai ide yang konyol.

Mereka memandang, cloud computing sangat membutuhkan koneksi internet. Tanpa internet, berarti pengguna tidak bisa berbuat apa-apa alias tidak bisa bekerja. Kedua, aplikasi dan penyimpanan data online sangat tergantung pada pihak ketiga yang berarti bila server mereka sedang “down” berarti kita tidak bisa bekerja/mengakses situs mereka. Ketiga, masalah kepercayaan. Apakah kita sudah siap mempercayakan data penting perusahaan kepada pihak ketiga?

Faktor lain yang menghambat penerapan cloud computing di antaranya infrastruktur internet yang masih terbatas; tingkat kematangan pengguna internet, yang masih menjadikan internet cuma sebagai media hiburan atau sosialisasi; dan tingginya investasi yang dibutuhkan menyediakan layanan cloud karena harus menggabungkan infrastruktur jaringan, hardware dan software sekaligus. ■ CTD



Economic Elements:
Pay-as-you-go, pay-as-you-grow, no CAPEX.

Architectural Elements:
Simple, abstract environment for development.

Strategic Elements:
Focus on your core business, leave the rest to someone else.

tahun lalu berhasil meraup keuntungan bersih lebih dari US\$ 100 juta, lebih besar dari keuntungan yang didapat oleh Facebook sendiri. Zynga memperoleh untung besar dari aplikasi game yang membuat ketagihan yakni Farmville, yang hingga kini telah berhasil menjadikan 80 juta lebih penduduk Facebook menjadi petani yang rajin mencangkul, menanam dan panen serta memerah susu sapi demi keuntungan mereka.

Yang terakhir, Infrastructure as a Service (IaaS) merupakan layanan yang “menyewakan” sumberdaya teknologi informasi dasar, yang meliputi media penyimpanan, processing power, memory, sistem operasi, kapasitas jaringan dan lain-lain, yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Model bisnisnya mirip dengan penyedia data center yang menyewakan ruangan untuk co-location. Perbedaan

salah satu pionir intelegensia buatan ini menyampaikan visi bahwa “suatu hari nanti komputasi akan menjadi infrastruktur publik seperti listrik dan telepon”.

Namun baru di tahun 1995 lah, Larry Ellison, pendiri Oracle, memunculkan ide “Network Computing” sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai *desktop computing* dengan Windows 95-nya.

Larry Ellison menawarkan ide bahwa sebetulnya user tidak memerlukan berbagai software, mulai dari sistem operasi dan berbagai software lain dijejalkan ke dalam PC Desktop mereka. PC Desktop bisa digantikan oleh sebuah terminal yang langsung terhubung dengan sebuah server yang menyediakan lingkungan yang berisi berbagai kebutuhan software yang siap diakses oleh pengguna.

Namun ide “Network Computing” tidak

Tidak Semua Benar

Tidak semua kelebihan makanan organik itu benar adanya.

Saat memesan makanan di sebuah restoran cepat saji, sang pelayan menawarkan nasi organik. "Maaf bu nasi biasanya habis, mau diganti nasi organik? Cukup tambah Rp 500," kata si pelayan ramah. Dengan cepat saya mengangguk. "Tak apalah, toh nasi organik lebih sehat," kata saya dalam hati.

Tidak seperti beberapa tahun lalu, kini makanan organik makin mudah didapat di pasaran. Walaupun harganya lebih tinggi dari makanan biasa namun peminatnya makin hari makin meningkat. Sebenarnya apa yang membedakan makanan organik dari makanan yang umum ada di pasaran? Lalu benarkah slogan yang diusung bahwa makanan organik selalu lebih sehat?

Menurut Bapak dari teori organik, Dr. Henry Chang, makanan organik berarti semua jenis produk yang berasal dari pertanian yang bebas dari pupuk buatan, bahan kimia atau bahan tambahan sejak awal pemrosesan. Semua bahan murni berasal dari alam.

Sayur-sayuran mentah, buah-buahan bebas dari residu pestisida. Ikan dan daging bebas dari formalin dan asam

borak sebagai pengawet. Minuman sirup, makanan ringan, teh, beras, bebas dari pengawet, pewarna, perasa buatan. Bahkan kacang kedelai, tomat, buah-buahan juga bebas dari rekayasa genetika.

Dengan terbebas dari berbagai bahan kimia diyakini makanan jenis ini lebih sehat untuk dikonsumsi. Tubuh kita tidak lagi dimasuki toksin-toksin (racun). Toksin dapat berasal dari udara sekitar kita serta makanan yang kita makan yang mungkin berasal dari sumber-sumber yang telah terkena pencemaran. Makanan-makanan tersebut seringkali mengandung bahan pengawet, pewarna, perasa buatan dan sebagainya.

Coba kita bayangkan apa jadinya tubuh kita bila setiap hari terkontaminasi oleh toksin yang berasal dari makanan tak sehat. Secara perlahan, penumpukan toksin-toksin di dalam tubuh kita akan menyerang sel-sel tubuh dan sistem kekebalan tubuh. Melalui peredaran darah, toksin akan menyerang sistem pencernaan (lambung dan usus), sistem penyaringan (hati dan ginjal), dan sistem endokrin (kelenjar pituitary, kelenjar adrenal, kelenjar gondok).



Walaupun tubuh memiliki organ untuk melakukan detoksifikasi makanan atau penyerangan, tapi kemampuan organ bekerja dapat menurun akibat banyaknya pencemaran dalam makanan yang kita konsumsi setiap hari. Bila terus dibiarkan, ini akan melemahkan badan kita dan menyebabkan timbulnya penyakit.

Mengonsumsi makanan organik secara konsisten diyakini dapat menjadi upaya mempertahankan diri dari ancaman beragam penyakit. Proses penyediaannya yang natural membuatnya aman dikonsumsi oleh tubuh.

Beberapa studi tentang makanan organik membuktikan bahwa nilai nutrisi yang

Waspada! Sakit Kepala Berkepanjangan

Radang otak telah merenggut nyawa Giska, putri sulung artis Dewi Yull. Setelah tiga bulan berjuang melawannya, Giska pun mengembuskan napas yang terakhir. "Banyak cairan menumpuk di kepalanya. Sebelum masuk rumah sakit, Giska mengalami pusing secara terus-menerus selama tiga bulan terakhir," terang Dewi Yull pertengahan Juni lalu.

Penyakit yang diderita Giska ini juga biasa disebut meningitis. Ada dua penyebabnya, yaitu terinfeksi bakteri ataupun virus. Pada umumnya meningitis 90 persen disebabkan oleh bakteri, misalnya bakteri TBC, *Streptococcus pneumoniae* atau *Neisseria meningitidis*. *Haemophilus influenzae* tipe B (Hib) juga dapat menjadi penyebab meningitis pada orang dewasa maupun anak-anak.

Meningitis yang disebabkan bakteri disebut sebagai meningitis bakterialis. Sedangkan meningitis yang disebabkan oleh virus umumnya tidak berbahaya karena akan pulih tanpa pengobatan dan perawatan yang spesifik. Berbeda halnya pada meningitis yang disebabkan oleh bakteri yang bisa mengakibatkan kematian pada 50 persen anak yang terkena. Sedangkan pasien meningitis yang berhasil sembuh biasanya menderita kerusakan otak permanen yang berdampak pada kehilangan pendengaran, kelumpuhan, atau keterbelakangan mental.

Pada bayi, penyakit ini sering tanpa gejala yang spesifik. Namun, segera waspada jika bayi mengalami demam dan kejang pada tengkuk (kaku kuduk), rewel, gelisah, tampak lemah, muntah, dan malas menyusui. Pada anak, gejala

demam dan kaku kuduk hampir sama. Biasanya anak yang lebih besar akan mengeluh sakit kepala, mual, tidak suka cahaya terang (fotofobia), dan tampak kebingungan.

Menurut Dr. Soedjatmiko, SpA(K), M.Si, Dokter Spesialis Anak Konsultan Tumbuh Kembang Pediatri Sosial, di negara berkembang seperti Indonesia ditemukan fakta bahwa penyebab meningitis terbanyak yaitu bakteri *Streptococcus pneumoniae*. Bakteri ini dapat ditemukan di tenggorokan dan rongga hidung orang dewasa, anak, dan bayi yang sehat. Meskipun mereka tidak sakit tapi tetap berpotensi menularkan bakteri tersebut. Media penularannya pun sangat mudah, melalui udara pada saat batuk, bersin, ataupun lewat percikan dahak (droplet).

Seseorang bisa diduga terserang meningitis



JANGAN LUPA: Meskipun terbebas dari bahan kimia, makanan organik tetap harus dicuci bersih sebelum dikonsumsi

dikandung lebih tinggi daripada makanan biasa. Misalnya kandungan vitamin C dalam tomat organik lebih tinggi ketimbang tomat biasa. Ada juga yang menemukan kadar anti-kanker flavonoid pada jagung dan stroberi organik. Namun riset lainnya menyebutkan bahwa makanan organik tidak memiliki keunggulan lebih dalam hal kandungan nutrisi. Perbedaan dalam hal kandungan nutrisi ini tergantung berapa lama ditanam dan disimpan di rak makanan. Yang pasti kandungan

nutrisi pada makanan organik berkurang akibat proses penyimpanan yang terlalu lama.

Dalam hal rasa, tidak ada kata sepakat apakah lebih enak atau tidak. Umumnya tekstur makanan organik lebih renyah, padat, dan aroma yang lebih kuat. Namun, selera tiap orang tentu berbeda. Hanya saja, jika ingin menikmati rasa makanan organik yang lebih alami, seperti buah organik, belilah di tempat buah itu ditanam dan pada musimnya. Kenyataannya, buah atau sayuran tidak akan lagi dalam kondisi terbaiknya bila sudah melewati penerbangan yang lama atau melewati proses pelapisan. Belum lagi bila harus tersimpan selama seminggu di pasar atau toko.

Meskipun terbebas dari bahan kimia saat pemrosesan awal sampai panen, makanan organik tetap harus dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Buah dan sayur tetap rawan terkontaminasi bakteri seperti E. Coli yang berasal dari tanah atau sumber pengairan. Gunakan air mengalir saat mencuci buah dan sayur agar kotoran atau bakteri terbawa air dan tidak menempel.

Secara penampilan, makanan organik seperti sayur dan buah secara kasat mata tidak terlalu berbeda. Tidak semua sayur atau buah organik harus bolong-bolong atau berpenampilan buruk, akan tetapi bisa juga bagus, bila sedang musimnya dan pengendalian hama terpadunya baik. Bila ragu, Anda dapat melihat label sertifikasi atau penjaminannya. Di Indonesia ada badan khusus yang didirikan untuk sertifikasi produk organik, salah satunya yaitu BioCert.

Selain itu, jangan ragu memilih produk lokal atau dalam negeri, setidaknya melakukan variasi dan keragaman konsumsi pangan sehari-hari. Seperti buah, kita bisa beralih ke jenis buah-buahan lokal setem-

pat seperti kecapi, manggis, salak, jambu bol, belimbing untuk menggantikan buah-buahan impor (setidaknya memperkecil jejak karbon). Dari segi nilai gizi, buah-buahan lokal tidak kalah hebat dengan buah impor seperti pear.

Penelitian tentang makanan organik terus dilakukan dan menemukan kesimpulan baru yang mengejutkan. Di Inggris, para peneliti dari London School of Hygiene & Tropical Medicine mengatakan makanan organik tidak lebih sehat dari makanan biasa. Padahal konsumen membayar lebih mahal untuk membeli makanan organik karena berharap mendapatkan manfaat kesehatan lebih dari makanan yang mereka konsumsi.

Dari 162 makalah ilmiah yang dipublikasikan bertahap selama 50 tahun, memberikan kesimpulan yang sama, bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kandungan gizi dalam makanan organik dan makanan biasa.

Seperti dikutip dari *Reuters*, Dr Alan Dangour, ketua tim penelitian menjelaskan hanya ada sejumlah kecil perbedaan dalam kandungan nutrisi yang ditemukan dalam makanan organik dan yang bukan organik dan tidak terlalu signifikan. Kandungan gizi dalam makanan organik pun tidak terlalu berdampak baik pada kesehatan seperti yang gengar dipromosikan.

Saat ini penjualan makanan organik mulai menurun di beberapa negara, termasuk Inggris sebagai negara yang pertamakali mempublikasikan hasil riset ini. Data dari Soil Association pada bulan April mengatakan, pertumbuhan penjualan produk makanan organik di Inggris melambat sebesar 1,7 persen di 2008. Angka ini menurun dari rata-rata pertumbuhan tahunan yang sebelumnya bercokol pada angka 26 persen selama hampir sepuluh tahun terakhir. ■ DGR

jika mempunyai riwayat pneumonia atau infeksi telinga. Dalam beberapa kasus, pengambilan sampel cairan otak diperlukan untuk mendiagnosa meningitis. Pada orang sehat, cairan otak tampak bening. Sementara pada penderita meningitis warna cairan terlihat keruh dan tes laboratorium mengindikasikan banyak bakteri dan jumlah sel darah putih yang berlebih.

Penderita meningitis perlu mendapat antibiotik sesegera mungkin. Perawatan umumnya dilakukan selama 10-14 hari. Pengobatan panjang itu dianggap perlu untuk mencegah komplikasi atau mencegah infeksi datang kembali.

Dr. Soedjatmiko SpA(K), M.Si selaku Sekretaris Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan penggunaan vaksin IPD bagi bayi-bayi di Indonesia. Karena hingga saat ini, hanya



0,6 persen dari 4,6 juta bayi yang lahir mendapat perlindungan melalui vaksinasi. Vaksin IPD sudah ada di Indonesia sejak 2006 dan direkomendasi

oleh IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). Pemberian vaksin paling baik dilakukan pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan, dan 12-15 bulan. ■ DGR

“Bob Marley” Pulang Kandang

Dari dunia cetak, lalu menuju dunia digital, kemudian kembali ke dunia cetak.

Koran edisi Minggu jadi koran wajib baca bagi penikmat cerita pendek (cerpen), karena hanya di terbitan hari Minggu saja koran menyediakan ruang untuk pemuatan cerpen. Banyaknya jumlah koran yang terbit di Indonesia, kemudian menjadi batu sandungan bagi para penikmat cerpen sebab tidak gampang untuk berburu seluruh koran Minggu yang ada.

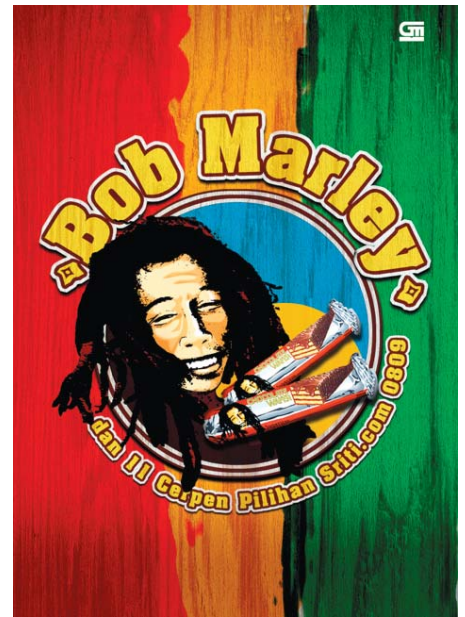
Seperti menjawab kebingungan para penikmat cerpen, pada tahun 2000, beberapa orang yang merasa gagal menjadi cerpenis lalu mendirikan situs *sriti.com*, sebuah *website* yang berisikan cerpen-cerpen yang sudah pernah dimuat di beberapa koran di Indonesia. Lahirnya *website* ini berawal dari kegiatan mereka yang suka mengkliping cerpen dari koran pada medio 90-an. Tanpa disadari, guntingan kliping mereka yang sudah menggunting itu telah menguning dan merapuh dimakan usia. Para pendiri *sriti.com* lalu mulai menyetik ulang kliping cerpen mereka untuk ‘mengawetkannya’ ke dalam bentuk digital, dan pada Agustus 2000, akhirnya mereka resmi mengorbitkan situs *sriti.com*.

Setelah sembilan tahun ‘menjaga keawetan’ cerpen-cerpen tersebut dalam dunia maya - 3379 kumpulan cerpen dari 934 cerpenis dan 53 media penerbitan - *sriti.com* meluncurkan buku *Bob Marley*

dan *11 Cerita Pilihan Sriti.Com 0809*, berisikan 12 cerpen dari 12 penulis dan 7 media penerbitan (koran) yang berbeda, yang telah disaring dari *website* mereka. Cerpen-cerpen dalam buku ini merupakan koleksi dari tahun 2008 sampai 2009 saja, itu pun awalnya terdapat lebih dari 600 cerpen yang mesti mereka seleksi lagi.

Cerpen *Kematian Bob Marley* karya Hasan Al Banna yang diangkat menjadi cerita utama juga judul buku ini, menceritakan tentang kematian tokoh *ego-letter* yang diberi nama Bob Marley. Dalam cerpen yang pertama kali diterbitkan di *Koran Tempo* ini, yang dikisahkan bukanlah Bob Marley penyanyi *reggae* legendaris asal Jamaika itu, melainkan seorang preman kampung yang dijuluki Bob Marley oleh para warga kampung tersebut.

Buku kumpulan cerpen terbitan Gramedia Pustaka Utama ini, tak hanya membawa para pembaca ke ‘arus liar’ imajinasi para cerpenisnya, tetapi juga menyajikan kepada pembaca hasil eksplorasi *sriti.com* terhadap cerpen dari koran daerah yang memiliki ‘daya tarik’ berimbang dengan cerpen-cerpen terbitan koran nasional. Lewat buku ini, pembaca bisa menikmati cerpen *Cinta pada Sebuah Pagi* karya Eep Saefullah Fatah, *Guru Safedik* karya Farizal Sikumbang, dan *Malam Kunang-kunang* karya Rama Dira



J, yang ketiganya pernah dimuat di harian *Kompas*.

Ada juga tiga cerpen yang sebelumnya diterbitkan di *Koran Tempo* yakni *Kematian Bob Marley* karya Hasan Al Banna, *Satu Kunang-kunang, Seribu Tikus* karya Intan Paramaditha dan *Aku Bercerita dari Pesawat yang Sedang Terbang*, karya Bamby Cahyadi. Melalui buku ini pembaca juga bisa menikmati beberapa cerpen dari koran-koran daerah, seperti cerpen *Induak Tubok* karya Zelfeni Wimra (*Padang Ekspres*), *Kandang* karya Yanusa Nugroho (*Jawa Pos*), *Malam Basilisk* karya Dinar Rahayu dan *Tanah Lalu* karya Yetti A.KA (*Suara Merdeka*), *Kunti Tak Berhenti Berlari* karya Berto Tukan (*Batam Pos*), dan cerpen *Batubujang* karya Benny Arnas (*Singgalang Padang*).

Meskipun media cetak seperti koran, majalah atau buku merupakan media publikasi efektif dan masih tak tergantikan secara signifikan selama ini, tapi setidaknya dengan dibopongnya cerpen-cerpen ini ke dunia maya oleh *sriti.com* tentu sangat memudahkan peminat sastra untuk mengakses karya-karya para cerpenis. Sedangkan bagi sang kreator (cerpenis), tentu ‘publikasi digital’ yang dilakukan *sriti.com* ini cukup membantu mengkilapkan citranya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, cerpen-cerpen dalam buku ini berasal dari bentuk cetak (koran) yang kemudian diupload ke dunia maya melalui *website* *sriti.com*, kini cerpen-cerpen tersebut oleh punggawa *sriti.com* dikembalikan ke bentuk cetak lagi, ke pelabuhan impian bagi para penulisnya, dalam sebuah buku antologi *Bob Marley dan 11 Cerita Pilihan Sriti.Com 0809*, yang telah beredar di pasar sejak akhir Desember 2009 lalu. ■ ARIF

Semarak Buku Tentang Piala Dunia

Bila Anda perhatikan rak buku baru di toko-toko buku belakangan ini, Anda pasti mendapatkan beberapa buku yang bertema Piala Dunia. Para penerbit buku rupanya memanfaatkan momentum Piala Dunia 2010 untuk menambah koleksi penerbitannya. Buku-buku yang kita jumpai itu sarat dengan tampilan visual yang menghibur sekaligus menambah wa-



wasan pembacanya. Beberapa buku itu diantaranya ‘Sepak Bola Dunia 2010’ terbitan Carlton Books Ltd., Inggris yang sudah diterjemahkan ; ‘2010 FIFA World Cup South Africa’ oleh Keir Radnedge ; ‘100 + Fakta Unik Piala Dunia’ karya dua wartawan olahraga Asep Ginanjar dan Agung Harsya ; dan ‘Segalanya Tentang SepakBola’ karya Hendri Firzani.

TokohINDONESIA



MAJALAH BERBASIS WEBSITE

www.tokohindonesia.com

THE EXCELLENT BIOGRAPHY



Al-Zaytun



KARSA



PARAMADINA

BUDHY MUNAWAR-RACHMAN

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

ENSIKLOPEDI

Nurcholish Madjid

Disunting oleh:
BUDHY MUNAWAR RACHMAN



**Untuk Pemesanan
Hubungi:**

**Mahad Al-Zaytun
(0234) 742815**

**Majalah Berita Indonesia
(021) 8292735**